



PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

Ardhariksa Zukhruf Kurniullah • Annisa Ilmi Faried • Hisarma Saragih
Nugrahini Susantinah Wisnujati • Amruddin • Syafrizal
I Made Marthana Yusa • Hasnidar • Daud • Jossapat Hendra Prijanto



PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pembangunan dan Perubahan Sosial

Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Annisa Ilmi Faried
Hisarma Saragih, Nugrahini Susantinah Wisnujati
Amruddin, Syafrizal, I Made Marthana Yusa
Hasnidar, Daud, Jossapat Hendra Prijanto



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Pembangunan dan Perubahan Sosial

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, Annisa Ilmi Faried
Hisarma Saragih, Nugrahini Susantinah Wisnujati
Amruddin, Syafrizal, I Made Marthana Yusa
Hasnidar, Daud, Jossapat Hendra Prijanto

Editor: Ronal Watrianthos

Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

IKAPI: 044/SUT/2021

Ardhariksa Zukhruf Kurniullah., dkk.

Pembangunan dan Perubahan Sosial

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 168 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-342-123-2

Cetakan 1, Juli 2021

- I. Pembangunan dan Perubahan Sosial
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya yang berlimpah sehingga buku Pembangunan dan Perubahan Sosial ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan kolaborasi hasil tulisan dosen-dosen di berbagai Perguruan Tinggi se-Indonesia yang kompeten di bidangnya masing-masing, dalam bidang Pembangunan dan Perubahan Sosial.

Tuntutan globalisasi dan regionalisasi merupakan faktor penting dalam mengejar arus modernisasi pembangunan dalam perkembangan suatu negara. Tinjauan umum berdasarkan tujuan utama pembangunan suatu negara adalah proses pengarus-utamaan modernisasi atau mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Modernitas suatu negara juga tidak lagi mengacu pada masalah ekologi westerinisasi terhadap budaya lokal dan keragaman budaya, namun konsekuensi dari perubahan teknologi dan bahkan kekuatan pasar e-commerce serta institusi internasional saat ini telah mengambil alih peran modernisasi suatu negara sebagai agen pembangunan konvensional.

Pada buku ini, para penulis memetakan tren utama dalam pemikiran pembangunan, yaitu memeriksa tren pembangunan secara rinci serta membangun inventarisasi arah saat ini dan masa depan. Tren dalam diskusi ini mengacu pada arah jangka panjang dan berkelanjutan serta arah masa depan yang masuk akal di bidang pembangunan. Fokusnya adalah pada teori pembangunan, yaitu, refleksi terorganisir pada pembangunan secara keseluruhan. Karena teori pembangunan utama juga merupakan kerangka kebijakan, dimana pendekatan ini mencakup strategi pembangunan, selain itu kebijakan aktual diinformasikan oleh banyak pertimbangan lain sehingga diskusi ini menekankan peta jalan teori pembangunan. Pada bagian-bagian berikutnya para penulis menyandingkan pemahaman yang berbeda tentang pembangunan dengan perubahan pola hegemoni global dan etika pembangunan.

Adapun dalam Buku ini dibahas beberapa materi antara lain :

Bab 1 Konsep dan Teori Pembangunan

Bab 2 Permasalahan Pembangunan Kependudukan, Kependidikan, dan Ketenagakerjaan

Bab 3 Permasalahan Budaya Penghambat Pembangunan

Bab 4 Dampak Pembangunan Terhadap Peran Gender

Bab 5 Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan

Bab 6 Dampak Pembangunan Terhadap Sosial Budaya

Bab 7 Globalisasi: Konsep, Dimensi, dan Sejarah

Bab 8 Globalisasi: Modal Sosial dan Modal Budaya

Bab 9 Globalisasi: Identitas dan Budaya

Bab 10 Etika Pembangunan

Semoga buku ini bermanfaat sebagai literatur dan referensi penunjang bagi mahasiswa, para dosen pengampu mata kuliah Teori Pembangunan dan Perubahan Sosial serta para pembaca yang sedang mempelajari dan mengembangkan Pembangunan dan Perubahan Sosial saat ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung selama proses penulisan, penyusunan, dan penerbitan buku ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa bersama dan menyertai kita didalam setiap aktivitas kita.

Jakarta, 2 Juni 2021

Penulis

Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, dkk

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii

Bab 1 Konsep dan Teori Pembangunan

1.1 Pendahuluan	1
1.2 Berbagai Pendekatan Dalam Teori Pembangunan	7
1.3 Komunikasi Dalam Teori Pembangunan dan Perubahan Sosial	11

Bab 2 Permasalahan Pembangunan Kependudukan, Kependidikan, dan Ketenagakerjaan

2.1 Pendahuluan	19
2.2 Permasalahan Kependudukan	20
2.2.1 Persebaran Penduduk yang Tidak Merata	20
2.2.2 Jumlah Penduduk yang Besar	23
2.2.3 Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi	24
2.2.4 Kepadatan Penduduk	25
2.3 Permasalahan Kependidikan	26
2.4 Permasalahan Ketenagakerjaan	29

Bab 3 Permasalahan Budaya Penghambat Pembangunan

3.1 Pendahuluan	33
3.2 Kebudayaan	34
3.3 Pembangunan	37
3.4 Permasalahan Budaya Yang Menghambat Pembangunan	38
3.4.1 Budaya Korupsi	38
3.4.2 Budaya Konsumerisme	42
3.4.3 Budaya Plagiat	44
3.4.4 Budaya Malas	45

Bab 4 Dampak Pembangunan Terhadap Peran Gender

4.1 Pendahuluan	47
4.2 Ketidakadilan Gender	48

4.3 Pembangunan Berkelanjutan	51
4.4 Dampak Pembangunan Pada Peran Gender.....	52
Bab 5 Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan	
5.1 Pendahuluan.....	59
5.2 Dampak Pembangunan	61
5.2.1. Dampak Positif Pembangunan	63
5.2.2. Dampak Negatif Pembangunan.....	64
Bab 6 Dampak Pembangunan Terhadap Sosial Budaya	
6.1 Pendahuluan.....	69
6.2 Konsep Pembangunan.....	73
6.2.1 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)	74
6.2.2 Cakupan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	80
6.3 Dampak Pembangunan Terhadap Sosial Budaya.....	84
Bab 7 Globalisasi: Konsep, Dimensi, dan Sejarah	
7.1 Pendahuluan.....	93
7.2 Dimensi	99
7.3 Sejarah.....	104
Bab 8 Globalisasi: Modal Sosial dan Modal Budaya	
8.1 Pendahuluan.....	113
8.2 Modal Sosial dan Modal Budaya	114
8.2.1 Jenis-jenis Modal Sosial dan Modal Budaya.....	116
8.2.2 Unsur - Unsur Modal Sosial dan Modal Budaya	117
8.2.3 Peran Modal Sosial dan Modal Budaya.....	119
8.2.4 Fungsi Modal Sosial dan Modal Budaya.....	120
8.2.5 Tipe-tipe Modal Sosial dan Budaya	120
Bab 9 Globalisasi: Identitas dan Budaya	
9.1 Pendahuluan.....	125
9.2 Identitas dan Budaya	128
9.2.1 Identitas dan Budaya Pada Arus Globalisasi	130
9.2.2 Homogenisasi.....	132
9.2.3 Heterogenitas	133
9.2.4 Hibridisasi	133

Bab 10 Etika Pembangunan

10.1 Pendahuluan.....	135
10.2 Kajian Literatur.....	137
10.2.1 Tujuan Etika Pembangunan.....	137
10.3 Moral dan Etika Pembangunan	138
10.3.1 Etika Pembangunan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat	139
10.3.2 Upaya Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pembangunan.....	141
Daftar Pustaka	143
Biodata Penulis	161

Daftar Gambar

Gambar 2.1: Jumlah Penduduk di Setiap Provinsi di Indonesia 2020.....	22
Gambar 2.2: Tingkat Populasi Terbesar di Dunia 2021	23
Gambar 2.3: Pertumbuhan Penduduk di Indonesia periode 2000-2020.....	25
Gambar 2.4: Kepadatan Penduduk di Indonesia Periode 2000-2020	26
Gambar 2.5: Tingkat Buta Huruf di Indonesia (%).....	28
Gambar 2.6: Pengangguran di Indonesia Periode 2000-2020.....	31
Gambar 2.7: Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian.....	32
Gambar 4.1: Mutilasi Genital Pada Perempuan di Dunia.....	50
Gambar 5.1: Banjir Sebagai Dampak Pembangunan	61
Gambar 5.2: Kesenjangan, Keselarasan, dan Keseimbangan antara Kualitas Manusia dan Lingkungan	63
Gambar 5.3: Dampak Konversi Lahan terhadap Lingkungan	67
Gambar 6.1: Perbandingan Hutang Negara Dari Era Soeharto Hingga Jokowi.....	89
Gambar 6.2: Indonesia Environmental Challenge	90
Gambar 7.1: Aspek Kunci Dari Globalisasi	97

Daftar Tabel

Tabel 2.1: Jumlah penduduk di Setiap Provinsi di Indonesia 2020	21
Tabel 2.2: Tingkat Populasi Terbesar di Dunia 2021.....	23
Tabel 2.3: Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Periode 2000-2020.....	24
Tabel 2.4: Kepadatan Penduduk di Indonesia Periode 2000-2020	25
Tabel 2.5: Tingkat Buta Huruf di Indonesia (%).....	28
Tabel 2.6: Pengangguran di Indonesia periode 2000-2020	30
Tabel 2.7: Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian.....	31
Tabel 4.1: Ijazah /STTB Tertinggi Yang Dimiliki Penduduk Indonesia Dalam Persen (%).....	55
Tabel 4.2: Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Indonesia Berumur 15 Tahun Ke Atas (Persen).....	56
Tabel 4.3: Pengeluaran per Kapita yang Menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	57
Tabel 7.1: Dimensi Globalisasi dan Ilustrasi Contohnya.....	101
Tabel 7.2: Dimensi Dari Perubahan Iklim dan Ilustrasi Contohnya	102
Tabel 7.3: Fase Globalisasi	111

Bab 1

Konsep dan Teori Pembangunan

1.1 Pendahuluan

Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya, di mana dalam Bahasa teknis ekonomi ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau *Gross National Product* (GNP). Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB yaitu meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Namun GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Kita pun juga bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya.

Selain GNP, tuntutan globalisasi dan regionalisasi merupakan faktor penting dalam mengejar arus modernisasi pembangunan dalam perkembangan suatu negara. Tinjauan umum berdasarkan tujuan utama pembangunan suatu negara adalah proses pengarus-utamaan modernisasi atau mengejar keteringgalan dari negara-negara maju. Modernitas suatu negara juga tidak lagi mengacu pada masalah ekologi westernisasi terhadap budaya lokal dan keragaman budaya, namun konsekuensi dari perubahan teknologi dan bahkan kekuatan pasar e-commerce serta institusi internasional saat ini telah mengambil alih peran modernisasi suatu negara sebagai agen pembangunan konvensional. Klaim modernisasi dan universalis ekonomi neoklasik serta kebijakan penyesuaian struktural telah merusak fondasi studi pembangunan dan gagasan bahwa negara berkembang harus mampu bersaing dalam volatilitas modernisasi.

Pada Bab ini, penulis memetakan tren utama dalam pemikiran pembangunan, yaitu memeriksa tren pembangunan secara rinci serta membangun inventarisasi arah saat ini dan masa depan. Tren dalam diskusi ini mengacu pada arah jangka panjang dan berkelanjutan serta arah masa depan yang masuk akal di bidang pembangunan. Fokusnya adalah pada teori pembangunan, yaitu, refleksi terorganisir pada pembangunan secara keseluruhan. Karena teori pembangunan utama juga merupakan kerangka kebijakan, di mana pendekatan ini mencakup strategi pembangunan, selain itu kebijakan aktual diinformasikan oleh banyak pertimbangan lain sehingga diskusi ini menekankan peta jalan teori pembangunan. Argumen penulis kemudian beralih ke makna yang berbeda dari pembangunan dari waktu ke waktu, yang menempatkan diskusi tentang tren kontemporer dalam konteks sejarah lahirnya teori pembangunan. Bagian berikutnya menyandingkan pemahaman yang berbeda tentang pembangunan dengan perubahan pola hegemoni global.

Kemudian yang menjadi pertanyaan penting dari hal tersebut di atas adalah, Sejauh mana kontribusi teori pembangunan terhadap situasi hegemoni global saat ini? Teori merupakan suatu kritik dan revisi pengetahuan masa lalu dalam bentuk proposisi umum dan perpaduan pandangan yang beragam dan pengetahuan parsial dalam kerangka penjelasan umum. Argumen penulis mengenai teori pembangunan yaitu sebagian besar termasuk dalam level grand theory dalam kerangka penjelasan yang luas.

Ada banyak hal yang tidak dibicarakan oleh teori pembangunan. Banyak masalah pembangunan ditangani oleh teori menengah atau mikro di antaranya pertanyaan tentang pembangunan pedesaan, industrialisasi, urbanisasi,

kebijakan perdagangan, dll. Teori pembangunan seperti itu menyangkut pada kerangka penjelasan yang lebih besar.

Dalam ilmu sosial sekarang secara luas diasumsikan bahwa realitas pembangunan dikonstruksi secara sosial. Cara orang berpikir dan berbicara tentang realitas sosial memengaruhi agenda, kebijakan, hukum sosial, dan cara hukum sosial diinterpretasikan. Sama seperti persepsi yang tidak hanya membentuk argumen semu tetapi harus mengonstruksi realitas, serta pengetahuan tidak hanya mencerminkan akan suatu hal tetapi harus mampu membangun realitas. Pengetahuan bersifat politis, membentuk persepsi, agenda, kebijakan. Kemudian teori adalah tempat bertemunya ideologi, politik, dan penjelasan yang membingkai dan mendefinisikan bidang keilmuan.

Teori merupakan penyulingan refleksi atas praktik dalam bahasa konseptual sehingga dapat dihubungkan dengan pengetahuan masa lalu. Hubungan antara teori dan praktik tidaklah merata, teori cenderung tertinggal di belakang praktik, di belakang inovasi di lapangan, dan praktik cenderung tertinggal di belakang teori (karena pembuat kebijakan dan aktivis mempunyai keterbatasan waktu untuk merefleksikan hal tersebut) (Pieterse, 1996). Pengamatan yang cermat pada praktik dapat menghasilkan teori baru, dan teori atau praksis teoretis dapat menginspirasi praktik baru. Teori juga bersifat kontekstual di mana teori bereaksi terhadap teori lain dan sering menekankan perbedaan daripada saling melengkapi, kompleksitas yang dihadapi dalam kenyataan sedemikian rupa sehingga kita biasanya memerlukan beberapa analitik dalam kombinasi (Pieterse, 2009).

Kemudian, apakah teori pembangunan merupakan masalah ilmu sosial atau politik? Penulis juga memiliki pandangan yang berbeda tentang derajat otonomi teori pembangunan. Beberapa ilmuwan menempatkan teori pembangunan terutama sebagai bagian dari ilmu sosial dan dengan demikian menekankan pengaruh pemikiran ekonomi dan sosial klasik (misalnya Preston 1996, Martinussen 1997).

Ilmuwan lain secara implisit memandang teori pembangunan terutama sebagai ideologi, seperti kapal yang terguncang di lautan tekanan politik dan arus yang berubah-ubah. Mereka menganggap kecenderungan politik, dalam arti luas, lebih penting dalam membentuk teori pembangunan daripada pertimbangan teoritis (misalnya Frank 1971). Keuntungan dari pandangan ini adalah bahwa ia menarik perhatian pada peran ideologis teori pembangunan dalam

menetapkan agenda, membingkai prioritas, membangun koalisi, serta membenarkan kebijakan.

Keterbatasannya adalah ia memperlakukan teori pembangunan sebagai produk sampingan dari proses politik dan bukan sebagai proses intelektual juga. Di antara pandangan-pandangan tersebut terdapat unsur intelektual sekaligus politik dalam teori pembangunan. Dalam pendekatan kontekstual teori pembangunan baik konteks politik maupun pengaruh dari ilmu-ilmu sosial diperhitungkan (seperti dalam Corbridge 1995, Leys 1996). Inilah pendekatan yang kita biasa menyebutnya sebagai sosiologi pengetahuan pembangunan yang diadopsi oleh buku ini.

Menurut Björn Hettne, 'Pembangunan dalam pengertian modern menyiratkan perubahan sosial yang disengaja sesuai dengan tujuan masyarakat' (2008a: 6). Karena tidak semua tujuan masyarakat bersifat pembangunan (beberapa hanya berkaitan dengan penetapan otoritas, dll.) Penulis akan memasukkan kriteria perbaikan dan mendefinisikan pembangunan sebagai intervensi terorganisir dalam urusan kolektif menurut standar perbaikan. Apa yang merupakan perbaikan dan apa intervensi yang tepat jelas bervariasi menurut kelas, budaya, konteks sejarah dan hubungan kekuasaan. Teori pembangunan adalah negosiasi dari isu-isu ini.

Kekuatan dan kelemahan pemikiran pembangunan dalam pandangan ini sifatnya berorientasi pada produk kebijakan. Sebagian karena alasan yang sama, pemikiran pembangunan menempati peringkat yang cukup rendah pada totem ilmu sosial. Sebagai ilmu sosial terapan, menempatkan pemikiran pembangunan memiliki status turunan. Hal ini lebih sering menjadi pengikat kerangka kerja yang dikembangkan dalam ilmu lain daripada *trendsetter*.

Selain itu, teori pembangunan lebih sering dipengaruhi oleh ilmu-ilmu sosial yang lain yaitu Evolucionisme, Marxisme, Neo-Marxisme, Keynesianisme, fungsionalisme struktural, ekonomi neoklasik, dan pasca strukturalisme adalah beberapa paradigma ilmu sosial yang adopsi dan diterapkan pada teori-teori pembangunan pada waktu yang berbeda.

Bisa dibayangkan, teori pembangunan merupakan cabang terkecil dalam ilmu sosial. Gagasan bahwa teori pembangunan kurang diperhitungkan karena menyangkut pada status teori pembangunan yang mencerminkan ketertinggalan teori antara studi pembangunan dengan ilmu sosial secara umum, serta sebuah warisan kolonial dalam membangun pengetahuan dan kebuntuan yang berulang pada bidang pembangunan. Dekolonisasi

pengetahuan adalah masalah kontestasi yang berkelanjutan (Apffel-Marglin dan Marglin 1996, Dahl 2008, Nederveen Pieterse dan Parekh 1995).

Sebagai bagian dari percepatan globalisasi, kebijakan neoliberal memaksakan ekonomi neoklasik, yang menerapkan standar kebijakan dan sistem akuntansi untuk menyelaraskan sistem ekonomi seiring dengan perubahan hubungan geopolitik, maka pembangunan telah mengubah maknanya dari waktu ke waktu. Seiring waktu teori pembangunan membawa arti yang sangat berbeda. Istilah pembangunan dalam pengertiannya yang sekarang berasal dari era pemikiran pembangunan modern pasca perang. Di belakang, praktik-praktik sebelumnya telah dipandang sebagai anteseden dari kebijakan pembangunan, meskipun istilah pembangunan belum tentu digunakan pada saat itu.

Jadi Kurt Martin (1991) menganggap ekonom politik klasik, dari Ricardo hingga Marx, sebagai pemikir pembangunan karena mereka membahas masalah pembangunan ekonomi yang serupa. Dalam konteks ini, makna inti dari pembangunan adalah mengejar ketertinggalan dari negara-negara industri maju. Cowen dan Shenton mengemukakan definisi lain dari pembangunan. Di Inggris abad ke-19, pembangunan, menurut mereka, mengacu pada solusi untuk kemajuan dan perkembangan. Hal ini melibatkan pertanyaan seperti populasi (menurut Malthus), kehilangan pekerjaan (untuk Luddites), pertanyaan sosial (menurut Marx dan lain-lain) dan kemelaratan perkotaan.

Dalam argumen ini, kemajuan dan perkembangan (yang sering dipandang sebagai jejaring) dikontraskan, dan perkembangan berbeda dari dan melingkupi kemajuan. Dalam pemikiran pembangunan dan ekonomi modern, makna inti dari pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, seperti dalam teori pertumbuhan dan teori Big Push. Dalam perjalanan waktu mekanisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari ini, seperti dalam Tahapan Pertumbuhan Ekonomi Rostow (1960).

Ketika pemikiran pembangunan diperluas mencakup modernisasi, pertumbuhan ekonomi digabungkan dengan modernisasi politik, yaitu pembangunan bangsa, dan modernisasi sosial seperti menumbuhkan kewirausahaan dan orientasi prestasi. Dalam pemikiran ini, makna inti dari pembangunan juga adalah pertumbuhan ekonomi atau akumulasi modal. Bentuknya yang terdistorsi adalah akumulasi dependen yang mengarah pada pengembangan keterbelakangan, dan bentuk peralihannya adalah pengembangan dependen terkait.

Tujuan positifnya adalah akumulasi nasional (atau pembangunan autosentris). Pemikiran pembangunan alternatif memperkenalkan pemahaman baru tentang pembangunan yang berfokus pada pengembangan sosial dan masyarakat dan kemakmuran manusia (Friedmann 1992). Dengan pembangunan manusia pada pertengahan 1980-an muncul pemahaman pembangunan sebagai kapasitas, mengikuti karya Amartya Sen tentang kapasitas dan hak. Dalam pandangan ini, bagi Sen, untuk sampai pada keadaan yang layak berdasarkan martabatnya sebagai manusia, setiap orang juga membutuhkan kebebasan dalam pengertian daya, kemampuan nyata, atau kapabilitas. Dalam hal ini, kebebasan sebagai kapabilitas itu terdiri dari dua aspek yaitu kebebasan kesejahteraan (*wellbeing freedom*) dan kebebasan pelaku (*agency freedom*).

Dari hal yang telah diungkapkan tersebut diatas, terdapat perspektif dalam memaknai pembangunan yaitu dalam arti campur tangan pemerintah melalui pertumbuhan ekonomi, yang harus dicapai melalui deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi (Kurniullah et al., 2020). Dengan kata lain, ada beberapa cara untuk memahami pergeseran makna pembangunan dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah dengan melihat wacana arkeologi pembangunan oleh pemerintah semacam ini sebagai dekonstruksi pembangunan dan sebagai bagian dari kritik pembangunan.

Pembangunan kemudian berfungsi sebagai cermin dari perubahan kapasitas, prioritas, pilihan ekonomi dan sosial. Serta menggabungkan kembali pandangan-pandangan yang berbeda sebagai dimensi pembangunan, yaitu untuk menyatukan semuanya sebagai bagian dari mosaik pembangunan dan dengan demikian merekonstruksi pembangunan sebagai sintesis komponen (misalnya Martinussen 1997).

Keterbatasan dari perspektif ini adalah bahwa ia mengambil sejarah dari pembangunan. Jika kita menganggap setiap teori menawarkan Gestalt perkembangan, gambaran total dari sudut tertentu, maka rangkaian teori yang berurutan dan yang bersaing menawarkan pandangan kaleidoskopis ke dalam cermin kolektif. Bagaimanapun, perbedaan makna pembangunan berkaitan dengan perubahan hubungan kekuasaan dan hegemoni, yang merupakan bagian dari pandangan di cermin kolektif.

1.2 Berbagai Pendekatan Dalam Teori Pembangunan

Makna pembangunan telah memperoleh interpretasi yang beragam dari para ilmuwan yang berbeda seperti Amartya Sen, Todaro, Coralie Bryant, dll. Pembangunan didefinisikan oleh Todaro dan Smith sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer, dan institusi nasional, serta pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan absolut. Kebanyakan para ilmuwan mengemukakan teori-teori tentang tren perkembangan pembangunan, bagaimana hal itu dicapai dan bagaimana hal itu dihalangi. Teori-teori tersebut adalah teori Modernisasi, teori Ketergantungan dan teori Feminis.

Teori modernisasi mengelaborasi dua kategori utama masyarakat di dunia, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Para ahli teori berpendapat bahwa masyarakat tradisional terjerat oleh norma, kepercayaan, dan nilai-nilai yang menghambat proses perkembangan mereka. Oleh karena itu mereka harus menyesuaikan gaya hidup modern, sehingga berkonsentrasi pada akumulasi kapital dan industrialisasi.

Pada intinya, teori ini berusaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat inferior, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tradisional yang seharusnya untuk memperoleh kebutuhan hidup dasar dan sekunder, dengan memperkenalkan teknologi modern dan strategi ekonomi ke dunia ketiga. Ahli teori modernisasi, Rostow, juga mengusulkan mesin transisi yang cepat bagi masyarakat tradisional untuk berkembang; ini adalah persiapan untuk lepas landas, lepas landas, perjalanan menuju kedewasaan dan periode konsumsi massal. Proses jalur transisional ini menempatkan masyarakat tradisional pada jalur pembangunan. Sekali lagi, teori ini berhasil dalam gagasan bahwa norma, nilai, dan kepercayaan suatu masyarakat dapat memengaruhi perubahan sosial masyarakat tersebut.

Terlepas dari kelebihan yang dikaitkan dengan teori, ia memiliki kelemahan yang harus diatasi. Pertama, teori ini berusaha untuk hanya mencakup pertumbuhan ekonomi dan industri konkret dari negara-negara dunia ketiga. Teori tersebut tidak memiliki pandangan Amartya tentang pembangunan, yang menyatakan bahwa “pembangunan dapat dilihat sebagai proses perluasan kebebasan yang dinikmati masyarakat” (Sen, 1999).

Bagi Sen, pembangunan memerlukan kebebasan, kebebasan, dan harga diri manusia yang diabaikan oleh teori. Kedua, teori modernisasi mengemukakan bahwa negara-negara dunia ketiga harus mengakui proses pembangunan negara-negara modern. Ia gagal untuk mengakui fakta bahwa satu sistem tidak dapat diadopsi oleh semua negara karena latar belakang sejarah dan budaya yang beragam dari negara-negara tersebut.

Terakhir, Wallerstien menunjukkan bahwa teori tersebut menciptakan ketergantungan dan eksploitasi negara-negara dunia ketiga. Teori ini mengabaikan struktur sosial dan budaya negara-negara dunia ketiga dan memaksakan proses-proses etnosentris yang miskin untuk berkembang. Teori ketergantungan di sisi lain menentang teori modernisasi. Argumen utamanya adalah bahwa, peningkatan terus-menerus dalam industrialisasi di negara-negara maju sama-sama membuat negara-negara miskin menjadi terbelakang sebagai akibat dari surplus ekonomi negara-negara miskin yang dieksploitasi oleh negara-negara maju.

Sebuah analisis hebat yang dilakukan oleh Frank A. Gunder dengan mampu menyanggah isu-isu lemah, non-historis dan etnosentris yang dikemukakan oleh teori modernisasi (Webster 1984). Juga, Gunder berhasil menunjukkan ketimpangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang, serta ketimpangan internal yang merajalela di berbagai negara pinggiran dan eksploitasi surplus ekonomi negara berkembang selama kolonialisme. Sekali lagi, teori ini menekankan esensi pada fakta bahwa pembangunan tidak terutama didasarkan pada nilai-nilai budaya tetapi lebih pada struktur dan prosedur ekonomi dan sosial.

Teori ketergantungan menimbulkan beberapa kelemahan. Frank gagal menunjukkan ketergantungan spesifik dan kunci dari negara-negara kurang berkembang pada metropolis, ia hanya menyatakan bahwa negara-negara miskin bergantung pada negara-negara kaya tanpa klarifikasi khusus. Teori ini meremehkan perkembangan internal. Ini mempromosikan gagasan bahwa industri pribumi tidak dapat mengembangkan produktivitasnya yang tidak benar. Selain itu, teori tersebut menolak untuk menunjukkan bagaimana negara-negara maju mendapatkan akses ke surplus ekonomi negara-negara dunia ketiga.

Teori pembangunan feminis memiliki argumentasi utamanya bahwa perempuan memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan oleh karena itu harus diberdayakan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dan implementasinya. Teori ini banyak berperan dalam pembangunan

kapasitas dan kapabilitas perempuan terkait pembangunan. Juga kaum feminis mampu membawa kesadaran akan ketidaksetaraan gender di antara masyarakat dan terlibat dalam kegiatan besar-besaran untuk membebaskan perempuan. Feminis berhasil mengajukan teori yaitu, *Women in Development* (WID) dan *Woman and development* (WAD) untuk mempromosikan kesetaraan.

Terlepas dari pencapaian teori feminis, mereka tampaknya menangani kepentingan perempuan alih-alih menangani isu-isu yang berkaitan dengan gender sebagai siapa. Teori-teori Modernisasi, teori Ketergantungan dan teori Feminis di atas sangat jelas, bahwa pemilihan dan representasi tren perkembangan pembangunan adalah masalah yang rumit. Jika benar bahwa pembangunan adalah cerminan zaman, maka laporan tren perkembangan pembangunan harus melihat ke cermin kolektif dan ada banyak sudut untuk diambil agar argumen sesuai dengan kesempatan itu. Tidak ada metodologi untuk mencapai hal ini dengan cara yang dinamis.

Format yang diadopsi di sini adalah profil singkat tren, dengan cara pengantar diskusi dalam buku ini. Keterbatasan diskusi semacam ini adalah tidak adanya besaran atau nilai relatif dan fakta bahwa segala sesuatu bersifat kontekstual. Tren tertentu mungkin signifikan tetapi tanpa analisis kuantitatif, ini tetap impresionistik. Pertama kita akan membahas tren jangka panjang dalam teori pembangunan. Karena merupakan perubahan jangka panjang (lebih dari lima puluh tahun atau lebih), meski begitu, perspektif jangka panjang dalam bidang yang didominasi oleh jangka pendek mungkin diterima.

Bisa dibayangkan, tren jangka panjang dalam teori pembangunan paralel dengan pergeseran umum dalam ilmu sosial. Mereka dapat dicirikan sebagai pergeseran bertahap dari epistemologi abad kesembilan belas ke akhir abad kedua puluh.

Pertama-tama, ini melibatkan pergeseran dari perspektif strukturalis yang menekankan peran struktur makro menuju pandangan yang lebih berorientasi pada agensi. Pemikiran pembangunan klasik dan modern pada dasarnya strukturalis, penekanannya adalah pada pola skala besar dari realitas sosial oleh perubahan struktural dalam ekonomi, negara dan sistem sosial. Hal ini juga berlaku untuk pemikiran perkembangan kritis waktu itu, yang diinformasikan oleh Marxisme, yang dalam bentuk ortodoksnya pada dasarnya adalah strukturalis. Ini lebih lanjut berlaku untuk sekolah strukturalis yang terkait dengan Raúl Prebisch, yang mendahului munculnya teori ketergantungan di

Amerika Latin, dan Neo-Marxisme, teori ketergantungan, mode analisis produksi, strukturalis Althusserian Marxisme dan sekolah regulasi.

Dalam ilmu sosial umumnya pandangan ini mulai berubah dengan berkembangnya pengaruh fenomenologi (berasal dari antededen abad kesembilan belas) dan berbagai orientasi seperti eksistensialisme (dan penekanannya pada tanggung jawab individu), hermeneutika (melibatkan epistemologi yang lebih kompleks), interaksionisme simbolik dan etnometodologi (dalam antropologi), ekonomi institusional baru dan pilihan rasional, pilihan dan kemampuan publik (dalam ekonomi) dan feminisme (misalnya teori sudut pandang).

Dalam Marxisme, ia mulai berubah dengan pengaruh Marxisme Gramscian. Dengan cara yang berbeda, semua orientasi ini menyiratkan pergeseran penekanan dari pandangan strukturalis ke arah institusional dan berorientasi agensi. Ini juga dapat digambarkan sebagai perubahan dari pandangan deterministik ke interpretatif (bnd. Bauman 1992 tentang perubahan peran intelektual dari legislator ke interpreter) dan dari pandangan materialis dan reduksionis ke pandangan multidimensi dan holistik.

Penjelasan yang berbeda dari pergeseran ini adalah dari strukturalisme ke konstruktivisme, yaitu, dari penjelasan tentang realitas sosial yang ditentukan dan dipolakan oleh struktur makro, ke penjelasan tentang realitas sosial yang dibangun secara sosial. Garis keturunan konstruktivisme mencakup fenomenologi seperti dalam Schutz (1972), Berger dan Luckmann (1967), dan Max Weber, memang banyak karya Weber yang berpandangan konstruktivis. Titik balik yang familier adalah teori strukturasi Giddens (1984). Poststrukturalisme dan postmodernisme, dalam arti metodologis, merupakan ekspresi lebih lanjut dari reorientasi ini (Rosenau 1992).

Dalam studi pembangunan, perubahan luas ini melibatkan berbagai implikasi. Salah satu konsekuensi dari penekanan keagenan adalah pemikiran pembangunan menjadi spasial dan lebih bersifat lokal atau regional. Implikasi lain adalah kepedulian terhadap diferensiasi dan keragaman. Pemikiran perkembangan awal dan modern adalah generalisasi dan homogenisasi; strukturalisme secara intrinsik esensial. Sebaliknya, tren pasca kebuntuan dalam pemikiran pembangunan menyoroti keragaman dan diferensiasi (Booth 1994b, Schuurman 1993).

Perhatian terhadap keragaman dan agensi menimbulkan ketegangan baru: lalu apa hubungan antara lokal dan global, antara internal dan eksternal, endogen

dan eksogen, antara kebijakan mikro dan makro? Pergeseran dari strukturalisme ke konstruktivisme dan dari struktur ke agensi mengacu pada pergeseran penekanan dan perspektif; yang satu tidak menggantikan yang lain tetapi melengkapinya. Perubahan struktural dan kebijakan makro jelas penting, seperti penyesuaian struktural dan Organisasi Perdagangan Dunia. Apa yang berubah adalah bahwa ini tidak lagi merupakan bidang tetapi dianggap hanya sebagai bagian dari bidang.

Banyak pemangku kepentingan secara aktif merundingkan mereka secara politis dan analitis dan merasa mereka dapat melakukan sesuatu terhadap mereka. Dampak dari aktor-aktor ini pada debat publik dan pembuatan kebijakan dapat diukur (misalnya Clarke 1998). Ini merupakan langkah menuju demokratisasi politik pembangunan. Konstruktivisme, dalam pengertian ini, adalah ekspresi metodologis dari transformasi politik. Perspektif ini menawarkan satu sudut pada tren saat ini dalam studi pembangunan. Tren saat ini dibahas lebih lanjut dengan maksud untuk perubahan di bidang yang berbeda.

Dalam metodologi, yang menonjol adalah kecenderungan interdisipliner dan peran analisis wacana. Secara umum, pergantian budaya adalah signifikan. Dalam kebijakan pembangunan, tema yang signifikan adalah kerja sama lintas sektor, keragaman sosial, keamanan manusia, gender dan lingkungan, serta perubahan kerja sama pembangunan dan reformasi struktural.

1.3 Komunikasi Dalam Teori Pembangunan dan Perubahan Sosial

Istilah komunikasi pembangunan pertama kali dicetuskan pada tahun 1971 oleh Nora C. Quebral (Manyozo 2006). Quebral (1971) mendefinisikan lapangan sebagai "seni dan ilmu komunikasi manusia yang diterapkan pada transformasi cepat suatu negara dan massa rakyatnya dari kemiskinan ke keadaan pertumbuhan ekonomi yang dinamis yang memungkinkan kesetaraan sosial yang lebih besar dan pemerataan sosial yang lebih besar. pemenuhan potensi manusia".

Namun, Quebral (1988) mengakui bahwa istilah tersebut meminjam dari kontribusi yang dibuat oleh Alan Chalkley (1968) dan Juan Jamias (1975)

tentang jurnalisme pembangunan, dan karya Erskine Childers dan Mallica Vajrathon (1968) tentang komunikasi dukungan pembangunan. Erskine Childers memulai unit Komunikasi Dukungan Pembangunan pertama di UNDP di Bangkok pada 1960-an (lihat Fraser dan Restrepo-Estrada 1998, atau Balit & Acunzo untuk lebih jelasnya).

Sepanjang abad yang lalu, terdapat perbedaan pandangan dan perdebatan, baik di dunia profesional maupun akademis, definisi yang berbeda dari komunikasi pembangunan telah muncul.

Penulis menyajikan pilihan singkat:

1. Komunikasi Pembangunan adalah studi tentang perubahan sosial yang disebabkan oleh penerapan penelitian komunikasi, teori, dan teknologi untuk mewujudkan pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang partisipatif secara luas dalam suatu masyarakat, yang dimaksudkan untuk membawa kemajuan sosial dan material, termasuk kesetaraan yang lebih besar, kebebasan, dan kualitas berharga lainnya bagi sebagian besar orang melalui kontrol yang lebih besar atas lingkungan mereka. (Everet Rogers 1976)
2. Komunikasi untuk pembangunan adalah proses sosial, yang dirancang untuk mencari pemahaman bersama di antara semua peserta inisiatif pembangunan, menciptakan dasar untuk tindakan bersama. (FAO PBB 1984)
3. Penggunaan teknik, aktivitas, dan media komunikasi yang terencana memberi orang alat yang kuat baik untuk mengalami perubahan maupun untuk benar-benar membimbingnya. Pertukaran gagasan yang intensif di antara semua sektor masyarakat dapat mengarah pada keterlibatan yang lebih besar dari orang-orang dalam tujuan bersama. Ini adalah persyaratan mendasar untuk pembangunan yang tepat dan berkelanjutan. (Colin Fraser dan Jonathan Vilet 1994)
4. Komunikasi pembangunan melibatkan penciptaan mekanisme untuk memperluas akses publik terhadap informasi tentang reformasi; memperkuat kemampuan klien untuk mendengarkan konstituen mereka dan bernegosiasi dengan pemangku kepentingan; memberdayakan organisasi akar rumput untuk mencapai proses yang lebih partisipatif; dan melakukan kegiatan komunikasi yang

- didasarkan pada penelitian. (Bank Dunia, <http://sitresources.worldbank.org>, 2006)
5. “Komunikasi untuk Pembangunan adalah proses sosial berdasarkan dialog menggunakan berbagai alat dan metode. Ini juga tentang mencari perubahan pada tingkat yang berbeda termasuk mendengarkan, membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan dan keterampilan, membangun kebijakan, berdebat dan belajar untuk perubahan yang berkelanjutan dan bermakna. Ini bukan hubungan masyarakat atau komunikasi perusahaan” (penekanan ditambahkan) (<http://www.devcomm-congress.org/worldbank/macro/2.asp>).
Konsensus Roma disepakati di Kongres Dunia tentang Komunikasi untuk Pembangunan (Roma, 25–27 Oktober 2006)
 6. Definisi ini telah ditafsirkan dan diterapkan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang bekerja pada tingkat sosial dan geografis yang berbeda. Baik pada tingkat teori dan penelitian, serta pada tingkat pembuatan dan implementasi kebijakan dan perencanaan, perspektif yang berbeda telah dan masih ditawarkan. Mereka didasarkan pada asumsi ontologis dan epistemologi yang berbeda dan karena itu berasal dan berhubungan dengan pandangan dunia yang berbeda, perspektif disiplin, dan aplikasi metodologis dan berbasis kasus (Servaes 1999, 2008).
 7. Komunikasi, sebagai proses sosial, dibentuk dalam kerangka spasial dan temporal tertentu. Bagaimana orang berkomunikasi, di mana dan mengapa mereka berkomunikasi, dengan siapa mereka berkomunikasi, apa dan mengapa mereka berkomunikasi, merupakan fungsi dari proses sejarah. Komunikasi tidak lebih, dan tidak kurang, dari artikulasi hubungan sosial antara orang-orang. Akibatnya, perhatian dengan proses komunikasi memerlukan identifikasi jaringan hubungan sosial di mana proses komunikasi terjalin. Oleh karena itu, "definisi 'komunikasi' sepenuhnya tunduk pada kerangka teoritis yang akan ditempatkan pada interaksi sosial" (Thomas 1982: 80).

Beberapa perspektif tentang komunikasi untuk pembangunan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perspektif pertama dapat berupa komunikasi sebagai suatu proses, yang sering dilihat dalam metafora sebagai struktur masyarakat. Hal ini tidak terbatas pada media atau pesan tetapi interaksi mereka dalam jaringan hubungan sosial. Selain itu, penerimaan, evaluasi, dan penggunaan pesan media, dari sumber apa pun, sama pentingnya dengan alat produksi dan transmisinya.
2. Perspektif kedua adalah media komunikasi sebagai sistem campuran komunikasi massa dan saluran interpersonal, dengan dampak timbal balik dan penguatan. Dengan kata lain, massa atau media sosial tidak boleh dilihat secara terpisah dari saluran lain.

Kita dapat mengambil contoh dari perspektif di atas yaitu misalnya, Seseorang dapat, memeriksa peran dan manfaat radio versus internet untuk pembangunan dan demokrasi. Baik Internet maupun radio dicirikan oleh interaktivitasnya. Namun, jika, seperti yang diyakini banyak orang, akses yang lebih baik ke informasi, pendidikan, dan pengetahuan akan menjadi stimulan terbaik untuk pembangunan, potensi pengembangan utama Internet adalah sebagai titik akses ke infrastruktur pengetahuan global (Kurniullah, 2020).

Bahayanya, sekarang diakui secara luas, adalah bahwa akses ke pengetahuan semakin membutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang tidak dapat diakses oleh orang miskin dan dikendalikan oleh beberapa raksasa teknologi yang kuat. Oleh karena itu, kesenjangan digital bukan tentang teknologi, ini tentang kesenjangan yang semakin lebar antara negara maju dan berkembang dan yang kaya info dan miskin info.

Sementara manfaat yang ditawarkan oleh Internet banyak, ketergantungannya pada infrastruktur telekomunikasi berarti bahwa mereka hanya tersedia untuk beberapa orang. Radio jauh lebih meresap, mudah diakses, dan terjangkau. Memadukan keduanya bisa menjadi cara yang ideal untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dari internet memiliki jangkauan yang lebih luas. Perspektif lain dari komunikasi dalam proses pembangunan adalah dari perhatian lintas sektoral dan antar lembaga. Pandangan ini tidak terbatas pada informasi atau organisasi penyiaran dan kementerian tetapi meluas ke semua sektor, dan keberhasilannya dalam memengaruhi dan mempertahankan

pembangunan sangat bergantung pada kecukupan mekanisme untuk integrasi dan koordinasi.

Secara umum, Pembangunan atau Perubahan Sosial dapat digambarkan sebagai perubahan signifikan dari tindakan sosial terstruktur atau budaya dalam masyarakat, komunitas, atau konteks tertentu. Definisi luas seperti itu dapat ditentukan lebih lanjut berdasarkan sejumlah "dimensi" perubahan sosial: ruang (mikro, meso, makro), waktu (pendek, menengah, jangka panjang), kecepatan (lambat, bertahap, evolusioner). versus cepat, mendasar, revolusioner), arah (maju atau mundur), konten (sosiokultural, psikologis, sosiologis, organisasi, antropologis, ekonomi, dan sebagainya), dan dampak (damai versus kekerasan) (untuk lebih jelasnya, lihat Servaes 2011).

Keberlanjutan dan ketahanan saat ini berkaitan dengan bagaimana kita memahami proses perubahan sosial yang langgeng. Memang, meskipun tidak ada definisi formal tentang "keberlanjutan," hal itu tetap populer di berbagai wacana politik, sosial, dan ekonomi, terutama kelompok lingkungan sebagai ajakan untuk bertindak untuk meningkatkan kesadaran seputar menipisnya sumber daya alam yang terbatas saat ini. sumber daya (untuk ikhtisar terbaru, lihat Senaratne 2017; Servaes 2013, 2017).

Pembangunan Berkelanjutan dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan pengambilan keputusan sehingga memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap banyak masalah multidimensi yang dihadapi masyarakat. Yang diperlukan adalah kerangka evaluasi untuk mengategorikan program, proyek, kebijakan, dan/atau keputusan memiliki potensi keberlanjutan. Kata ini paling sering dikaitkan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini (sosial, ekonomi, lingkungan), tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan 1987).

Empat dimensi yang secara umum diakui sebagai "pilar" pembangunan berkelanjutan: ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, esensi dari keberlanjutan adalah untuk mengambil fitur kontekstual ekonomi, masyarakat, dan lingkungan ketidakpastian, berbagai nilai yang bersaing, dan ketidakpercayaan di antara berbagai kelompok kepentingan – sebagai hal yang diberikan dan terus merancang proses yang memandu kelompok terkait untuk mencari dan mengajukan pertanyaan yang tepat sebagai pendekatan pencegahan terhadap usaha yang disesalkan secara lingkungan dan sosial" (Flint 2007: IV).

Intinya, koherensi Komunikasi untuk Pembangunan dan Perubahan Sosial diekspresikan dalam premis-premis dasar yang berbeda. Dalam semua keragamannya, seperti dalam teori, metode, media, dan wilayah, ia dicirikan oleh sejumlah nilai-nilai umum yang mendasari dan titik tolak.

Premis, nilai, dan titik awal ini adalah (Servaes 2007):

1. Penggunaan sudut pandang budayawan
Melalui sudut pandang seperti itu, perhatian khusus diberikan pada komunikasi dalam proses perubahan sosial. Dengan menempatkan budaya secara sentral dari perspektif pengguna, disiplin ilmu sosial lainnya dapat secara signifikan berkontribusi pada bidang Komunikasi untuk Pembangunan dan Perubahan Sosial.
2. Penggunaan perspektif interpretatif
Partisipasi, dialog dan visi aktif manusia sebagai penafsir lingkungan mereka adalah yang paling penting. Nilai yang sangat diperhatikan adalah menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap keunikan situasi dan identitas tertentu dalam lingkungan perubahan sosial.
3. Penggunaan metode dan teori terintegrasi
Di bidang Komunikasi untuk Pembangunan dan Perubahan Sosial, dipandang penting bahwa metode yang dipilih harus dikaitkan dengan perspektif teoritis yang digunakan. Ini menyiratkan bahwa keterbukaan, keragaman, dan fleksibilitas dalam metode dan teknik dihargai. Dalam praktiknya umumnya berarti triangulasi dan preferensi untuk metode kualitatif. Ini tidak berarti, bagaimanapun, bahwa metode kuantitatif dikecualikan, dan memang penekanan ditempatkan pada metodologi ilmiah berbasis bukti.
4. Untuk menunjukkan saling pengertian dan mementingkan pengajaran, pelatihan, dan penelitian antar budaya formal dan informal.
5. Toleransi, peningkatan kesadaran, penerimaan, dan rasa hormat hanya dapat dicapai ketika anggota dari budaya yang berbeda tidak hanya mendengar tetapi juga memahami satu sama lain. Saling pengertian ini merupakan syarat bagi pembangunan dan perubahan sosial. Untuk mencegah segala bentuk miskomunikasi, kesadaran

antarbudaya, peningkatan kapasitas, dan dialog dianggap sangat penting.

Oleh karena itu, definisi Komunikasi untuk Pembangunan dan Perubahan Sosial yaitu menempatkan Komunikasi sebagai media untuk pembangunan dan perubahan sosial dalam pemeliharaan pengetahuan yang bertujuan untuk menciptakan konsensus untuk tindakan yang memperhitungkan kepentingan, kebutuhan dan kapasitas semua pihak.

Dengan demikian, Komunikasi untuk Pembangunan dan Perubahan Sosial adalah proses sosial, yang memiliki tujuan akhir pembangunan/perubahan berkelanjutan pada tingkat masyarakat yang berbeda. Selain itu media komunikasi dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi adalah alat penting dalam mencapai perubahan sosial tetapi penggunaannya bukanlah tujuan itu sendiri. Komunikasi interpersonal, media tradisional dan kelompok juga harus memainkan peran mendasar.

Bab 2

Permasalahan Pembangunan Kependudukan, Kependidikan, dan Ketenagakerjaan

2.1 Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang tidak akan pernah puas dan terus melakukan perubahan-perubahan dalam roda kehidupan. Perubahan-perubahan yang dilakukan di berbagai aspek kehidupan tersebut, terutama perubahan dalam aspek ekonomi dan sosial yang mengarah pada perbaikan dapat disebut sebagai pembangunan. Adam Smith mengungkapkan bahwa pembangunan adalah sebuah proses pendapatan yang diperoleh dari dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan, Michael Todaro mengungkapkan bahwa pembangunan memiliki arti sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sukirno, 2011).

Dengan demikian, pembangunan adalah proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial, ekonomi, lingkungan dan sebagainya ke arah yang lebih baik lagi. Proses pembangunan sering kali terkendala pada masalah kependudukan, kependidikan dan ketenagakerjaan. Berikut akan diuraikan permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut.

2.2 Permasalahan Kependudukan

Permasalahan kependudukan adalah berbagai masalah yang menghambat proses pembangunan berkaitan dengan kondisi penduduk atau dalam lingkungan sosial di suatu wilayah. Selain permasalahan kuantitas, permasalahan seperti kualitas penduduk, persebaran penduduk yang tidak merata serta masih kurang lengkapnya sumber data kependudukan masih menjadi fokus pemerintah dalam upaya menyejahterakan penduduknya (Falikhah, 2013).

Permasalahan kependudukan Indonesia sangatlah kompleks, mulai dari jumlah populasi yang tinggi, rendahnya sumber daya manusia (Saputra, 2017). Pertumbuhan penduduk saat ini semakin meningkat dan itu menjadi isu yang sangat populer dan mencemaskan bagi negara-negara di dunia (Mandas, 2020). Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa permasalahan kependudukan saat ini adalah kurangnya kepedulian terhadap program KB, laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pengangguran dan timbulnya pengangguran dan permasalahan lingkungan yaitu semakin banyak penduduk berarti semakin banyak areal persawahan dan hutan yang berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk (Thomas, 2017).

Ada berbagai masalah kependudukan yang sering kali menjadi penghambat dalam proses pembangunan, di antaranya sebagai berikut:

2.2.1 Persebaran Penduduk yang Tidak Merata

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia yang memiliki lima pulau besar yaitu pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Kondisi geografis negara Indonesia ini ternyata memberikan permasalahan pada aspek kependudukan. Wilayah Indonesia yang cukup luas ternyata tidak sebanding dengan pemerataan penduduknya. Hal ini terlihat pada kondisi di mana terdapat daerah yang sangat padat, namun terdapat juga daerah yang

sangat jarang penduduknya. Pertambahan jumlah penduduk yang cukup signifikan di setiap tahunnya juga terjadi di wilayah Jakarta sebagai ibukota. Kondisi kependudukan ini tidak sebanding dengan kota-kota di wilayah timur yang jumlah penduduknya masih sangat sedikit di beberapa wilayah.

Bahkan sekitar 60 % penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 6,9 % dari luas wilayah daratan Indonesia. Ketidakmerataan penduduk ini akan menghambat proses pembangunan dan memicu terjadinya pemusatan pembangunan hanya di satu wilayah saja. Dengan kata lain terdapat kesenjangan dalam pembangunan disebabkan ada wilayah yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk di wilayah lainnya. Berikut data jumlah penduduk di setiap provinsi di Indonesia:

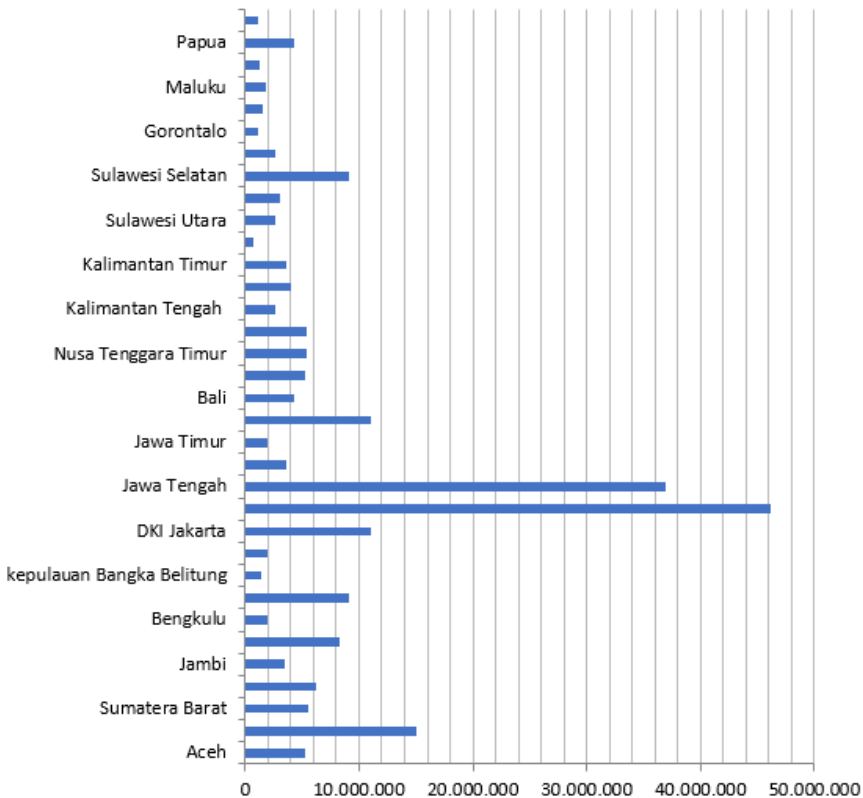
Tabel 2.1: Jumlah penduduk di Setiap Provinsi di Indonesia 2020

Provinsi	Jumlah Penduduk
Aceh	5.288.885
Sumatera Utara	15.032.170
Sumatera Barat	5.568.881
Riau	6.220.680
Jambi	3.497.833
Sumatera Selatan	8.342.101
Bengkulu	2.014.369
Lampung	9.062.766
kepulauan Bangka Belitung	1.406.583
Kepulauan Riau	1.983.597
DKI Jakarta	11.100.929
Jawa Barat	46.092.205
Jawa Tengah	36.896.752
Daerah Istimewa Yogyakarta	3.668.304
Jawa Timur	1.983.597
Baten	11.042.523
Bali	4.261.909
Nusa Tenggara Barat	5.321.552
Nusa Tenggara Timur	5.452.967
Kalimantan Barat	5.457.352
Kalimantan Tengah	2.602.119
Kalimantan Selatan	4.070.320
Kalimantan Timur	3.661.161
Kalimantan Utara	663.696
Sulawesi Utara	2.659.987
Sulawesi Tengah	2.987.711
Sulawesi Selatan	9.175.971
Sulawesi Tenggara	2.649.845

Gorontalo	1.189.685
Sulawesi Barat	1.563.289
Maluku	1.864.335
Maluku Utara	1.318.178
Papua	4.354.468
Papua Barat	1.146.666

Data di atas menunjukkan bagaimana besaran jumlah penduduk yang menempati masing-masing provinsi di Indonesia. Dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Berikut grafik yang memudahkan informasi dari data pada tabel di atas.



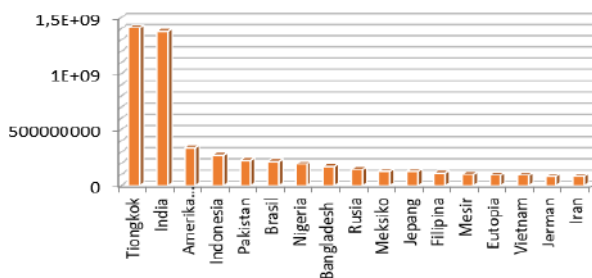
Gambar 2.1: Jumlah Penduduk di Setiap Provinsi di Indonesia 2020

2.2.2 Jumlah Penduduk yang Besar

Selain sebagai negara kepulauan terbesar, Negara Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Keadaan ini tentu menjadi sebuah tantangan yang cukup besar bagi proses pembangunan di Indonesia untuk menjamin kesejahteraan penduduk dalam kondisi ekonomi sebagai yang masih berstatus negara berkembang. Informasi tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.2: Tingkat Populasi Terbesar di Dunia 2021

No.	Negara	Populasi (Jiwa)
1	Tiongkok	1410290000
2	India	1378180000
3	Amerika Serikat	335930000
4	Indonesia	271349889
5	Pakistan	223907000
6	Brasil	214953000
7	Nigeria	193392517
8	Bangladesh	170808000
9	Rusia	146877088
10	Meksiko	126577691
11	Jepang	126420000
12	Filipina	112417700
13	Mesir	101872800
14	Eutopia	94352000
15	Vietnam	93700000



Gambar 2.2: Tingkat Populasi Terbesar di Dunia 2021

Data pada tabel dan grafik di atas menunjukkan fakta bahwa Indonesia berada dalam urutan ke-4 dengan populasi penduduk terbesar di dunia setelah Negara China, India dan Amerika Serikat pada tahun 2021. Dengan total penduduk berada di kisaran 270 juta jiwa.

2.2.3 Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi

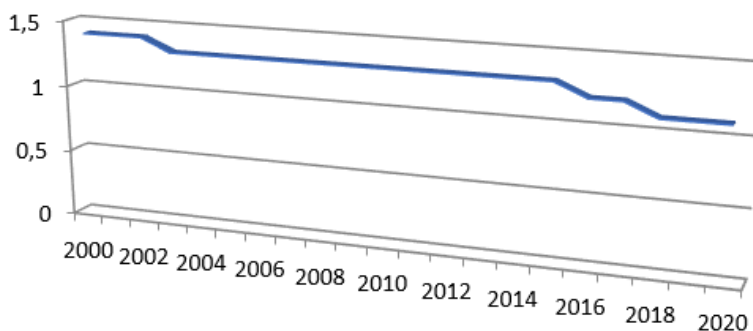
Jumlah penduduk Indonesia yang sudah cukup besar diprediksi akan terus bertambah karena pertumbuhan penduduk yang juga tergolong cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan penduduk Indonesia sejak tahun 2000 adalah sebesar 1,3% di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian. Pemerintah memang sudah berupaya mengatasi permasalahan pertumbuhan penduduk tersebut dengan menggalakkan Program Keluarga Berencana. Namun disisi lain Indonesia memiliki penduduk dengan usia produktif yang akan selalu bertambah untuk membantu menggerakkan pembangunan di Indonesia.

Berikut data pertumbuhan penduduk di Indonesia tersebut:

Tabel 2.3: Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Periode 2000-2020

Tahun	Pertumbuhan penduduk (%)
2000	1,4
2001	1,4
2002	1,4
2003	1,3
2004	1,3
2005	1,3
2006	1,3
2007	1,3
2008	1,3
2009	1,3
2010	1,3
2011	1,3
2012	1,3
2013	1,3
2014	1,3
2015	1,3
2016	1,2
2017	1,2
2018	1,1
2019	1,1
2020	1,1

Sumber: BPS.go.id



Gambar 2.3: Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Periode 2000-2020

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia sejak tahun 2000 cenderung menurun hingga tahun 2020. Dengan angka pertumbuhan pada tahun 2000 adalah 1,4% dan angka pertumbuhan di tahun 2020 adalah 1,2%. Hal ini menunjukkan bahwa selama lebih 20 tahun pertumbuhan penduduk hanya mampu ditekan sebesar 0,3%.

2.2.4 Kepadatan Penduduk

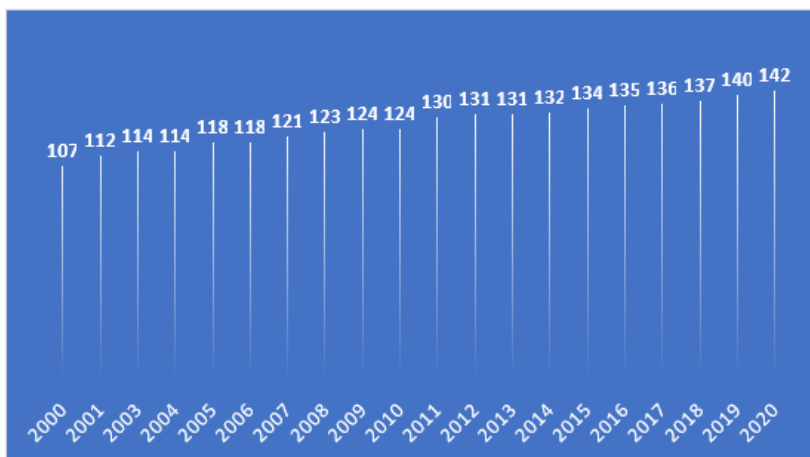
Ketidakmerataan penduduk di Indonesia telah menimbulkan masalah lain yaitu kepadatan penduduk. Beberapa kota besar di Indonesia memiliki angka kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Padatnya penduduk di satu wilayah ini akan menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, kriminalitas, pemukiman kumuh dan lainnya. Berikut data kepadatan penduduk di Indonesia:

Tabel 2.4: Kepadatan Penduduk di Indonesia Periode 2000-2020

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2000	107
2001	112
2003	114
2004	114
2005	118
2006	118
2007	121
2008	123

2009	124
2010	124
2011	130
2012	131
2013	131
2014	132
2015	134
2016	135
2017	136
2018	137
2019	140
2020	142

Sumber: BPS.go.id



Gambar 2.4: Kepadatan Penduduk di Indonesia Periode 2000-2020

2.3 Permasalahan Kependidikan

Permasalahan pendidikan juga banyak menghambat proses pembangunan di Indonesia. Mayoritas penduduk di Indonesia tidak dapat mengesampingkan pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan dan dalam tiga tahun mendatang, pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu,

relevansi, dan daya saing; (c) penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan (Suryana, 2020). Persoalan-persoalan dalam pendidikan merupakan awal dari permasalahan pendidikan yang menuntut sebuah jawaban, karena masalah pendidikan adalah sangat penting (Ilham, 2020).

Berbagai permasalahan dalam pembangunan pendidikan terutama pemerataan pendidikan termasuk penyediaan fasilitas atau sarana dan prasarana penunjang kelangsungan proses pendidikan bagi setiap lapisan masyarakat masih sangat kompleks dan sulit diatasi. pelaksanaan pendidikan yang merata adalah program pendidikan yang menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dan perluasan pendidikan atau biasa juga disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak boleh dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama maupun letak lokasi geografis.

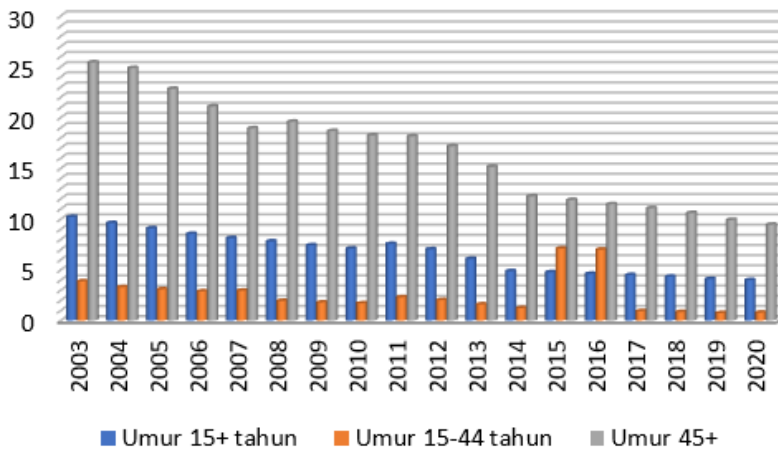
Salah faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam proses pembelajaran yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu adanya peningkatan secara terus-menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia masih belum memadai. Selain itu, dari sisi tenaga pendidik juga masih menemui kendala. Faktanya adalah bahwa dalam pelaksanaan pendidikan sering kali mendapat kekurangan jumlah guru, terutama guru-guru terampil yang bersertifikasi.

Tidak berhenti pada permasalahan tersebut sering kali penyebaran jumlah tenaga pendidik juga tidak merata sehingga terjadi kesenjangan dalam kelangsungan proses pelaksanaan pendidikan. Selain itu banyak pula masyarakat yang masih menilai bahwa pendidikan di Indonesia tergolong cukup mahal. Baik itu biaya sekolah dasar hingga bangku kuliah banyak keluhan mahalnya pendidikan di Indonesia. Biaya pendidikan ini tidak murah karena penghasilan masyarakat yang tergolong rendah. Berbagai permasalahan tersebut telah memicu tingginya volume masyarakat yang tidak mampu mengesampingkan pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan, sebagaimana tergambar dalam data berikut:

Tabel 2.5: Tingkat Buta Huruf di Indonesia (%)

Tahun	Umur 15+	Umur 15-44	Umur 45+
2003	10,21	3,88	25,43
2004	9,62	3,30	24,87
2005	9,09	3,09	22,83
2006	8,55	2,89	21,09
2007	8,13	2,96	18,94
2008	7,81	1,95	19,59
2009	7,42	1,80	18,68
2010	7,09	1,71	18,25
2011	7,56	2,31	18,15
2012	7,03	2,03	17,17
2013	6,08	1,61	15,15
2014	4,88	1,24	12,25
2015	4,78	7,10	11,89
2016	4,62	7,00	11,47
2017	4,50	0,94	11,08
2018	4,34	0,86	10,6
2019	4,10	0,76	9,92
2020	4,00	0,80	9,46

Sumber: BPS.go.id

**Gambar 2.5:** Tingkat Buta Huruf di Indonesia (%)

2.4 Permasalahan Ketenagakerjaan

Masalah pengangguran telah menjadi isu perbincangan yang begitu kompleks khususnya di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi serta pertambahan penduduk yang terus meningkat (Hapsari dan Jalunggono, 2021).

Permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, antara lain:

1. rendahnya kesempatan dan lapangan kerja;
2. rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
3. tingginya pengangguran terbuka; dan
4. masih kurangnya sosialisasi peraturan perlindungan tenaga kerja (Wicaksono dan Kharisma, 2020).

Pengangguran dapat terjadi karena jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia dan masih adanya anak yang putus sekolah sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan serta terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK karena krisis global. Masalah pengangguran perlu dikurangi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini (Wijiyanti dan Olde, 200).

Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Dengan mengacu pada permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran tersebut, maka perlu dilakukan pembahasan mengenai permasalahan yang menjadi penghambat dalam menciptakan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan pengangguran dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini (Soleh, 2017).

Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia adalah permasalahan klasik yang terus menampakkan dirinya mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu hingga saat ini permasalahan tersebut masih tetap berkisar seputar sempitnya

peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya sumber daya tenaga kerja, upah murah dan jaminan sosial yang seadanya, berikut kemudian adalah demonstrasi dan pemogokan (Kahfi, 2018). Masalah pengangguran perlu dikurangi dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara ini (Suhandi et al, 2021).

Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya, hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu kemakmuran yang dicapai masyarakat pun akan lebih rendah. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru, dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.

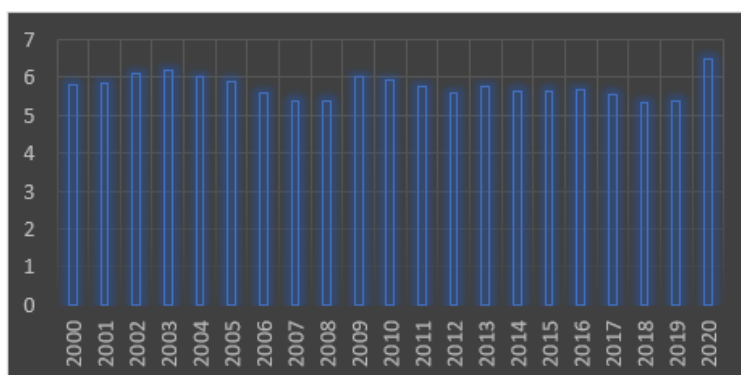
Berikut data pengangguran di Indonesia:

Tabel 2.6: Pengangguran di Indonesia periode 2000-2020

Tahun	Pengangguran (% angkatan kerja)
2000	6
2001	5,87
2002	6,111
2003	6,201
2004	6,027
2005	5,907
2006	5,602
2007	5,362
2008	5,377
2009	6,01
2010	5,92
2011	5,784
2012	5,578
2013	5,767

2014	5,627
2015	5,631
2016	5,664
2017	5,551
2018	5,327
2019	5,373
2020	6,471

Sumber: Worldbank.org



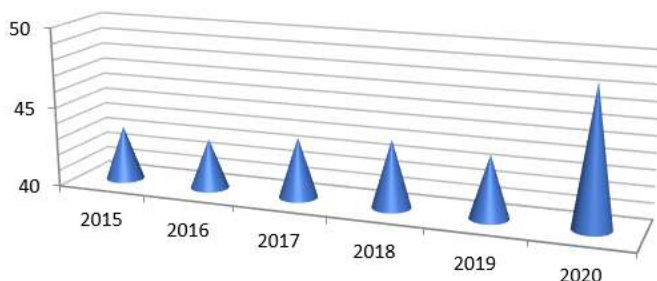
Gambar 2.6: Pengangguran di Indonesia Periode 2000-2020

Ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka pengangguran yakni lapangan kerja yang rendah. Akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran tersebut. Sebagaimana proporsi lapangan kerja informal sektor non pertanian berikut:

Tabel 2.7: Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian

Tahun	Proporsi Lapangan Kerja
2015	43,37
2016	43,09
2017	43,75
2018	44,19
2019	43,84
2020	48,57

Sumber: BPS.go.id



Gambar 2.7: Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian

Selain itu, kualitas tenaga kerja yang rendah juga turut menjadi faktor pendorong peningkatan angka pengangguran. Tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi.

Pembangunan adalah proses perubahan yang meliputi seluruh sistem sosial, ekonomi, lingkungan dan sebagainya ke arah yang lebih baik lagi. Proses pembangunan sering kali terkendala pada masalah kependudukan, kependidikan dan ketenagakerjaan. Permasalahan kependudukan adalah berbagai masalah yang menghambat pembangunan berkaitan dengan kondisi penduduk atau dalam lingkungan sosial di suatu wilayah.

Ada berbagai masalah kependudukan yang sering kali menjadi penghambat dalam proses pembangunan, seperti persebaran penduduk yang tidak merata, jumlah penduduk yang besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kepadatan penduduk. Permasalahan pendidikan juga banyak menghambat proses pembangunan di Indonesia. Berbagai masalah pembangunan pendidikan di Indonesia seperti permasalahan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, ketidakmerataan jumlah tenaga pendidik hingga pada biaya sekolah yang masih dianggap mahal telah memicu tingginya volume masyarakat yang tidak mampu mengecap pendidikan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Demikian pula halnya masalah pada ketenagakerjaan yang juga akan berdampak buruk pada perekonomian. Permasalahan tersebut di antaranya sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya sumber daya tenaga kerja, serta kesejahteraan pekerja atau jaminan sosial yang seadanya.

Bab 3

Permasalahan Budaya Penghambat Pembangunan

3.1 Pendahuluan

Setiap suku bangsa di dunia ini terikat akan budaya sendiri sebagai ciri atau identitas dalam melakukan interaksi sosial di antara sesama anggota, atau dengan luar anggota secara terus menerus. Barker dan Jane (2021) mengatakan bahwa budaya adalah “seni” sekaligus nilai-nilai, norma-norma, dan barang-barang simbolik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun budaya memberi kajian terhadap tradisi dan reproduksi sosial, budaya juga adalah tentang kreativitas dan perubahan. Budaya juga dapat diamati dari segi zamannya yaitu budaya tradisional dan budaya modern, budaya desa dan budaya kota.

Kita lihat saja bahwa budaya tradisional tidak lagi menjadi lambang status sosial, seperti keturunan ningrat, raja, namun era modern ini bahwa siapa saja yang mampu mengangkat dirinya secara ekonomis, sosial, dan intelektual dapat menjadi bagian dari budaya tinggi (Kuntowijoyo, 2006). Kebudayaan merupakan unsur penting dalam proses pembangunan atau keberlanjutan suatu bangsa, dalam membentuk watak dan kepribadiannya yang lebih serasi dengan tantangan zamannya.

Dalam perspektif kebudayaan bahwa pembangunan adalah usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik. Agar hidup lebih serasi perlu diciptakan lingkungan yang serasi, agar hidup nikmat perlu fasilitas. Dengan demikian pembangunan itu merupakan intervensi manusia terhadap alam lingkungannya, baik lingkungan alam fisik, maupun lingkungan sosial budaya dalam membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat dan lingkungannya. Seiring dengan proses perkembangan dunia dalam dinamika masyarakat, terjadi perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang sudah ada. Terjadilah pergeseran sistem nilai budaya yang membawa perubahan dalam hubungan interaksi inter dan antar personal.

Berbicara tentang permasalahan budaya yang menghambat pembangunan tidak terlepas dari konsep dan parameter terhadap kebudayaan, pembangunan, dan juga mental dan karakter suatu bangsa. Budaya bersifat dinamis seiring dengan terjadinya perubahan itu sendiri di dalam masyarakat pendukungnya. Mengamati adanya unsur budaya yang menghambat pembangunan dapat dikaji juga berdasarkan parameter pembangunan itu sendiri.

Pandangan ilmuwan Barat dalam mengukur pembangunan yang dikonsepsikan kepada development, atau pertumbuhan. Secara sederhana Rogers (1985) berpendapat bahwa pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pembangunan merupakan proses perubahan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, yang pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh kondisi fisik dan non fisik dalam masyarakat sehingga akselerasi pembangunan pada setiap negara berbeda-beda. Pembangunan pada suatu negara yang luas dipengaruhi banyak faktor termasuk sumber daya manusia, dan budaya yang mendukungnya. Setiap suku bangsa dalam berinteraksi dan hidup bermasyarakat terikat dengan budaya mereka sendiri.

3.2 Kebudayaan

Para ilmuwan sosial mendefinisikan kebudayaan sebagai warisan sosial yang bersifat mental atau non fisik, yang meliputi sistem nilai. Kebudayaan merupakan sistem ide pengetahuan, dan acuan bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Kebudayaan juga adalah cara berpikir, cara merasa, cara meyakini, dan cara menganggap (Wijayanto dan Zachrie, 2009). Budaya memberi

kerangka pikir manusia. sesuatu dapat dipersepsikan salah atau benar tergantung dari sudut pandang yang dipergunakan dan sudut pandang sangat dipengaruhi oleh budaya. Budaya secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, yang artinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan budaya sebagai pikiran, akal budi atau adat istiadat. Dengan demikian pengertian budaya adalah sebuah perilaku yang didasarkan pada unsur kebaikan, yakni berstandar pada akal budi.

Kebudayaan memiliki unsur-unsur universal yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di dunia ini. Unsur kebudayaan tersebut setidaknya ada tujuh, yaitu:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan
3. Sistem pengetahuan
4. Bahasa
5. Kesenian
6. Sistem mata pencaharian hidup
7. Sistem teknologi dan peralatan (Koentjaraningrat, 2015).

Walaupun pembagian dalam tujuh unsur tersebut, namun masih dapat lagi dipecah ke dalam sub-sub unsurnya. Hal demikian menggambarkan unsur-unsur mana saja yang paling sukar berubah atau terkena pengaruh kebudayaan lain, dan unsur mana yang paling mudah berubah atau diganti dengan unsur serupa dari kebudayaan lain. Bila diamati secara berurutan dari 7 (tujuh) unsur tersebut, seperti unsur “Sistem religi dan upacara keagamaan, serta sub unsurnya” lebih lambat berubah bila dibandingkan dengan suatu teknologi, atau peralatan bercocok tanam. Kemudian dapat diamati juga bahwa “hukum waris” merupakan hal yang paling sukar berubah jika dibandingkan dengan sub-sub arsitektur atau tempat pemujaan.

Kebudayaan merupakan keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk

memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat (Koencaraningrat, 2009).

Sistem nilai budaya ini telah melekat dengan kuatnya dalam jiwa setiap anggota masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu yang singkat. Sistem budaya ini menyangkut masalah-masalah pokok bagi kehidupan kelompok pendukungnya, dan abstraksi yang tidak sama untuk setiap kelompok masyarakat. Mungkin saja nilai-nilai itu dapat berbeda atau bahkan bertentangan, hanya saja orientasi nilai budayanya lebih universal.

Sistem nilai budaya dalam masyarakat di mana pun di dunia ini, secara universal menyangkut lima masalah pokok kehidupan manusia, yaitu:

1. Hakikat hidup manusia, di mana setiap kebudayaan berbeda secara ekstrem. Ada yang berusaha untuk memadamkan hidup, dengan pola-pola kelakuan tertentu menganggap hidup sebagai sesuatu hal yang baik.
2. Hakikat karya manusia, di mana manusia pada hakikatnya beraneka, di antaranya ada yang beranggapan bahwa karya bertujuan untuk hidup, memberikan kedudukan atau kehormatan, dan merupakan gerak hidup untuk menambah karya lagi.
3. Hakikat waktu untuk setiap kebudayaan berbeda. Ada yang berpandangan mementingkan orientasi masa lampau, ada pula yang berpandangan untuk masa kini atau yang akan datang.
4. Hakikat alam manusia, di mana kebudayaan yang menganggap manusia harus mengeksploitasi alam atau memanfaatkan alam semaksimal mungkin, ada pula kebudayaan yang beranggapan bahwa manusia harus harmonis dengan alam dan manusia harus menyerah kepada alam.
5. Hakikat hubungan manusia, di mana hal ini ada yang mementingkan hubungan manusia dengan manusia, baik secara horizontal maupun secara vertikal, secara individu atau dengan kekuatan diri sendiri.

Secara umum ada tiga pandangan dasar tentang makna hidup, yaitu: (1) hidup untuk bekerja, (2) hidup untuk beramal, berbakti, dan (3) hidup untuk bersenang-senang. Dalam hal kerja memiliki makna yaitu: (1) untuk mencari nafkah, (2) untuk mempertahankan hidup, (3) untuk kehormatan, (4) untuk kepuasan dan kesenangan, dan (5) untuk amal ibadah.

Kebudayaan bersifat dinamis dan cenderung berubah. Perubahan dapat terjadi disebabkan: (1) Sebab yang berasal dari masyarakat dan (2) disebabkan lingkungannya sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi penduduk.

4.3 Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan yang dimaksud adalah terutama yang berkaitan dengan material, sehingga sering kali pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi (Budiman, 1995).

Pembangunan merupakan suatu proses, karena itu dapat dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (Subandi 2014). Pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat independen, akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir. Banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan penahapan tersebut seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Pembangunan yang sebenarnya meliputi dua unsur pokok yaitu masalah materi yang mau dihasilkan dan dikontribusikan serta masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif yaitu menjadi manusia pembangun. Tuntutan akan ketrampilan manusia sebagai pelaku pembangunan, dan yang merasakan pembangunan mutlak menjadi sasaran. Manusia dapat dilihat sebagai masalah yang berhubungan dengan teknis dalam peningkatan keterampilan dalam menunjang pembangunan.

Proses pembangunan dan dampaknya adalah bagaimana menciptakan kondisi lingkungan, baik lingkungan politik maupun lingkungan budaya yang mendorong lahirnya manusia kreatif. Pembangunan memerlukan suasana yang kondusif, aman dan terkendali sehingga melahirkan manusia kreatif. Pembangunan pada akhirnya juga harus ditujukan pada kesejahteraan dan kebahagiaan pembangunan manusia. Manusia yang di bangun adalah manusia yang kreatif. Untuk dapat kreatif manusia tersebut harus merasa bahagia, aman, dan bebas dari rasa takut.

Pembangunan yang berhasil adalah jika dalam suatu masyarakat atau negara itu terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan terjadi secara berkesinambungan, dalam berkesinambungan tidak terjadi kerusakan sosial, dan tidak terjadi kerusakan alam. Dengan demikian bahwa konsep pembangunan sangat kompleks, sebab tidak hanya terbatas pada masalah pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga meliputi masalah sosial dan lingkungan (Budiman, 1995).

Pembangunan yang betul adalah yang menjadikan manusia selaku awal dan akhir kegiatannya. Yang dibangun bukanlah permukiman, melainkan manusia yang bermukim di situ. Pembangunan yang betul adalah bersifat nasional. Berarti membangun bangsa merdeka di mana “ bangsa” bukan berupa suatu fakta-fakta, melainkan dalam status yang permanen. Manusia, di mana pun, tidak tinggal di awang-awang, tetapi menetap di suatu ruang tertentu dari bumi.

Ruang adalah sekaligus suatu paksaan dan suatu kebebasan. Kita sedang berada dalam suatu momen historis, di mana kemampuan bertindak, individual atau kolektif mengenai ruang cenderung meningkat. Ruang menjadi modal sosial yang semakin penting dalam keseluruhan modal sosial yang diandalkan dalam proses pembangunan (Joesoef, 2018).

3.4 Permasalahan Budaya Yang Menghambat Pembangunan

Permasalahan budaya merupakan situasi dan kondisi budaya yang dihadapkan kepada pelaksanaan pembangunan manusia itu sendiri dalam menghadapi proses kehidupan manusia. dari berbagai aspek budaya manusia itu, baik secara lokal maupun nasional, dapat menghambat pembangunan. Budaya yang merupakan perilaku yang diduga dapat menghambat pembangunan pada saat ini di negara Indonesia di antaranya: budaya korupsi, budaya konsumerisme, budaya perilaku menyalahgunakan narkoba, budaya plagiat.

3.4.1 Budaya Korupsi

Budaya korupsi (Lubis, 1985) adalah perilaku buruk dan merupakan penghalang dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan

Transparency International merilis laporan bertajuk “Global Corruption Barometer-Asia” dan Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara korup di Asia. Perilaku korupsi sudah muncul di Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan dan berkembang pesat selama era Orde Baru hingga kini. Berbagai kasus korupsi di Indonesia terjadi tiap tahun. Walaupun badan anti korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk namun para pelakunya masih tetap melaksanakan korupsi.

Korupsi (Brasz, 1985) adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi, seharusnya apabila kita mempunyai atau berkedudukan jabatan yang tinggi digunakan untuk hal yang positif bukan malah menyalahgunakannya. Korupsi adalah suatu perbuatan yang sampai saat ini sulit untuk dihilangkan dari Indonesia dan sudah menjadi budaya dalam negeri ini.

Korupsi sangatlah merugikan semua orang yang seharusnya uang yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu tapi ini malah diambil sebagian uangnya untuk kebutuhan sepihak itu sesuatu hal yang tidak adil sebagai orang yang mempunyai akal dan pengetahuan, oleh sebab itu banyak dampak negatif dari korupsi.

Korupsi yang sudah membudaya adalah penghambat proses pembangunan. Memang korupsi dalam sejarah manusia bukanlah merupakan hal yang baru, namun berbarengan dengan kelahiran manusia itu. Ketika manusia itu hidup bermasyarakat, di sanalah awal mula terjadinya korupsi. Penguasaan atas suatu wilayah dan sumber daya alam oleh segelintir kalangan mendorong manusia untuk saling berebut dan menguasai. Berbagai taktik dan strategi pun dilaksanakan. Perebutan sumber daya alam oleh manusia dan politik di sinilah awal mula terjadinya ketidakadilan. Padahal kebutuhan untuk bertahan hidup kian menanjak, tapi kesempatan untuk memenuhinya semakin terbatas, maka sejak itu moralitas dikesampingkan. Orientasi hidup yang mengarah kepada keadilan berubah menjadi kehidupan yang saling menguasai dan mengeksploitasi. Dalam sejarah kita dapat menemukan banyak catatan yang terkait dengan kondisi tersebut (Wijayanto dan Zachrie, 2009).

Dalam pembangunan politik perilaku korupsi dalam elemen masyarakat menghambat proses demokratisasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Adanya aksi sogok menyogok dalam pelaksanaan Pemilu, Pilkada, Pileg, telah mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijakan pembangunan. Adanya perilaku korupsi dalam tubuh pengadilan telah menghambat proses dan pelaksanaan hukum, dan berakibat

kepada kurangnya tingkat kepercayaan rakyat kepada aparat penegak hukum, sehingga hukum rimba pun terjadi di kalangan masyarakat.

Merebaknya korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan menyebabkan timpangnya pelayanan sosial dan terhambatnya pelayanan pembangunan masyarakat. Perilaku korupsi dari aparat negara menimbulkan kemacetan, dalam segala lini sebab terjadi abai akan prosedur, abai sumber daya, jenjang karier pejabat bukan lagi berdasarkan atas kemampuan atau prestasi, tapi karena sogok. Korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi merosot.

Perilaku korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Pembangunan ekonomi terhambat sebab terjadi distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi dalam anggaran pemerintah. Pada dunia partikular perilaku korupsi meningkatkan ongkos produksi sebab menanggung kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos produksi dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan perniagaan”. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menunjuk jenis praktik seperti suap atau imbalan bagi persekongkolan (Priyono, 2018)

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi telah menyebabkan menurunnya kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Diakui atau tidak korupsi sudah membudaya atau dengan kata lain menjadi kebiasaan di tengah kehidupan bangsa Indonesia atau secara spesifik di dunia politik dan birokrasi di Indonesia dan yang berkaitan dengannya. Apabila ada sebagian pengamat, pakar, ilmuwan atau anggota masyarakat yang

menyangkal hal tersebut, barangkali hanya berusaha berprasangka baik terhadap bangsanya sendiri, selebihnya adalah menutup mata dan telinga terhadap realitas yang ada.

Korupsi sebagai faktor penghambat pembangunan dan kemajuan bangsa sudah saatnya dibedah dan diteliti dengan seksama, baik asal muasalnya atau pun penyebarannya. Bisa jadi sifat korupsi sudah membentuk gen tersendiri sehingga diperlukan juga pakar biologi molekuler untuk turut mengungkap dan mengetahui sifat korup dari akarnya.

Korupsi dikatakan sebagai bentuk kekerasan struktural, sebab korupsi yang dilakukan oleh para pejabat merupakan bentuk penyelewengan terhadap kekuasaan Negara, di mana korupsi lahir dari penggunaan otoritas kekuasaan untuk menindas, merampok dan menghisap uang rakyat demi kepentingan pribadi. Fungsi negara melayani kepentingan rakyatnya, berubah menjadi mesin pengisap rakyatnya sendiri. Relasi politik yang terbangun antara masyarakat dan negara melalui pemerintah sungguh tidak seimbang.

Aristokrasi baru munculnya dalam bangunan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Meluasnya kemiskinan, meningkatnya jumlah pengangguran, rendahnya upah buruh, menurunnya anggaran sosial akibat pencabutan subsidi (pendidikan, kesehatan, listrik, BBM, telepon dll), adalah masalah yang mengimpit dan beban hidup masyarakat semakin sulit.

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi, seperti perilaku konsumtif, ingin mempertahankan kekuasaan, gaji yang tidak mencukupi, lemahnya keimanan dan kejujuran, dan lain-lain. Bahkan dengan lemahnya perundang-undangan yang berlaku juga dapat memicu seseorang untuk melakukan korupsi. Mungkin saja mereka berpikir keuntungan yang mereka dapat dari korupsi itu lebih besar dari pada konsekuensi yang akan mereka terima di masa mendatang. Mereka mengambil kesempatan di balik lemahnya perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan aksi liciknya. Itulah yang menyebabkan mereka dengan beraninya melakukan korupsi.

Perilaku korupsi baru saja terjadi di lingkungan kementerian Nasional RI, yaitu penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 oleh Menteri Sosial RI, Juliari Peter Batubara. Beberapa oknum Kemensos melakukan korupsi, dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial ternyata masuk kantong pribadi untuk memperkaya diri. Oknum Kemensos melakukan korupsi sebesar Rp 7,10 triliun pada Bansos Sembako Jabodetabek.

Korupsi yang terjadi terus menerus seakan tak berujung ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Korupsi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, bisnis, meningkatkan kemiskinan, pelayanan publik tidak akan membaik, dan lain-lain. Bahkan dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.4.2 Budaya Konsumerisme.

Budaya konsumerisme adalah suatu kebiasaan yang dapat menghambat pembangunan. Konsumerisme di Indonesia adalah gaya hidup sebagai dampak dari perubahan zaman akibat dari pengaruh modernisasi dan globalisasi. Adanya gaya hidup konsumtif merupakan suatu fenomena gaya hidup yang lebih mengagungkan kepemilikan ekonomi yang melanda kehidupan sosial masyarakat, bukan saja di perkotaan, tetapi juga sudah meluas sampai ke pedesaan. Fenomena budaya konsumerisme sudah menjadi tren kehidupan para remaja yang merupakan generasi penerus.

Budaya konsumerisme sesungguhnya lebih banyak merugikan daripada memberi keuntungan terhadap pembangunan. Budaya perilaku konsumerisme menyebabkan orang menjadi boros, konsumtif, malas bekerja, serta kehilangan daya juang dan keinginan untuk maju dan berprestasi melemah, dan yang paling penting dalam kehidupannya adalah bersenang-senang. Terkadang bahwa hubungan kekerabatan dan persahabatan menjadi renggang dan kehilangan makna disebabkan meningkatnya perilaku konsumerisme.

Dalam konteks pembangunan bangsa, pola perilaku konsumerisme yang dianut oleh generasinya dapat memengaruhi kemajuan dan masa depan suatu bangsa. Misalnya saja jika sebuah negara dibangun oleh orang-orang yang selalu ingin memuaskan nafsu materialisnya dengan menghalalkan segala cara berarti akan banyak yang gelap mata. Aset negara akan cepat habis, kebebasan sebagai suatu bangsa pun akan terancam tanpa disadari generasinya. Perilaku demikian jika tidak diantisipasi dapat meluas menjadi perilaku yang menimbulkan masalah-masalah lebih besar dan akan membahayakan keberlangsungan negara.

Munculnya generasi yang kehilangan makna kehidupan menjadi indikasi kemerosotan karakter anak bangsa. Fenomena demikian cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh kemajuan dan kejayaan dan menuju kehancuran sebuah bangsa besar. Beberapa negara di dunia telah mengalami kemunduran pembangunan akibat adanya perilaku konsumerisme. Lihat saja dalam sejarah

negara Perancis, pada masa pemerintahan Louis ke-14, dengan permaisuri Maria Antoniette, di mana kehidupannya sangat konsumerisme di istana negara. Pada akhirnya adalah kehancuran dengan terjadinya revolusi Perancis.

Di Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat dengan jumlah konsumsi yang cukup tinggi. Masyarakat Indonesia itu sendiri merupakan masyarakat yang tergolong dalam masyarakat modern sehingga mereka dapat menghabiskan kebanyakan waktu yang mereka miliki di pusat perbelanjaan. Mereka menikmati kehidupan yang mewah dan tergolong rakus dalam mengonsumsi komoditas sebagai alat penunjang gaya hidupnya. Gambaran dari pola konsumsi demikian menunjukkan bahwa orang cenderung mengonsumsi barang guna untuk mewakili identitas dan gaya hidup semata.

Budaya konsumerisme sudah sepatutnya dicegah perkembangannya, dengan berbagai metode, dan jangan sampai keterlaluhan. Karakter baik, yang ditandai dengan nilai-nilai moral yang kuat sangat diperlukan oleh individu maupun keluarga dalam bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai moral anti konsumerisme, berakhlak mulia tidak serta merta ada dalam diri setiap orang. Dalam diri setiap orang harus ditumbuhkan dan diupayakan agar tertanam di hati dan menjadi bagian dari kepribadian seorang manusia. Ini jelas bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan seperti ini merupakan sebuah proyek besar yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan berkesinambungan serta mewajibkan peran dan keterlibatan semua pihak, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun institusi-institusi yang berkepentingan.

Salah satu cara mencegah budaya konsumtif adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk menyiapkan insan yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu dan membuat orang menjadi terampil agar dapat menghasilkan banyak uang dan menjadi sukses secara ekonomi. Pada hakikatnya pendidikan dimaksudkan untuk mendidik seorang manusia agar memiliki karakter yang kuat dan bersikap lebih baik. Seseorang yang berkarakter kuat dianggap mampu memahami nilai-nilai spiritual keagamaan, moral, dan akhlak mulia serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini menjadi pegangan yang menjiwai setiap kegiatan hidup yang dijalannya.

Mochtar Lubis berpendapat bahwa manusia sekarang itu tidak hemat, dia bukan "economic animal". Malahan dia pandai mengeluarkan terlebih dahulu penghasilan yang belum diterimanya, atau yang akan diterimanya, atau yang tidak pernah akan diterimanya. Dia cenderung boros. Dia senang berpakaian

bagus, memakai perhiasan, berpesta-pesta (Lubis, 2016). Apa yang dikemukakan di atas merupakan pendapat dan pengamatan seorang wartawan senior Indonesia yang telah mempunyai pengalaman luas terhadap masyarakat Indonesia.

3.4.3 Budaya Plagiat

Budaya plagiat juga telah menyebar di berbagai belahan negara ini, plagiat adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat seperti para siswa, para mahasiswa yang malas untuk menjawab persoalan yang dihadapinya. Sering terdengar dan juga terdapat dalam berita media massa di kalangan perguruan tinggi juga ditemukan istilah plagiat. Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan (Alwi, 2002).

Plagiat berarti tindakan mencuri ide atau karya intelektual orang lain dan menyatakan kepada publik sebagai karya ciptaannya atau miliknya. Jadi, dalam niatnya seorang plagiator memang dengan sengaja membuat sebuah ciptaan orang lain seolah-olah adalah ciptaannya, tentu dengan bermacam kepentingan.

Ada gejala saat ini bahwa menyontek sudah membudaya, menyontek sudah menjadi suatu hal yang biasa mulai dari anak sekolah dasar sampai seseorang yang bersekolah di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perbuatan menyontek di sekolah biasanya terjadi disebabkan soal yang diberikan oleh gurunya terlalu sulit untuk dia kerjakan sehingga membuat dia putus asa dan malas, dan mencari jalan pintas “plagiat”.

Pada zaman Teknologi Informasi ini, dan tersedianya Google sebagai sumber informasi telah membuat sangat mudah untuk mencari *contekan*. Apabila budaya menyontek ini dibiarkan terus menerus pada gilirannya melahirkan orang berkarakter pemalas. Dampak kemalasan tersebut adalah bodoh dan tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tidak dapat memperoleh pekerjaan, sehingga menganggur. Apabila sudah menganggur, tidak mempunyai uang untuk membiayai hidupnya kalau sudah begitu pasti akan ada banyak masalah baru yang timbul akibat dari pengangguran. Muncul perilaku patologi sosial; merampok, menjual uang palsu, pengedar narkoba, dan sebagainya. Maka sudah sepantasnya budaya menyontek tersebut dicegah perkembangannya.

Plagiarisme berdampak luas. Tentu saja dapat merugikan bagi penulis yang karyanya dijiplak atau dibajak dan kepada pelakunya di mana rendahnya kreativitas yang dia miliki dan mental yang buruk. Plagiat sangat membahayakan bagi perkembangan kalangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena seharusnya ilmu pengetahuan itu didasari kejujuran dan melalui proses yang benar. Suatu ilmu pengetahuan tidak dapat dicapai seketika melainkan melalui beberapa proses seperti adanya tahapan penelitian yang dilakukan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang dalam menghargai karya dan sekaligus jerih payah orang lain.

Plagiarisme merupakan kegiatan yang tidak baik dilakukan oleh kebanyakan orang. Di mana kegiatan ini dapat merugikan penulis dan pembaca lainnya. Plagiarisme sendiri telah menjadi kegiatan rutin yang biasanya dilakukan mahasiswa yang didukung adanya teknologi berupa *copy paste* dan sebagainya. Siswa, mahasiswa bahkan pekerja yang menjadi pelaku adanya plagiarisme.

Banyak perkara yang menjadi alasan seseorang melakukan plagiarisme salah satunya yaitu, malasnya seseorang melakukan sebuah pengamatan atas terjadinya sesuatu sehingga daripada bersusah payah akhirnya menjiplak karya milik orang lain serta malas berpikir juga menjadi alasan seseorang melakukan plagiarisme. Solusi yang ditawarkan agar seseorang tidak dikatakan sebagai plagiarisme adalah mencantumkan setiap sumber apabila mengambil referensi dari sumber lain.

3.4.4 Budaya Malas

Kata ‘malas’ termasuk dalam kata sifat (adjektif) yang berarti tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Seperti dalam kalimat “Orang yang malas itu lebih senang mengemis daripada bekerja”. Adapun kata ‘pemalas’ maknanya adalah orang yang suka malas atau yang bersifat malas (Alwi, 2002).

Salah satu budaya yang terdapat di Indonesia maupun di negara lainnya yaitu budaya malas, budaya malas itu sendiri adalah sebuah budaya di mana kebanyakan orang sulit sekali untuk bekerja keras demi suatu tujuan yang dicapai, atau mencari jalan yang mudah untuk melakukan sesuatu yang rumit. Keengganan seseorang untuk melakukan sesuatu yang seharusnya atau sebaiknya dia lakukan adalah pertanda malas. Malas juga ditunjukkan dengan menolak tugas, tidak disiplin, tidak tekun, sungkan, suka menunda sesuatu,

mengalihkan diri dari kewajiban. Rasa malas jika tidak dihindarkan akan merasuk jiwa dan dapat menurunkan kinerja.

Orang menjadi malas, juga disebabkan adanya kemajuan teknologi berupa alat canggih. Sebagai contoh, generasi muda saat ini sudah enggan atau malas mencuci pakaian sendiri dengan menggunakan tangan dan membilasnya dengan air sehingga keringat keluar dan badan sehat. Namun dengan ditemukannya mesin cuci pakaian, maka manusia menjadi malas, dan bergantung kepada mesin cuci. Contoh berikutnya adalah malas menghitung. Orang pada zaman sekarang pada umumnya tidak lagi berkeinginan untuk belajar menghitung sendiri tanpa alat, namun sudah menjadi malas. Hal ini disebabkan telah adanya mesin hitung, atau kalkulator, sehingga tidak dibutuhkan lagi belajar berhitung dengan kerja keras dan menghafalkan keterampilan menghitung tanpa alat kalkulator. Akibatnya orang banyak yang ketergantungan kepada alat mesin hitung, atau kalkulator.

Memang dari dua kasus diatas dapat kita lihat bahwa budaya malas itu disebabkan mental manusia yang ingin serba instan, tidak bekerja keras, serba cepat, dan tidak mau berusaha keras, sehingga dalam hal ini budaya malas ini dapat dikatakan sebagai penyakit mental. Sesuatu bangsa bila ingin maju adalah bila bangsa itu memiliki budaya mental ingin maju yang disebut virus mental, kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi. Seseorang yang sudah menemukan suatu pemikiran “melakukan sesuatu dengan baik” ataupun “melakukan sesuatu dengan lebih baik” daripada yang pernah dibuat sebelumnya.

Hubungan antara virus mental dengan pembangunan menjadi jelas dapat dilihat dalam budaya kesusastraan suatu bangsa secara cukup lama dikodifikasi untuk menemukan virus mentalnya. Misalnya bangsa yang memiliki keinginan untuk maju lebih cepat pertumbuhannya dengan yang lebih sedikit (McClelland, 1977).

Bab 4

Dampak Pembangunan Terhadap Peran Gender

4.1 Pendahuluan

Pembangunan adalah upaya perubahan sektor ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan secara sengaja melalui penerapan kebijakan serta strategi menuju tujuan yang diinginkan (Runa, 2012; Suradi, 2012) Di negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia, isu pembangun ekonomi adalah untuk mengentaskan kemiskinan menuju masyarakat sejahtera sebagai isu sentralnya (Jamaludin, 2016).

Indonesia sebagai negara berkembang berusaha untuk mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, hal ini sudah tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Ferina Ardhi Cahyani, 2020). Tetapi akan timbul persoalan apabila dalam implementasinya, terdapat aspek-aspek yang merasa dirugikan (Rosana, 2018).

Aspek yang merugikan salah satunya adalah ketidaksetaraan yang timbul antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender

dirasakan oleh perempuan sebagai bentuk ketidakadilan. Praktik diskriminasi karena budaya patriarki, yakni budaya di mana laki-laki lebih menguasai perempuan, menekan dan menindas, dan merendahkan kaum perempuan (Ferina Ardhi Cahyani, 2020).

Bentuk diskriminasi yang dialami perempuan bermacam macam, dapat terjadi pada lingkungan bekerja. Seperti kebijakan jam kerja perempuan, partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan formal secara umum lebih sedikit daripada laki-laki, menurunnya tingkat partisipasi perempuan juga dipengaruhi oleh kebijakan kehamilan dan kepengurusan anak (Sari, 2020).

4.2 Ketidakadilan Gender

Gender pertama kali disampaikan oleh ilmuwan dari kalangan sosial agar mampu menganalisis perbedaan kaum perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati. Gender dikaji dari sudut kodrat sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa dan Gender dikaji dari budaya masyarakat yang dipelajari dan perkenalkan sejak kecil. Pemahaman pada masyarakat tentang perbedaan ini perlu diketahui, karena sering sekali pemahaman di masyarakat menggabungkan yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender).

Perbedaan peran gender perlu ditata ulang bahwa pembagian peran dianggap telah menjadi bagian pada perempuan dan laki-laki. Hal ini untuk membangun gambaran gender yang tepat dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat, mulai dari perbedaan tanggung jawab, peran dan fungsi, dan bahkan ruang untuk laki-laki dan wanita. Masyarakat menganggap bahwa Perbedaan gender sesuai dengan persepsi mereka sendiri, sehingga persepsi itu merupakan sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah seperti ciri-ciri biologis tetap sifatnya yang ada pada perempuan dan laki-laki (Puspitawati, 2013). Karena apabila tidak ada pemahaman yang tepat, maka akan muncul persepsi yang salah, persepsi yang salah akan menimbulkan subordinasi, stereotip, beban ganda pada perempuan.

Sebagai bagian dari sumber daya manusia, perempuan menjadi setengah bagian penduduk di Indonesia, yang sayang sekali apabila tidak dioptimalkan perannya, hanya karena anggapan bahwa perempuan bukan pencari nafkah utama, maka perempuan menjadi kurang dipercaya untuk masuk ke dalam dunia kerja, padahal hasil penelitian Sajogyo menunjukkan bahwa perempuan

memberikan sumbangan yang besar pada ekonomi masyarakat maupun dalam kehidupan keluarga (Yuwono, 2013).

Pada perekonomian keluarga, perempuan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi selain juga bekerja di dalam rumah. Tetapi perempuan diberi gaji yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, hal ini karena terdapat anggapan bahwa perempuan hanya membantu perekonomian keluarga (Puspitasari, 2013) Pada sektor industri perempuan juga masih terjadi perbedaan peran. Meskipun banyak tenaga kerja perempuan yang memasuki sektor industri, masih sedikit yang menduduki posisi puncak.

Hal ini menjadi bukti masih adanya ketimpangan gender dalam Tata Kelola Perusahaan Terbuka di Indonesia. Eksekutif masih merupakan pekerjaan yang didominasi laki-laki (Sri Mangesti Rahayu, 2019). Pekerjaan perempuan dianggap rendah di beberapa negara karena persepsi tradisional tentang peran perempuan dalam masyarakat. Menurut data, dan norma sosial dan budaya yang berlaku, perempuan lebih berat memikul beban utama pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan tanggung jawab keluarga lainnya (Mussida and Patimo, 2020).

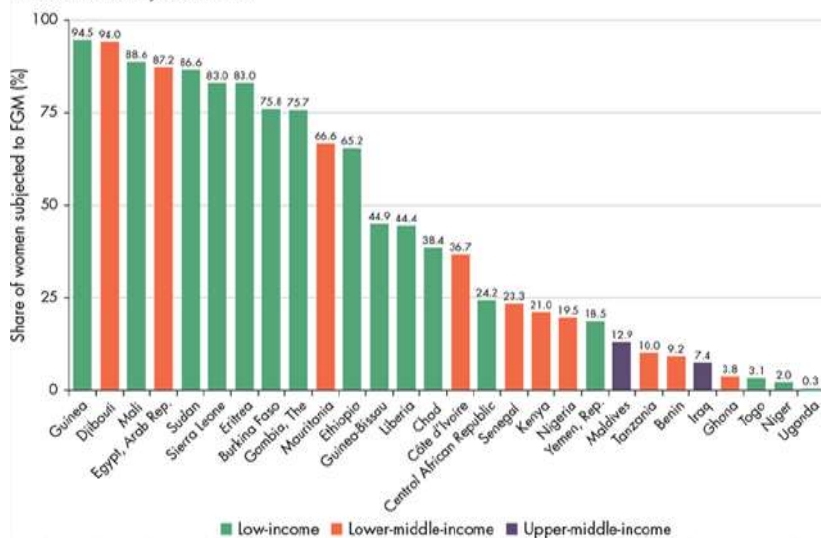
Walaupun pertumbuhan ekonomi luar biasa, di Prefektur China, semakin banyak perempuan yang kurang beruntung dibandingkan laki-laki dalam pendapatan di pasar tenaga kerja. Selain itu, dampak segregasi pekerjaan terhadap ketidaksetaraan pendapatan gender meningkat (He and Wu, 2017) dan ternyata kebijakan pemerintah dapat memengaruhi segregasi pekerjaan tersebut dengan demikian menciptakan ketidaksetaraan di antara kelompok-kelompok sosial di perkotaan (Zhang and Wu, 2017).

Tidak hanya di dunia kerja perempuan mengalami subordinasi, anggapan yang salah tentang gender juga menimbulkan diskriminasi, kekerasan pada perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja, tetapi hampir di seluruh dunia. Semakin miskin suatu negara semakin berat diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan. Pada sektor kesehatan perempuan juga menghadapi permasalahan karena perempuan sering kali memiliki kendali yang lemah pada pencegahan HIV. Perempuan kurang mampu menegosiasikan penggunaan kondom pada pasangannya, maka perempuan menjadi penderita HIV, maka upaya melindungi perempuan ditemukan pengembangan bioteknologi baru, seperti mikrobisida, hal ini membuat perempuan memiliki otonomi yang lebih besar pada pengambilan keputusan pencegahan HIV (Venables and Stadler, 2012).

Kekerasan pada perempuan menjadi masalah global. Adapun kekerasan yang diderita meliputi kekerasan fisik dan seksual. Salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. Satu dari tiga perempuan dan anak perempuan (35%) di seluruh dunia berusia antara 15 dan 49 tahun pernah mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau keduanya. Dengan menggunakan data dari Portal Data Gender, kurang lebih 200 juta anak-anak perempuan dan perempuan dewasa telah mengalami mutilasi alat kelamin perempuan, dan setidaknya di 11 negara, lebih dari setengah perempuan berusia antara 15-49 tahun telah menjalani mutilasi kelamin.

Mutilasi alat kelamin tertinggi terjadi di negara Guinea, merupakan negara dengan pendapatan rendah, Kecenderungan kekerasan pada perempuan dalam bentuk mutilasi genital dialami oleh perempuan di negara yang memiliki budaya bahwa anak perempuan menjelang dewasa perlu untuk di potong alat kelaminnya, dan negara tersebut memiliki pendapatan yang relatif rendah, semakin tinggi pendapatan masyarakatnya seperti di Negara Maldives dan Irak praktik ini semakin kecil, untuk lengkapnya disajikan pada gambar 4.1

Prevalence of female genital mutilation in women ages 15–49, by country income level, 2010–19



Gambar 4.1: Mutilasi Genital Pada Perempuan di Dunia (World Bank, 2021)

4.3 Pembangunan Berkelanjutan

Kesepakatan pembangunan global telah ditandatangani oleh 193 negara telah berkomitmen pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan pada 25 September 2015 PBB di New York. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs) yang sudah dilaksanakan terlampaui pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2015.

Perlu ada upaya untuk tetap menjaga momentum tersebut, maka perlu terus dipelihara selama dekade tertentu dan generasi telah berganti, hal ini karena kesetaraan gender berperan penting pada pelaksanaan setiap tujuan dalam SDGs (Murniningtyas and Endah, 2018) SDGs akan dicapai pada tahun 2030 memastikan kemakmuran bagi semua orang. Hak asasi manusia dan kesetaraan gender adalah prinsip inti dari agenda ini, yang mendasari upaya mencegah konflik, mengatasi perpecahan, dan mengatasi akar penyebab ketidaksetaraan, ketidakstabilan, dan ketidakadilan (UN Women, 2018), no one left behind (Panuluh and Fitri, 2016).

Mengingat pentingnya peran perempuan pada pembangunan maka Indonesia memandang perlu untuk ikut berpartisipasi pada kesepakatan global yakni pembangunan berkelanjutan atau SDGs, tujuan ke lima (5) adalah kesetaraan Gender, semua Perempuan dan Anak Perempuan berdaya, kesetaraan laki laki dan perempuan penting (Badan Pusat Statistik, 2014).

Komitmen negara Indonesia pada upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada Perpres No.59 tahun 2017, pemerintah RI ikut serta mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender adalah hak asasi fundamental yang akan mencegah terjadinya perlakuan yang diskriminatif. (Prasetyawati, 2019), tetapi, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai pada sektor hukum di tingkat nasional, perempuan masih mengalami perbedaan.

Komnas Perempuan menemukan masih terdapat 421 perda diskriminatif terhadap perempuan yang berlaku di berbagai provinsi, kabupaten dan/atau kota Pada 2016. Perempuan juga mengalami kekerasan domestik sebagai akibat dari kurangnya penegakan hukum pada saat penyelidikan, penuntutan dan pendakwaan terhadap pelaku KDRT. Tahun 2014 terdapat 68%

perempuan mengalami kasus KDRT atau 293.220 kasus yang dicatat oleh Komnas Perempuan (Prasetyawati, 2018).

4.4 Dampak Pembangunan Pada Peran Gender

Pembangunan yang berkeadilan diharapkan akan mampu meningkatkan peran perempuan. Peran perempuan pada semua sektor akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini karena terdapat optimalisasi sumber daya manusia pada pembangunan yang biasanya hanya disumbang secara optimal dari SDM laki laki saja.

Pada upaya mewujudkan kesetaraan gender maka negara, menjamin adanya hak setiap penduduk berkontribusi pada pembangunan. Memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi pada pembangunan, serta kontrol pada sumber daya alam yang ada. Jaminan hukum bagi pada warga negara, maka pada tahun 2000, ditetapkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini mengharuskan semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah harus untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) (Susiana, 2015).

PUG merupakan strategi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG), kebijakan dan program memperhatikan adanya pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan yang berbeda dengan laki-laki dimasukkan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program (Wiasti, 2017) Kalau PUG sebagai strategi untuk mencapai kesetaraan, maka selayaknya untuk mencermati permasalahan perempuan. Permasalahan perempuan lalu harus dimasukkan pada perencanaan pembangunan. Karena apabila masuk pada perencanaan pembangunan maka harus ada target untuk menyelesaikannya. PUG disebut juga disebut sebagai strategi dasar untuk memasukkan gender pada perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (Hermina, 2015).

Sejak tahun 2000, Pemerintah telah mendorong percepatan pelaksanaan PUG. Pada perkembangannya. Program Pembangunan Nasional pada tahun 2000 sd

2004 telah adopsi 19 program responsif gender pada program pembangunan, terjadi peningkatan program yang responsif gender dari tahun ke tahun. Untuk lebih memperkuat pelaksanaan PUG dalam pembangunan, maka dituangkan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, yakni pembangunan 20 tahun ke depan. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 tahap pertama, Salah satu prinsip yang harus di harus utamakan di seluruh program/kegiatan adalah gender (Bappenas et al., 2012).

Karena PUG adalah strategi pembangunan, maka perlu ada Perencanaan pembangunan, penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dari perencanaan pembangunan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Maka dicetuskan istilah Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG). Pelaksanaan PUG harus masuk pada proses penyusunan perencanaan dan penganggaran menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang disusun seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya telah responsif gender. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah perencanaan yang disusun dengan memperhatikan empat aspek, meliputi yakni: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara setara antara perempuan dan laki-laki (Theresia Marditama dkk, 2020).

Dalam surat edaran bersama Empat Menteri (Menteri Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) menyatakan bahwa dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar Pemerintah Daerah (PEMDA):

1. Lebih mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target yang ada pada SDGs, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) OPD.
2. Memilih atau menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG.
3. Menyerahkan dokumen PPRG dengan membawa bukti GBS (Gender Budget Statement) kepada BAKD (Badan Administrasi Keuangan

Daerah), dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Badan / Biro Pemberdayaan Perempuan, setiap Pemerintah daerah menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Rencana Kerja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Susiana, 2015)

Langkah di atas diharapkan untuk memastikan Pemerintah daerah (PEMDA) mewujudkan kesetaraan gender menjadi tanggung jawab semua Perangkat Daerah. Gender harus menjadi prioritas pembangunan yang ada di RPJMD, karena apabila telah masuk dalam RPJMD maka akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pemberdayaan masyarakat, perangkat daerah yang memiliki program pelayanan pada masyarakat, dan perangkat daerah yang tidak terlibat langsung pada pelayanan masyarakat tetapi memiliki karyawan yang harus dipastikan adanya kesetaraan di lingkungan perangkat daerah (OPD).

Setiap perangkat daerah (OPD) Menyusun GBS (Gender Budget Statement), hal ini karena GBS adalah manifestasi dari statement atau pernyataan Kepala OPD apabila anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan sesuai dengan TUPOKSI nya telah dianalisis gender. Alat Analisis gender menggunakan GAP atau (Gender Analysis Pathways). GAP memuat tentang Langkah langkah yang harus dilaksanakan untuk menganalisis gender.

Langkah ke 1 adalah menerapkan program pembangunan yang akan dilaksanakan OPD untuk dianalisis apakah program tersebut responsif gender. Dilanjutkan pada langkah ke 2 yaitu meneliti data terpilah sebagai data yang akan digunakan sebagai pembuka wawasan terkait gender, Langkah ke 3 adalah Langkah menganalisis kesenjangan gender yang meliputi aspek akses, kontrol, manfaat dan partisipasi laki-laki dan perempuan. Langkah ke 4 selanjutnya perlu juga dianalisis bagaimana kendala atau keterbatasan yang ada di dalam OPD, Langkah ke 5 adalah analisis lingkungan di luar OPD.

Langkah 2,3 dan 4 disebut dengan analisis kesenjangan gender, maka setelah menganalisis kesenjangan gender dilakukan reformulasi tujuan, karena bisa jadi tujuan awal yang belum responsif gender sebagai Langkah ke 6 dan dilakukan rencana aksi yang baru, hasil dari reformulasi tujuan sebagai Langkah ke 7. Selanjutnya dilakukan pengukuran hasil dengan mengamati atau membandingkan data basis sebagai Langkah ke 8 atau data awal dengan

data yang disusun Kembali hasil dari analisis gap gender, dan terakhir ditentukan Indikator Kinerja sebagai Langkah ke 9 (Theresia Marditama dkk, 2020).

Dampak pembangunan pada peran gender diharapkan akan meningkat. Adapun perempuan berperan di rumah dan di luar rumah. Di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga (RT) dan di luar rumah perempuan dapat berperan mencari nafkah dan melayani masyarakat atau aktif pada kegiatan sosial.

Dari data yang dipaparkan berikut ini, peran perempuan masih perlu untuk ditingkatkan karena pada peranan di sektor Pendidikan menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia memiliki ijazah mengalami perkembangan dari tahun 2017 yang 16,18 persen meningkat menjadi 17,08 persen. Dibandingkan dengan laki laki yang lebih rendah yakni 14,42 persen meningkat menjadi 15,01 persen.

Pada Kepemilikan ijazah Akademi/DIII/DIV/S1/S2/S3 menunjukkan progres yang baik yakni mengalami peningkatan 0,56 persen dari tahun 2017 ke tahun 2018, dibandingkan dengan laki laki meningkat 0,16 persen saja. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1: Ijazah /STTB Tertinggi Yang Dimiliki Penduduk Indonesia Dalam Persen (%)

Ijazah/STTB Yang Dimiliki	Laki-laki		Perempuan	
	2017	2018	2017	2018
Tidak Memiliki Ijazah	14,42	15,01	16,18	17,08
SD/MI	23,51	21,50	25,46	23,38
SMP/MTs	19,11	19,09	20,39	19,55
SMU/MA	23,75	25,43	21,25	22,97
SMK	8,43	8,00	5,78	5,52
DI/DII	0,53	0,55	0,72	0,71
Akademi/DIII/DIV/S1/S2/S3	10,25	10,41	10,23	10,79
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sumber: BPS RI - Susenas, 2009-2015

Peran perempuan pada lapangan kerja dapat dilihat pada data tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran pada kelompok umur 15-19 tahun perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada usia

produktif tenaga yakni umur 25-29 juga didapati fakta bahwa tenaga kerja perempuan yang menganggur lebih tinggi dibandingkan dengan laki laki. Kalau laki laki Pada tahun 2010 tingkat pengangguran 7,79 persen sedang perempuan 11,21 persen atau lebih tinggi tingkat pengangguran di perempuan sebesar 3,42 persen. Begitu juga pada kelompok umur lainnya. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini

Tabel 4.2: Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Indonesia Berumur 15 Tahun Ke Atas (Persen)

Kelompok Umur	Laki-Laki			Perempuan		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
15-19	27,52	28,50	26,08	28,60	30,06	26,52
20-24	17,19	13,67	15,08	17,82	15,49	15,48
25-29	7,79	6,79	6,97	11,21	8,37	7,77
30-34	3,81	3,18	3,52	6,87	5,32	5,33
35-39	2,32	1,84	1,90	5,11	4,22	3,81
40-44	1,90	2,01	1,88	4,00	3,65	3,04
45-49	1,69	1,69	2,02	3,48	2,86	2,46
50-54	1,56	2,29	2,40	3,09	2,46	2,74
55-59	1,67	2,50	1,80	3,90	3,03	1,15
60-64	1,43	3,24	0,65	5,68	4,06	0,47
Jumlah	6,15	5,90	5,75	8,74	7,62	6,77

Sumber: BPS-RI, Sakernas Agustus 2009, Sakernas Agustus 2010, Sakernas Agustus 2011, dan Sakernas Agustus 2012

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran yang bukan hanya pengeluaran beras tetapi juga pengeluaran untuk makanan lain dan pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya (Amru and Sihalo, 2020). Dari data yang diperoleh dari data BPS menunjukkan pengeluaran per kapita perempuan di seluruh provinsi di Indonesia terjadi *gap*. Dari mulai Provinsi Jakarta sampai dengan provinsi Jayapura.

Secara Nasional data menunjukkan bahwa laki laki pengeluarannya per tahun adalah 15.866.000 rupiah mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 15.463.000 rupiah hal ini bisa diakibatkan adanya pandemi covid 19, tetapi perempuan hanya mengeluarkan sebesar 9.244.000 rupiah turun menjadi

9.004.000 rupiah. Untuk dapat melihat data yang lengkap dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3: Pengeluaran per Kapita yang Menurut Jenis Kelamin (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

Provinsi	Laki-laki		Perempuan	
	2019	2020	2019	2020
Aceh	13 496	13 351	8 212	8 103
Sumatera Barat	15 311	15 031	9 899	9 707
Riau	16 833	15 935	7 542	7 213
Kota Jakarta Pusat	19 492	19 390	16 697	16 577
Jawa Barat	15 760	15 275	8 173	7 937
Jawa Tengah	15 279	15 031	9 895	9 724
Kota Yogyakarta	19 136	18 807	19 094	18 539
Jawa Timur	16 837	16 707	10 137	9 976
Kota Jayapura	18 572	17 992	13 833	13 442
Indonesia	15 866	15 463	9 244	9 004

Data tersebut yang disajikan sebelumnya dapat digunakan untuk membuka wawasan. Bahwa Pembangunan kesetaraan gender yang sudah dicanangkan dari sejak tahun 2000, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 atau sudah berjalan selama 21 tahun ternyata masih perlu untuk dioptimalkan. Pembangunan masih perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk dapat meningkatkan peran gender.

Pembangunan untuk meningkatkan peran Gender di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2000, atau telah berjalan 21 tahun. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000. Tetapi dari data BPS menunjukkan masih diperlukan peningkatan kualitas pembangunan yang dapat mengoptimalkan peran gender.

Bab 5

Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan

5.1 Pendahuluan

Perubahan sosial adalah keniscayaan, sebuah sunatullah. Pembangunan yang sedang dilakukan merupakan varian dari modernisasi, industrialisasi dan perubahan sosial. Pembangunan sebagai proses dinamis merupakan usaha ke arah tingkat kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Namun suatu pembangunan pun dapat menciptakan masalah-masalah pembangunan lain. Pembangunan sebagai proses tanpa akhir, dapat mewujudkan ide dan realita.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Di samping tujuan-tujuan yang direncanakan dan dikehendaki tidak mustahil pembangunan mengakibatkan terjadinya dampak pada sub sistem kemasyarakatan, sebelum industrialisasi pola kehidupan keluarga berpusat pada keluarga batih dan hubungan kekerabatan yang erat dengan keluarga luas setelah proses industrialisasi maka timbul berbagai gejala *freedom of martial choice* (Soekanto, 2001).

Salim dalam Soerjani, Ahmad, dan Munir (1987) memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara pembangunan dan pengembangan lingkungan. Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup. Dua hal yang menonjol sebab utama mengguncangkan keseimbangan lingkungan adalah perkembangan teknologi dan terjadinya ledakan penduduk. Usman (1998) menyebutkan sedikitnya dua faktor penting yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yakni faktor pesatnya peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan industri.

Perubahan tidak dapat dilepaskan akibat pengaruh teknologi dan modernisasi yang disertakan dalam proses pembangunan. Hukum-hukum teknologi begitu kuatnya sehingga menguasai cara berpikir manusia (Soerjanto dalam Soelaiman, 1998) kecenderungan cara berpikir ini ada empat macam yaitu (1) tumbuhnya reifikasi, (2) manipulasi, (3) fragmentasi dan (4) individualisasi.

Reifikasi jika dipelihara terus menerus bakal melahirkan materialisme, formalisme bahkan ritualisme. Manipulasi teknologi menimbulkan semangat hedonisme dan pola konsumtif. Individualisasi semakin merenggangkan ikatan seseorang dengan masyarakatnya, mendorong tumbuhnya sikap individualisme dan egoisme, cenderung bersikap serakah dan destruktif, terjerebab *monopoly of truth* dalam mempertahankan kekuasaan.

Pembangunan adalah suatu proses perencanaan sosial yang dilakukan oleh birokrat perencana pembangunan untuk membuat perubahan sosial yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu ukuran pencapaian hasil pembangunan menurut Arief Budiman dalam Salim (2002), adalah memperhitungkan kerusakan lingkungan hidup. Produktivitas yang tinggi berada pada proses pemiskinan penduduknya jika tidak memedulikan dampak terhadap lingkungan. Pabrik-pabrik memang berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menghasilkan limbah kimia yang merusak alam sekitarnya. Pembangunan ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai, akibatnya pembangunan dapat dinilai tidak berkelanjutan (*unsustainable*).

5.2 Dampak Pembangunan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dampak diartikan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Lingkungan (environment) adalah semua kondisi dan faktor eksternal yang memengaruhi semua organisme, terdapat dua komponen utama lingkungan yaitu; biotik dan abiotik (Soegianto, 2010).



Gambar 5.1: Banjir Sebagai Dampak Pembangunan

Indonesia sejak beberapa dasawarsa terakhir sangat giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, dalam menghadapi berbagai permasalahan di bidang lingkungan hidup. Secara umum permasalahan lingkungan hidup di Indonesia terdapat 5 hal pokok yaitu; pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan alam secara tidak terkendali, kepadatan penduduk (population bomb), menurunnya populasi fauna, dan ketidakseimbangan ekosistem (Pratiwi, 2008).

Pencemaran yang kini dirasakan berhubungan erat dengan teknologi mekanisme, industrialisasi, serta pola-pola hidup yang mewah dan konsumtif. Timbulnya pencemaran tentu erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain; kegiatan-kegiatan Industrial, kegiatan pertambangan, transportasi, serta kegiatan pertanian.

Rusaknya tata lingkungan alami merupakan dampak dari tingkah laku manusia dalam mengeksploitasi dan menggunakan sumber-sumber daya alam secara tidak seimbang (*over stress*). Disadari atau tidak, kenyataan ini dapat dilihat lewat praktik - praktik masyarakat seperti pembebasan hutan sampai gundul, pemanfaatan ekosistem pantai, penangkapan ikan laut sampai melampaui batas konservasinya, penggunaan alat-alat beracun dan peledak untuk menangkap ikan, pertanian sistem lahan berpindah.

Kepadatan penduduk lazim disebut ledakan penduduk, hasil sensus penduduk (SP2020) pada September 2020 sebesar 270,20 juta jiwa. Jumlah ini bertambah 32,56 juta jiwa dibanding hasil SP2010. Pertambahan penduduk yang tak terkendali justru merupakan rentetan masalah besar atau bom waktu yang membentuk sistem lingkungan, apalagi perkembangannya tidak ditata secara terencana maka pada saatnya akan terjadi suatu masa krisis.

Menurunnya populasi fauna juga menjadi permasalahan lingkungan, penyemprotan pestisida, insektisida, herbisida secara tidak langsung akan berakibat buruk terhadap lingkungan pertanian. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa bahan-bahan kimia pertanian, semisal penggunaan pestisida, memang membuat produksi pertanian meningkat, membuat pertanian lebih efisien. Tetapi pada aplikasi penggunaan pestisida hanya sekitar 20% yang tepat sasaran, sisanya mencemari tanah dan lingkungan bahkan membahayakan manusia.

Masalah lingkungan tidak saja terbatas pada masalah biofisik, tetapi juga pada lingkungan sosial (ekosistem sosial), berupa bergesernya sistem nilai seperti kegotong-royongan, etika serta nilai-nilai budaya lainnya. Bertumpuknya pembangunan di kota mengakibatkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan, sehingga masif terjadi urbanisasi. Masalah kemudian adalah padatnya penduduk di kota yang akan menambah permasalahan-permasalahan perkotaan, seperti makin rendahnya mutu kesehatan lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian, semakin relevan pula menghadirkan Amdal-Sosial.

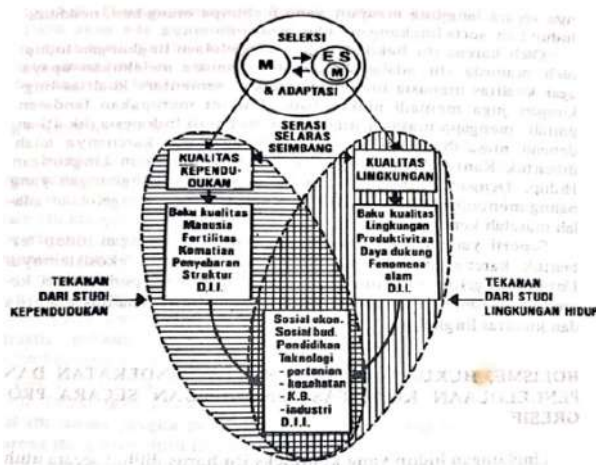
Pembangunan yang berwawasan lingkungan dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam pada satu pihak dan sumber daya manusia pada pihak lain (Jamaluddin, 2016). Pelaksanaan pembangunan lingkungan dapat dilakukan dengan cara menyeraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang tersedia dengan tidak menciptakan adanya perusakan kondisi alam lingkungan.

Pembangunan atau pembenahan faktor lingkungan bukanlah suatu yang baru, tetapi telah ada sejak manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya karena kehidupan manusia sejatinya sangat bergantung pada lingkungannya. Pembangunan suatu proyek tanpa menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tentu sangat merugikan banyak masyarakat.

5.2.1 Dampak Positif Pembangunan

Pembangunan sangat berpengaruh terhadap lingkungan, lingkungan biotik atau abiotik baik langsung maupun tidak langsung, berdampak positif atau negatif. Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu hidup rakyat, karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik itulah *goal* pembangunan. Dengan demikian pembangunan mengandung manfaat dan risiko (Soemarwoto, 1997).

Adapun di antara dampak positif pembangunan yakni membuka isolasi daerah terpencil dan perbatasan, menambah sarana dan prasarana baru, menemukan dan mengembangkan berbagai inovasi berbasis iptek, serta efisien dan efektivitas dalam aktivitas manusia.



Gambar 5.2: Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan antara Kualitas Manusia dan Lingkungan (Soerjani, Ahmad, Munir, 1987)

5.2.2. Dampak Negatif Pembangunan

Pembangunan pabrik besar dan kecil yang tumbuh seperti jamur, terutama di Jawa dan kota-kota utama luar Jawa memang telah banyak menciptakan banyak kesempatan kerja. Begitu pula pajak pengisi pundi-pundi negara. Pun tidak sedikit pengusaha swasta menengah dan kecil telah kecipratan rezeki dari usaha-usaha borongan pembangunan pabrik, pengadaan peralatan dan bahan baku, maupun pengangkutan barang impor dari pelabuhan ke pabrik atau barang jadi dari pabrik ke jaringan pemasaran.

Namun disisi lain, pertumbuhan industri yang begitu pesat juga telah berdosa melahap ribuan hektar tanah pertanian yang subur, mengeruk sawah dan tambak serta menggusur puluhan kampung penduduk sambil memusnahkan tempat-tempat pemijahan bibit ikan dan udang di pantai. Belum lagi penduduk dan petani yang secara tak langsung tergusur karena kecipratan getah yang bernama polusi industri. Tekanan industri yang begitu hebat terhadap lingkungan hidup, memang sudah dirasakan semenjak awal Pelita II (Aditjondro, 2003).

Dampak pembangunan industri terhadap lingkungan dapat dibagi dalam tiga generasi (Aditjondro, 2003), dampak generasi pertama berkaitan langsung dengan pengoperasian industri di suatu daerah, dan mempunyai tiga dimensi yaitu:

1. penggusuran petani dari daerah yang dicadangkan untuk lokasi industri;
2. pemerasan buruh lewat upah kerja yang rendah, jam kerja yang panjang dan lingkungan kerja yang penuh polusi;
3. penurunan mutu lingkungan hidup penduduk yang tinggal bertetangga dengan industri itu.

Dampak generasi kedua, setelah pabrik berdiri dan menghasilkan produk-produknya, yakni dampak penggunaan produk pabrik-pabrik itu terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Dampak generasi pertama dan kedua pada gilirannya melahirkan dampak generasi ketiga yakni, perubahan sistem nilai masyarakat di mana industri atau produk industri itu hadir. Dampak sosial-budaya ini berlangsung pelan tetapi pasti menggoyahkan sendi-sendi kebiasaan atau nilai-nilai luhur yang telah turun temurun.

Dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan biasa disebut dengan pencemaran. Pencemaran menurut Miller dalam Soegianto (2010) adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan pada karakteristik fisik, kimia, dan biologi dari udara, air dan tanah yang dapat memengaruhi kesehatan, kelangsungan hidup atau aktivitas manusia atau organisme lain.

Pencemaran air dapat menyebabkan pengaruh berbahaya bagi organisme, populasi, komunitas dan ekosistem. Tingkatan pengaruh pencemaran air terhadap manusia dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelas 1: Gangguan estetika (bau, rasa, pemandangan)
2. Kelas 2: Gangguan atau kerusakan terhadap harta benda
3. Kelas 3: Gangguan terhadap kerusakan hewan dan tumbuhan
4. Kelas 4: Gangguan terhadap kesehatan manusia
5. Kelas 5: Gangguan pada sistem reproduksi dan genetik manusia,
6. Kelas 6: Kerusakan ekosistem utama.

Pencemaran panas umumnya berasal dari instalasi pembangkit listrik dan cooling water industri. Pengaruh pencemaran panas ini terjadi karena pada umumnya limbah panas dibuang ke perairan pantai (shoreline dari sungai, danau) yang merupakan habitat (nursery, feeding dan spawning area) bagi berbagai biota akuatik. Masalah pencemaran panas ini menjadi lebih fatal bila terjadi di daerah tropis. Hal ini disebabkan toleransi terhadap suhu kebanyakan organisme tropis sudah mendekati batas maksimal toleransi suhu lingkungan (Soegianto, 2010).

Air tanah merupakan sumber utama air minum dan irigasi (pertanian). Air tanah juga tidak luput dari pencemaran. Bahan pencemar dapat mencapai akuifer air tanah melalui berbagai sumber di antaranya; bocornya pipa penyalur limbah, meresapnya bahan-bahan kimia dari daerah tempat pembuangan sampah, runoff (limpahan) pestisida, nutrien dari daerah pertanian, meresapnya bakteri dan virus melalui septic tank.

Laut adalah tempat penampungan akhir dari berbagai limbah yang merupakan hasil kegiatan manusia. Walaupun laut dapat mengencerkan, mendispersikan, dan mendegradasi sejumlah besar limbah cair dan lumpur, minyak dan beberapa limbah industri *degradable* tetapi kemampuannya tidak tak terbatas. Pembuangan limbah yang berlebihan khususnya di perairan pantai dapat mengganggu kemampuan ekosistem tersebut dalam memurnikan limbah secara alami (natural purifying system).

Pencemaran udara didefinisikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia atau kondisi panas yang berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan dan benda. Bahan pencemaran udara dapat berasal dari sumber alam maupun akibat kegiatan manusia. Sebahagian besar polutan di daerah perkotaan masuk ke dalam atmosfer melalui pembakaran bahan bakar fosil di industri maupun kendaraan bermotor.

Berdasarkan hukum kekekalan materi, walaupun angin dan hujan membantu membersihkan udara kota dari polutan, tetapi polutan itu tidak hilang, ia akan pindah atau tersimpan di awan, air permukaan, tanah dan bangunan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran udara adalah bangunan di perkotaan yang dapat menghalangi atau menurunkan kecepatan angin, sehingga mengurangi pengenceran polutan.

Pencemaran udara dalam ruangan (*indoor air pollution*) risiko terhadap kesehatan oleh adanya paparan bahan pencemar ini meningkat karena manusia menghabiskan sebagian besar (70-98%) waktunya di dalam ruangan dan di dalam kendaraan. Senyawa organik yang mudah menguap (VOC), misalnya gas yang dilepaskan oleh banyak produk rumah tangga. Sumber polusi bisa bermacam-macam, mulai dari bahan kimia dan produk pembersih ruangan tertentu, alat pendingin atau penghangat ruangan. Environmental Protection Agency (EPA) menyatakan bahwa paparan polutan pada udara dalam ruangan justru berpeluang memiliki dampak lebih besar bagi kesehatan dibanding polusi di luar ruangan.

Reklamasi terkadang disorot sebagai modus perusakan lingkungan. Reklamasi adalah aktivitas penimbunan suatu areal lahan dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Proyek Center of Point (CPI) di kawasan Pantai Losari Makassar menuai kritik dari berbagai pihak, WALHI Sulsel menilai reklamasi tersebut banyak kerusakan yang ditimbulkan, di antaranya abrasi di Pantai Galesong Kabupaten Takalar dan sulitnya nelayan menangkap ikan.

Meningkatnya pembangunan perumahan, beberapa jenis konstruksi dan prasarana lainnya serta makin meningkatnya pembuatan berbagai jenis sarana, memerlukan penyediaan bahan bangunan yang semakin banyak. Tanah, pasir, dan batu serta bahan bangunan yang lain merupakan bahan yang dipergunakan untuk menunjang pembangunan sektor konstruksi tersebut. Penambangan bahan bangunan telah banyak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kegiatan itu mengakibatkan rusaknya sawah-sawah yang subur, rusaknya terumbu

karang dan rusaknya sungai-sungai di daerah tempat pembangunan fisik berlangsung.

Pemanfaatan lahan pertanian menjadi bangunan kompleks perumahan telah menyebabkan sejumlah dampak negatif. Konversi lahan kawasan pertanian menjadi kawasan perumahan berdampak terhadap persoalan lingkungan. Dampak lingkungan dari alih fungsi lahan tersebut seperti banjir, menurunnya kesuburan tanah serta produksi pertanian, dan meningkatnya laju pencemaran lingkungan, serta matinya revolusi hijau.



Gambar 5.3: Dampak Konversi Lahan terhadap Lingkungan (Amruddin, 2021)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa Indonesia sudah berada dalam situasi darurat ekologis, bencana yang terjadi dipicu kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif. Data yang dikelola WALHI Kalimantan Selatan menyebutkan dari 3,7 juta hektar luasan wilayah Kalsel hampir 50 % merupakan lahan tambang dan perkebunan sawit. Sudah bukan rahasia umum, telah lama wilayah ini dikenal surganya pebisnis tambang emas hitam. Hutan di Kalsel terus menyusut dari waktu ke waktu, daya dukung dan tampung lingkungan hidup semakin merosot dan berakhir pada bencana ekologis.

Pembangunan seperti halnya dua sisi mata uang hadir menampilkan sisi manfaat dan risiko, dampak positif dan negatif. Lingkungan hidup yang kompleks harus dilihat secara holistik karena semua komponen kehidupan saling berinteraksi satu sama lain, saling memengaruhi, saling terkait.

Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan perlu dikelola antara kualitas manusia dan kualitas lingkungan. Hasil pembangunan yang terpenting adalah tumbuhnya aspirasi baru mengenai kesejahteraan hidup penduduk. Pembangunan berwawasan lingkungan bermakna meningkatkan kesejahteraan masa kini, tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan mengolah sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kunci utama keberhasilan pembangunan yang peduli lingkungan hidup adalah penerapan AMDAL secara konsisten dan transparan.

Bab 6

Dampak Pembangunan Terhadap Sosial Budaya

6.1 Pendahuluan

Hasil sebuah penganalisisan terhadap capaian pembangunan, dengan paradigma capaian pembangunan dalam wujud pertumbuhan dan kesejahteraan, menurut Gunawan Sumodiningrat, dkk., (2009), akan memberikan dampak yang cukup memprihatinkan, yaitu menghasilkan distorsi atau krisis lingkungan dengan menipisnya daya dukung alami, meningkatnya ketergantungan rakyat yang luar biasa dengan proyek pembangunan atau kepada birokrasi dan menjadi kendala pada pembangunan berkelanjutan (sustained development).

Selain itu, partisipasi yang tumbuh lebih merupakan mobilisasi partisipasi dalam implementasi, bukan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Berbagai kelemahan tersebut memunculkan paradigma *People Centered Development*. Adapun logika yang mendominasi paradigma ini adalah keseimbangan ekologi manusia, dengan didukung sumber pembangunan utama adalah informasi dan prakarsa yang kreatif, yang tidak akan pernah habis dengan tujuan utama perkembangan manusia dengan aktualisasi yang optimal dan potensi manusia.

Pembangunan masyarakat desa dilakukan melalui dua jalur, yaitu:

1. Jalur atas (pembangunan pusat dan daerah).
2. Jalur bawah (swadaya masyarakat).

Pelaksanaan pembangunan pada jalur bawah dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat seperti para tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi-organisasi kemasyarakatan, aparat desa serta lembaga sosial dan agama. Kedua jalur pembangunan tersebut membutuhkan partisipasi dan dukungan elemen masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial sebuah proses yang historikal.

Sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti. Perubahan ke arah kebaikan memerlukan pengarahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan segala apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya, pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Berpijak kepada *statement* bahwa setiap jalur pembangunan membutuhkan partisipasi dan dukungan elemen masyarakat, selaras dengan yang dikemukakan oleh Tuty Herawati, (2011), bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan gerakan pembangunan yang didasarkan atas peran serta dan swadaya masyarakat. Dengan partisipasi dan peran serta bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Dengan demikian akan tercipta *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dalam proses pembangunan menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perbincangan menyangkut peran serta masyarakat, dalam kenyataannya terdapat beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebagaimana oleh Moeljarto (1987), antara lain:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.

2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan.
6. Akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi baik aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Apabila pembangunan tidak melibatkan peran serta masyarakat, menurut Hetifah (2003), maka diperkirakan akan dapat memunculkan berbagai hal kurang baik, yang akhirnya terkait pula dengan kemanfaatan pembangunan tersebut, yakni:

1. Pemerintah kekurangan petunjuk mengenai kebutuhan dan keinginan warganya.
2. Investasi yang ditanamkan, tidak mengungkapkan prioritas kebutuhan masyarakat setempat.
3. Sumber-sumber daya publik yang langka tidak digunakan secara optimal.
4. Sumber-sumber daya masyarakat yang potensial untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tidak tertangkap.

5. Standar-standar dalam merancang pelayanan dan prasarana, tidak tepat.
6. Fasilitas-fasilitas yang ada digunakan di bawah kemampuan dan ditempatkan pada tempat-tempat yang salah.

Menurut Slamet (1992), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi adanya tiga faktor utama yang mendukungnya, yaitu (1) kemauan, (2) kemampuan, dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Ketiga faktor tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai faktor di seputar kehidupan manusia yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, antara lain:

1. faktor psikologis individu (needs, harapan, motif, reward);
2. pendidikan;
3. adanya informasi;
4. keterampilan;
5. teknologi;
6. kelembagaan yang mendukung;
7. struktural dan stratifikasi sosial;
8. budaya lokal;
9. peraturan dan pelayanan pemerintah.

Selanjutnya, Sahidu (1998) bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, needs, rewards dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana.

Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal dan pengalaman yang dimiliki. Tiga prinsip dasar dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pembangunan dapat dilakukan dengan beberapa wujud aktivitas, yakni:

1. Learning process (learning by doing), yakni proses kegiatan dengan melakukan aktivitas proyek dan sekaligus mengamati, menganalisis kebutuhan dan keinginan masyarakat.

2. Institutional development, yakni melakukan kegiatan melalui pengembangan pranata sosial yang sudah ada dalam masyarakat. Karena institusi atau pranata sosial masyarakat merupakan daya tampung dan daya dukung sosial.
3. Participatory, cara ini merupakan suatu pendekatan yang umum dilakukan untuk dapat menggali *need* yang ada dalam masyarakat.

6.2 Konsep Pembangunan

Memperhatikan pandangan Syarif Moeis (2009), bahwa pembangunan sepertinya sebagai suatu fenomena yang tidak habis-habisnya dibahas dalam kerangka kajian keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang kerap mengalami perubahan menurut berbagai dimensi yang ada.

Konsep pembangunan biasanya melekat dalam konteks kajian suatu perubahan, pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan; setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik bahkan sempurna dari keadaan yang sebelumnya; untuk mewujudkan harapan ini tentu harus memerlukan suatu perencanaan.

Bahwa perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat (Soemardjan-Soemardi, 1974), tentunya tidak terlepas dari fenomena pembangunan ini. Keanekaragaman, etnik, ras, kelompok, dan agama dengan bentuk dan tingkat kehidupan yang berbeda dalam masyarakat ini secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya perubahan dalam masyarakat sendiri atau menurut orientasinya ke luar masyarakat.

Kurangnya komunikasi yang terjadi antara para penentu kebijakan dengan rakyat kebanyakan, menyebabkan model atau bentuk pembangunan yang diterapkan lebih memperlihatkan suatu model 'top-down planning' yang menurut satu kondisi dianggap lebih baik, namun dari sisi yang lain memberikan dampak yang kurang diharapkan; sejauh perkembangan

masyarakat yang ada, ternyata sisi ke dua inilah yang dirasakan lebih memperlihatkan substansinya dalam masyarakat Indonesia ini.

Istilah dunia ketiga lebih diartikan sebagai Negara-negara yang secara ekonomi masih miskin, atau Negara-negara yang sedang berkembang, tanpa melihat ideologinya. Kemudian yang dimaksud dengan teori-teori pembangunan Dunia ketiga adalah teori-teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Negara-negara miskin atau Negara-negara yang sedang berkembang dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan dan militer Negara-negara adikuasa atau Negara-negara industri maju.

6.2.1 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Muhammad Suparmoko (2020), konsep pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan generasi sekarang jangan sampai memerlukan kompromi dari generasi yang akan datang melalui pengorbanan mereka dalam bentuk kesejahteraan sosial yang lebih rendah daripada kesejahteraan generasi saat ini. Yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial di sini adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan.

Selanjutnya Askar Jaya (2004), konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development), adalah konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah lama menjadi perhatian para ahli. Namun istilah keberlanjutan (sustainability) sendiri baru muncul sejak beberapa dekade yang lalu, walaupun perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak Malthus pada tahun 1798. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi pelaksanaannya, di antaranya ada empat hal yang perlu diperhatikan yaitu; pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang yang diikuti pendekatan secara ideal. Pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan yaitu; keberlanjutan ekologis, ekonomi, sosial budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana menghadapi *trade-off* antara pemenuhan kebutuhan pembangunan di satu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan disisi lain (Fauzi, 2004). Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri, karena pada dasarnya sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas.

Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Satu setengah abad kemudian, perhatian terhadap keberlanjutan ini semakin mengental setelah Meadow dan kawan-kawan pada tahun 1972 menerbitkan publikasi yang berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) dalam kesimpulannya, bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam.

Dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak akan selalu bisa dilakukan secara terus menerus (on sustainable basis). Meskipun mendapat kritikan yang tajam dari para ekonom karena lemahnya fundamental ekonomi yang digunakan dalam model *The Limit to Growth*, namun buku tersebut cukup menyadarkan manusia akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan. Karena itu perhatian terhadap aspek keberlanjutan ini mencuat kembali ketika pada tahun 1987 *World Commission on Environment and Development* (WCED) atau dikenal sebagai *Brundland Commission* menerbitkan buku berjudul *Our Common Future*.

Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru mengenai konsep pembangunan ekonomi dan keterkaitannya dengan lingkungan dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Agenda ini sekaligus menjadi tantangan konsep pembangunan ekonomi neo-klasikal yang merupakan konsep pembangunan konvensional yang selama ini dikenal, yang menyatakan bahwa *sustainable development is one that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own need* atau pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Pembangunan berkelanjutan (Emil Salim, 1990) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) (1990), pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi), dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu:

1. Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources.
2. Tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya.
3. Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource*.

Senada dengan konsep diatas, Sutamihardja (2004), menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya:

1. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergenerational equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang *unreplaceable*.
2. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang.
3. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan

- pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi.
4. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) yang berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang mendatang (inter temporal).
 5. Mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
 6. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.

Dari sisi ekonomi Fauzi (2004) setidaknya ada tiga alasan utama mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama menyangkut alasan moral. Generasi kini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga secara moral perlu untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam tersebut untuk generasi mendatang. Kewajiban moral tersebut mencakup tidak mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, yang dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan yang sama.

Kedua, menyangkut alasan ekologi, Keanekaragaman hayati misalnya, memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi, oleh karena itu aktivitas ekonomi semestinya tidak diarahkan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan semata yang pada akhirnya dapat mengancam fungsi ekologi.

Ketiga, yang menjadi alasan perlunya memperhatikan aspek keberlanjutan adalah alasan ekonomi. Alasan dari sisi ekonomi memang masih terjadi perdebatan karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti kita ketahui, bahwa dimensi ekonomi berkelanjutan sendiri cukup kompleks, sehingga sering aspek keberlanjutan dari sisi ekonomi ini hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antargenerasi (intergenerational welfare maximization).

Sutamihardja (2004), dalam konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang mungkin dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumber daya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan

memenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang.

Kemudian konsep *Sustainable Development* ini ikut dijelaskan oleh M. Zaini, Agus Tri Darmawanto (2015), dalam perspektif pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Istilah Pembangunan berkelanjutan secara resmi dipergunakan dalam Tap MPR No. IV /MPR/1999 tentang GBHN, sedangkan istilah Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan Hidup digunakan dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu juga dikenal ada Lingkungan dan Pembangunan, sedang sebelumnya lebih populer digunakan sebagai istilah Pembangunan yang berwawasan Lingkungan sebagai terjemah dari Eco-development. Sejak tahun 1980-an agenda politik lingkungan hidup mulai dipusatkan pada paradigma pembangunan berkelanjutan. Mulai pertama istilah ini muncul dalam World Conservation Strategy dari the International Union for the conservation of nature (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam bukunya *Building a Sustainable Society* (1981).

Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui laporan Brundtland, *Our Common Future* (1987). Tahun 1992 merupakan puncak dari proses politik, yang akhirnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, paradigma pembangunan berkelanjutan di terima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. Perkembangan kebijakan lingkungan hidup, didorong oleh hasil kerja *World Commission on Environment and Development* (WECD). WECD dibentuk PBB mematuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 No. 38/161 dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Brundtland (Norwegia) dan Mansour Khalid (Sudan).

Seorang anggota dari Indonesia, Emil Salim. Menurut Santoso (2003) istilah sustainable development mengandung berbagai penafsiran yang berbeda-beda karena terminologi pembangunan berkelanjutan sangat terbuka untuk ditafsirkan dengan berbagai pengertian. Di samping konsep *sustainable development* yang berasal dari WCED, muncul pula batasan tentang pembangunan yang terdukung dari Bank Dunia, *World Conservation Society* (IUCN) serta IUCN bersama UNEP dan WWF yang antara lain menekankan pada perbaikan sosial ekonomi, pelestarian, sumber daya alam dan perhatian

pada daya dukung sumber daya alam dan keanekaragamannya dalam jangka panjang.

Konsep ini dirumuskan dalam apa yang dinamakan Caring for the Earth: The Strategy for Sustainable Living menggantikan World Conservation Strategy (WCS). Dalam rumusan Caring for the Earth disingkat perumusan tentang sustainable development digariskan sebagai berikut: *improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystems. A sustainable economy is the product of sustainable development. It maintains its natural resources base, it can continue to develop by adopting and through improvement in knowledge, organization, technical efficiency and wisdom* (Santoso, 2003).

Yang menarik dalam hubungan ini adalah diakuinya tentang pentingnya peranan hukum untuk menopang terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Budimanta (2005) menyatakan bahwa, pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang Tomorrow's Generation Today's Generation North untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Selanjutnya menurut UU No. 23 tahun 1997 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Menurut Sugandi, dkk (2007) model pembangunan berkelanjutan didasarkan atas tiga pilar utama yang ketiganya saling berkaitan, yaitu:

1. Pertama, *society*, berkaitan peran masyarakat, *responsibility* (tanggung jawab), interaksi sosial, berperilaku masyarakat dan kondisi sosial masyarakat yang ada di suatu wilayah.
2. Kedua, *environment*, yaitu berkaitan dengan lingkungan alam, termasuk lingkungan fisik serta adanya seperangkat kelembagaan sebagai hasil buatan manusia dalam rangka pemanfaatannya.
3. Ketiga, *economy*, yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat termasuk dalam rangka memperoleh keuntungan. Ketiga pilar tersebut saling terkait, apabila ketiganya dalam generasi sekarang saling terkait dan saling mendukung, maka dari hasil generasi sekarang akan dapat dinikmati generasi selanjutnya.

6.2.2 Cakupan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Adapun cakupan dan Tujuan yang hendak dicapai dari keseluruhan proses pembangunan berkelanjutan ini, sesungguhnya berkaitan erat dengan tujuan menurut level-level sentra kehidupan manusia yang hidup bersama di dunia ini, yaitu:

1. Level nasional

Berkaitan dengan negara masing-masing, dengan melakukan aktivitas mendorong semua negara anggota untuk segera mengembangkan respons nasional yang ambisius tapi praktis untuk keseluruhan implementasi dari Agenda ini. Hal ini dapat membantu transisi menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan membangun dari instrumen-instrumen yang sudah ada, seperti strategi pembangunan nasional dan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana pantasnya.

Mendorong negara-negara anggota untuk melakukan review terhadap kemajuan yang dicapai secara berkala dan inklusif pada level nasional dan sub nasional yang dipelopori oleh pemerintah negara masing-masing. Review tersebut harus didasari dari kontribusi dari masyarakat adat, masyarakat sipil. Sektor swasta dan para-pihak lainnya, sejalan dengan kondisi, kebijakan dan prioritas nasional. Parlemen nasional dan juga institusi lainnya juga dapat dilibatkan untuk mendukung proses ini.

2. Level regional

Dalam hubungan antar negara dalam satu regional tertentu, serta level global dalam kaitannya dengan kehidupan manusia hidup bersama di planet bumi ini. Tindak lanjut dan review pada level regional dan sub regional dapat, selayaknya, memberikan kesempatan yang

bermanfaat untuk pembelajaran bersama, termasuk melalui review sukarela, berbagi *best-practices* dan diskusi mengenai target bersama. Dalam hal ini kami menyambut kerja sama komisi dan organisasi regional dan subregional. Proses-proses Regional yang inklusif akan mengambil dari Review tingkat nasional dan akan berkontribusi kepada tindak lanjut dan review pada Level global, termasuk High Level Political Forum mengenai pembangunan yang berkelanjutan. Menyadari pentingnya untuk membangun dari mekanisme tindak lanjut dan review di tingkat regional dan memberikan ruang kebijakan yang cukup, kami mendorong semua negara anggota untuk mengidentifikasi forum regional yang paling sesuai untuk pelibatan proses ini. Komisi regional PBB juga didorong untuk terus mendukung negara-negara anggota dalam hal ini.

3. Level global

High Level Political Forum akan mendapatkan peran sentral dalam mengawasi jaringan proses tindak lanjut dan review di level global, bekerjasama dengan Majelis Umum, ECOSOC dan organ-organ dan forum-forum lainnya yang relevan, sesuai dengan masing-masing mandat. High Level Political Forum juga akan memfasilitasi saling berbagi pengalaman, termasuk cerita sukses, kendala, dan pembelajaran, dan memberikan kepemimpinan, panduan, dan rekomendasi politis untuk tindak lanjut.

Forum ini juga akan mendukung sistem koherensi dan koordinasi untuk kebijakan pembangunan berkelanjutan. Juga akan memastikan bahwa Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tetap relevan dan ambisius dan harus fokus terhadap penilaian terhadap kemajuan, capaian dan kendala yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan juga isu-isu baru. Akan dibuat hubungan-hubungan yang efektif bersamaan dengan pengaturan tindak lanjut dan review dari semua konferensi dan proses PBB yang relevan, termasuk mengenai LDCs, SIDS dan LLDCs.

Tindak lanjut dan review pada High Level Political Forum Akan diumumkan oleh Laporan Kemajuan SDG tahunan yang disiapkan

oleh Sekretaris Jenderal yang bekerja sama dengan sistem PBB, berdasarkan kerangka kerja indikator global dan data yang diproduksi oleh sistem statistik nasional dan informasi yang dikumpulkan pada level regional. High Level Political Forum juga akan mendapat informasi dari Laporan Pembangunan Berkelanjutan Global, yang akan memperkuat hubungan sains dan kebijakan dan dapat memberikan instrumen yang berdasarkan bukti yang kuat untuk mendukung para pembuat kebijakan dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kami mengundang presiden ECOSOC untuk melakukan proses konsultasi mengenai cakupan, metodologi, dan frekuensi Laporan sebagaimana kaitannya dengan Laporan Perkembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, hasil pertemuan ini seharusnya tercermin dalam Deklarasi Menteri pada sesi High Level Political Forum di tahun 2016. *High Level Political Forum*, di bawah naungan ECOSOC, akan melaksanakan peninjauan teratur, yang seiringan dengan Resolusi 67/290.

Peninjauan akan bersifat sukarela, yang juga mendorong pelaporan, dan mengikutsertakan negara maju dan berkembang, bersama dengan unsur PBB terkait dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta. Pihak-pihak ini harus dipimpin negara, yang mengikutsertakan kementerian pihak-pihak tingkat tinggi lain yang terkait. Mereka harus menyediakan kerangka kerja sama, termasuk melalui partisipasi kelompok besar dan pemangku kebijakan terkait lainnya.

Peninjauan tematik terkait perkembangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk isu yang beririsan, juga akan menjadi bahasan di *High Level Political Forum*. Hal ini akan didukung melalui peninjauan oleh komisi fungsionalis ECOSOC dan badan serta forum antar pemerintah lainnya yang mencerminkan sifat tujuan yang saling terintegrasikan dan juga terhubung. Mereka akan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang terkait dan, saat memungkinkan, memberikan, dan beriringan dengan, lingkaran High Level Political Forum.

Kami menyambut baik, sebagai pokok-pokok Agenda Aksi Addis Ababa, yang ditujukan untuk tindak lanjut dan peninjauan hasil Pendanaan untuk Pembangunan sebagaimana semua langkah pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terintegrasikan di dalam tindak lanjut dan kerangka

peninjauan Agenda ini. Kesimpulan dan rekomendasi yang disepakati dari proses antar-pemerintah di Forum Pendanaan untuk Pembangunan ECOSOC tahunan akan dimasukkan ke dalam tindak lanjut dan peninjauan keseluruhan pelaksanaan Agenda ini di *High Level Political Forum*.

Bertemu setiap empat tahun di bawah pengawasan Majelis Umum, *High Level Political Forum* akan membawa panduan politik tingkat tinggi pada Agenda ini dan implementasinya, identifikasi kemajuan dan tantangan - tantangan yang muncul dan mobilisasi aksi lanjutan guna menelaraskan implementasi. Pada *High Level Political Forum* selanjutnya, di bawah pengawasan Majelis Umum, yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, siklus pertemuan akan diulangi kembali, dalam rangka memaksimalkan koherensi dengan proses Peninjauan Kebijakan Komprehensif Empat Tahunan.

Kami juga menegaskan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan perluasan sistem strategis dalam rangka memastikan dukungan yang koheren dan terintegrasi pada pelaksanaan Agenda baru oleh sistem pembangunan PBB. Badan pengelola terkait harus melakukan peninjauan terhadap dukungan pelaksanaan dan pelaporan tentang kemajuan dan hambatan. Kami menyambut baik Dialog ECOSOC yang sedang berjalan pada isu penempatan sistem pembangunan PBB dalam jangka waktu yang lama dan berharap dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan tersebut, sebagaimana pantasnya.

High Level Political Forum Akan mendukung partisipasi dalam proses tindak lanjut dan peninjauan oleh kelompok utama dan pemangku kebijakan lain yang sejalan dengan Resolusi 67/290. Kami meminta pelaku ini untuk melaporkan kontribusi mereka terhadap pelaksanaan Agenda. Kami memohon Sekretaris Jenderal, berkonsultasi dengan Negara Anggota, untuk menyiapkan laporan, sebagai pertimbangan pada Majelis Umum sesi ke-70 dalam persiapan untuk pertemuan *High Level Political Forum* pada tahun 2016, yang menggaris besarkan tonggak sejarah yang penting terhadap efisiensi yang koheren, dan tindak lanjut yang inklusif dan juga peninjauan pada tingkat global.

Laporan ini harus memasukkan pengajuan pada pengaturan organisasional untuk peninjauan yang dipimpin negara pada *High Level Political Forum* di bawah pengawasan ECOSOC, termasuk rekomendasi tentang panduan pelaporan umum yang sukarela. Hal ini harus menjelaskan tanggung jawab institusional dan menyediakan pedoman tema tahunan, pada rangkaian

tinjauan tematik, dan pada pilihan tinjauan periodik untuk *High Level Political Forum*. Kami menetapkan komitmen teguh untuk mencapai Agenda ini dan menggunakannya untuk sepenuhnya membawa perubahan bagi dunia kita menjadi lebih baik pada tahun 2030.

6.3 Dampak Pembangunan Terhadap Sosial Budaya

Secara umum usaha pembangunan tetap saja akan memberikan dampak terhadap kehidupan manusia. Akan tetapi apakah dampak tersebut dalam skala besar atau kecil, positif atau negatif, berlaku secara keseluruhan aspek kehidupan masyarakat atau sebagiannya saja, dan lainnya. Oleh Tasrif Landoala (2013), dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.

Aktivitas pembangunan akan menghasilkan dampak, baik pada manusia maupun lingkungan hidup. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia. Oleh Said Zainal Abidin (2016), bahwa pembangunan yang berlangsung di dunia selama beberapa dekade setelah Perang Dunia ke-II telah mampu meningkatkan tingkat pendapatan rata-rata yang jauh lebih tinggi, di hampir semua negara.

Namun, bersamaan dengan itu, pembangunan yang meningkat itu belum mampu memperbaiki tingkat hidup kaum duafa, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang hidup di desa-desa. Persoalannya terletak pada pengertian tentang pembangunan yang dipahami oleh para pelaksana pembangunan tidak relevan dengan masalah hidup yang dialami oleh kaum tersebut di negara-negara yang bersangkutan.

Akibatnya, pendekatan yang dipakai, strategi yang dipergunakan dan program pembangunan yang diterapkan sering kali tidak sesuai dengan kenyataan hidup dan kepentingan mereka. Dalam ajaran Islam, pengertian tentang pembangunan disebutkan sebagai “keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya” (Walal akhiratu khairun laka minal ula, QS: 93).

Pengertian tersebut menempatkan pembangunan dalam posisi yang dinamis. Maksudnya, kondisi tersebut tidak berada sebagai sesuatu yang tetap, tetapi berada dalam posisi yang selalu berubah secara terus menerus. Tidak pernah berhenti. Karena rangkaian perubahan itu merupakan hasil dari kegiatan pembangunan, maka itu pembangunan dipandang sebagai proses kegiatan yang tidak boleh berhenti, tetapi berlanjut sepanjang waktu. Setiap waktu adalah waktu awal yang sekaligus juga waktu akhir.

Dengan demikian, dalam kehidupan terdapat proses perbaikan terus menerus tanpa henti. Sebab itu dalam konsep Islam manusia dikatakan merugi kalau tidak lebih baik dari kondisi kemarin, meskipun dalam kenyataan tidak menjadi lebih buruk, apalagi kalau itu menjadi lebih mundur.

Sejalan dengan konsep tersebut diatas, dalam ilmu Manajemen Pembangunan, pembangunan disebut sebagai “.. *dynamic change of a whole society from one state of national being to another, with the connotation that the latter state is preferable*”. (Katz.; p.2). Dalam konsep ini, ada empat aspek yang perlu dicatat, antara lain:

1. Pembangunan itu adalah perubahan yang bersifat dinamis (a dynamic change).
2. Perubahan itu tidak hanya terjadi pada sekelompok orang atau sesuatu wilayah saja, tetapi berlangsung dalam seluruh masyarakat (a whole society).
3. Perubahan itu berlangsung secara bertahap, dari suatu keadaan keadaan yang baru.
4. Keadaan yang baru itu lebih disukai daripada keadaan sebelumnya.

Karena pembangunan meliputi seluruh masyarakat, pembangunan mencakup berbagai sisi kehidupan. Dalam beberapa hal, tiap sisi kehidupan berbeda dengan sisi kehidupan lain. Dalam posisi yang berbeda, setiap individu berperilaku berbeda. Perilaku sebagai seorang ayah tidak sama dengan perilaku sebagai suami, perilaku sebagai anak buah berbeda sebagai perilaku sebagai pimpinan.

Demikian juga perilaku petani tidak akan sama dengan perilaku buruh, perilaku birokrat berbeda dengan perilaku pengusaha dan seterusnya. Sesungguhnya terdapat dua sasaran atau target pembangunan, sekaligus yang akan menerima dampak dari usaha pembangunan, antara lain:

Individu

Target individu atau perorangan itu juga sebenarnya tidak terlepas dari kelompok atau masyarakat. Sudah dipahami, individu merupakan bagian dari kelompok. Karena itu maka target individu dimaksudkan sebagai sasaran-antara untuk mewujudkan perubahan kelompok atau masyarakat secara menyeluruh. Contoh dari target ini dapat dilihat pada pembangunan ekonomi rakyat.

Secara individual perubahan dilakukan pada masing-masing individu, untuk kemudian secara berantai diharapkan terjadi perubahan secara menyeluruh dalam masyarakat. Perubahan yang bersifat individu lebih berhubungan dengan psikologi sosial dan pendidikan. Sebab itu strategi perubahan pada target individu memilih pendidikan sebagai strategi induk. Melalui pendidikan diharapkan secara individu rakyat menjadi lebih mampu untuk bekerja lebih baik pada posisi yang relatif lebih baik.

Selanjutnya baru diikuti dengan strategi pengadaan sarana dan prasarana serta berbagai fasilitas yang diperlukan. Pendekatan yang dipakai di sini adalah model pembangunan yang berpusat pada manusia. Manusia sebagai subyek pembangunan yang harus lebih didahulukan. Semua prasarana, sarana dan fasilitas lain untuk menunjang manusia, bukan sebaliknya.

Kelompok

Yakni institusi sebagai sasaran, strategi pembangunan diarahkan pada perubahan komposisi, struktur dan proses. Perubahan komposisi besarnya kredit yang diberikan akan memberi pengaruh pada perubahan kegiatan ekonomi dari masing-masing sektor atau bidang. Besar kecilnya prioritas pembangunan antar sektor juga dapat dilihat pada komposisi anggaran dari sektor-sektor tersebut dalam APBN atau APBD. Sementara perubahan struktur organisasi atau struktur sosial mempunyai pengaruh pada kegiatan dan mobilitas dalam masyarakat.

Masyarakat yang feodalistis dengan struktur sosial yang kaku menghambat perkembangan, sedangkan masyarakat yang demokratis membuka peluang untuk lebih kreatif. Perubahan proses atau prosedur memengaruhi kegiatan masyarakat. Ini dapat dilihat pada upaya-upaya untuk memperpendek birokrasi pelayanan dalam berbagai bidang seperti dalam pelayanan kesehatan, impor dan ekspor, pengurusan kredit usaha kecil dan menengah. Selanjutnya instrumen strategi yang dipilih disesuaikan dengan kelompok-sasaran (target) dan strategi induk yang diambil.

Selanjutnya, bercermin dari uraian yang menjelaskan Dampak Sosial Budaya, Ekonomi Dan Lingkungan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi JK (2019), bahwa pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak pembangunan tersebut memang tidak bisa serta merta langsung dirasakan masyarakat.

Berikut ini dampak sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan dari pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi JK.

Masyarakat Perbatasan Wilayah dan Desa

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam periode pertama pemerintahannya telah memprioritaskan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Salah satunya dengan terus menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Dampak yang dirasakan adalah mulai meningkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan dikarenakan tersedianya fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, bandara dan pelabuhan. Selain itu karena wilayahnya yang terpencil karena dampak dari pembangunan konektivitas jalan maka rakyat mendapat kemudahan dalam mobilitas serta komunikasi.

Namun demikian, upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi seolah tidak berpengaruh pada proses perdamaian di Papua. Belakangan ini di Papua sendiri sempat bergejolak dan mengakibatkan kekacauan di sejumlah daerah. Adanya luka batin kepercayaan yang dialami oleh masyarakat Papua, yang merupakan metode pendekatan, seperti pendekatan budaya, religius, humanistik dan pendekatan personal. Ini merupakan permasalahan yang sedang terjadi di Papua.

Masyarakat Kota

Pemerintahan Era Jokowi JK telah menggalakkan pembangunan infrastruktur di kota seperti pembangunan MRT di Jakarta dan Palembang. Renovasi StadionGBK, jalan tol trans Jawa, jalan tol trans Sumatra dan lain-lain.

Hal itu memunculkan isu-isu sosial seperti:

1. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan yang berhadapan dengan jumlah lahan yang tersedia.
2. Mekanisme pembebasan tanah dan pencabutan hak atas tanah yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan.

3. Masalah kesehatan lingkungan seperti air minum tidak memadai dan sanitasi, polusi udara dalam ruangan dan *crowding* yang berlebihan.
4. Tidak memadainya pembuangan limbah, pencemaran badan air dan hilangnya daerah hijau.
5. Gangguan ekologi dan sumber daya, emisi bahan kimia dan rumah kaca.

Selain isu-isu di atas kebijakan pembangunan infrastruktur di perkotaan juga memunculkan dampak sosial positif dan negatif seperti berikut:

1. Dampak Positif, antara lain:
 - a. kelancaran lalu lintas;
 - b. percepatan penyediaan infrastruktur;
 - c. kesempatan kerja dan peluang usaha;
 - d. peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Dampak Negatif, antara lain:
 - a. pengadaaan lahan;
 - b. terganggunya estetika lingkungan;
 - c. konflik dan keresahan sosial;
 - d. sikap dan persepsi masyarakat;
 - e. hubungan sosial.

Tidak ada salahnya, kita juga melihat dampak pembangunan ini dari aspek ekonomi secara umum, di mana Negara Indonesia mengalami defisit infrastruktur yang akut sejak krisis ekonomi Asia pada 1998. Berbagai hambatan terjadi mulai dari isu pembebasan lahan, regulasi yang tak lengkap, persiapan proyek yang belum matang, kemampuan pembiayaan yang terbatas sampai dengan eksekusi yang bermasalah. UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang disetujui pada 2012 sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap percepatan ini. Selain itu, alokasi dana yang lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur juga mendukung percepatan ini.

Salah satu pembangun yang dikebut oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi, adalah pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan. Tujuannya supaya dapat menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain. Dengan konektivitas antar daerah, diharapkan dapat memacu

pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk memudahkan mobilitas manusia dan barang, serta membuat harga bahan pokok semakin terjangkau.

Namun ternyata pembangunan infrastruktur yang masif, praktis tak berdampak banyak kepada pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun terakhir. Dalam periode 2014-2018, ekonomi hanya tumbuh rata-rata di kisaran 5 persen. Angka ini jelas jauh dari yang ditargetkan pemerintah yaitu 7 persen. Selain itu pembangunan infrastruktur juga menambah hutang negara.

Pada akhir 2004, ketika SBY baru menduduki kursi kepala negara, jumlah utang pemerintah sebesar Rp1.299,5 triliun. Lalu, 10 tahun berkuasa, Ketua Umum Partai Demokrat itu meninggalkan pemerintahan dengan jumlah utang mencapai Rp2.608 triliun pada 2014. Artinya, nominal utang di era SBY naik Rp1.308,5 triliun atau 100,69 persen dalam 10 tahun. Sementara pada era Jokowi, nominal utang menjulang hingga menyentuh angka Rp4.418 triliun pada 2018. Utang di era mantan gubernur DKI Jakarta itu naik Rp1.810 triliun atau 69,4 persen dari tahun akhir pemerintahan SBY. Berikut data perbandingan hutang era Presiden Jokowi dan Soeharto.

Perbandingan Utang dari Era Soeharto hingga Jokowi

	Soeharto 1998	BJ Habibie 1999	Abdurrahman Wahid 2001	Megawati 2004	SBY 2014	Jokowi 2018
Utang Pemerintah	Rp551,4 triliun (US\$68,7 miliar)	Rp938,8 triliun (US\$132,2 miliar)	Rp1.273,18 triliun (US\$122,3 miliar)	Rp1.299,50 triliun (US\$139,7 miliar)	Rp2.608,78 triliun (US\$209,7 miliar)	Rp4.395,97 triliun
Produk Domestik Bruto (PDB)	Rp955,63 triliun	Rp1.099,29 triliun	Rp1.646,32 triliun	Rp2.295,82 triliun	Rp10.542 triliun	Rp14.679,42 triliun
Rasio Utang Terhadap PDB	57,7 persen	85,4 persen	77,2 persen	56,5 persen	24,7 persen	29,91 persen

*Data pada akhir kepemimpinan *Data utang Jokowi hingga November 2018

Infografis: Fajrian | Naskah: Ulfa Arieza | Sumber: diolah



Gambar 6.1: Perbandingan Hutang Negara Dari Era Soeharto Hingga Jokowi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berisiko tinggi

bagi lingkungan hidup dan masyarakat seperti beberapa pembangunan jalan dan bandara kerap mengorbankan lahan pertanian yang juga berarti mengancam mata hidup masyarakat setempat.

Selain itu dampak terhadap emisi Gas Rumah Kaca juga berpengaruh, sementara itu kebijakan pemerintah dengan membangun beberapa PLTU Batubara telah menimbulkan dampak kerusakan terhadap lingkungan seperti yang terjadi di daerah Batang puluhan petani harus kehilangan sawahnya karena lahan tanahnya digunakan untuk pembangunan proyek PLTU selain itu cerobong asap yang keluar dari PLTU menyebabkan masyarakat sekitar mengalami ispa seperti yang terjadi di daerah Paiton. Padahal Indonesia telah menyatakan komitmennya pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menetapkan target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai 41% dibandingkan skenario Business As Usual (BAU) di Tahun 2030.



Gambar 6.2: Indonesia Environmental Challenge

Secara nasional, target penurunan emisi sebesar 2,869 million metric ton CO₂e yang terdiri dari 2,037 million metric ton CO₂e untuk unconditional target dan 1,693 metric ton Co₂ e untuk conditional. Berdasarkan grafik target penurunan emisi bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang menargetkan penurunan emisi yang cukup tinggi pada Tahun 2030. Oleh karena itu perlu upaya ekstra dalam komitmen ini baik oleh pemerintah maupun semua

masyarakat Indonesia. Salah satu cara yang direkomendasi oleh WRI adalah dengan melakukan pengelolaan *land use* dengan *reforestasi* dan mendorong penggunaan *renewable energy* pada sektor energi.

Setiap pembangunan infrastruktur seharusnya sudah mengikuti asas sustainability yang mampu mengintegrasikan antara ekonomi, lingkungan dan sosial secara bersamaan. Konsep ini berarti membangun infrastruktur tanpa menghasilkan dampak yang merusak bagi lingkungan sekaligus berdampak positif secara sosial. Infrastruktur yang dibangun dapat menghasilkan karbon footprint yang rendah, tidak merusak ekosistem di sekitarnya bahkan dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Tentunya infrastruktur seperti ini tidak akan dapat terwujud tanpa dukungan dari semua pihak terutama para investor jika tidak memiliki tujuan yang sama. Contohnya adalah renewable energy, green building, wind power generation dan lainnya.

Bab 7

Globalisasi: Konsep, Dimensi, dan Sejarah

7.1 Pendahuluan

Menilik dari aspek etimologis, kata globalisasi—sebagai serapan dari kata berbahasa Inggris ‘globalization’—berasal dari kata dasar ‘globe’ yang didefinisikan sebagai ‘a spherical or rounded object’. Bumi sebagai planet yang berbentuk bola, bulat cenderung lonjong—memiliki bentuk yang merepresentasikan karakteristik globe tersebut. Kata globe yang merepresentasikan bumi (dunia) ini kemudian menjadi kata ‘global’ yang bermakna mendunia.

Globalisasi kemudian didefinisikan menjadi berbagai versi sesuai dinamika yang meliputinya. Istilah ‘globalization’ ini pertama kali disampaikan pada tahun 1985 oleh Theodore Levitt. Globalisasi versi Levitt ini merujuk pada politik ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan (Pratama, 2011). Beberapa definisi awal bisa kita temukan dengan mudah melalui penelusuran internet ke situs-situs kamus populer atau situs mengonstruksi terminologi. Merriam-Webster menerjemahkan globalization sebagai ‘*the act or process of globalizing: the state of being globalized*’.

Dalam bahasa Indonesia, globalisasi versi terjemahan Merriam-Webster diartikan sebagai aktivitas, tindakan atau proses mendunia ; suatu situasi atau keadaan menuju kondisi mendunia. Cambridge Dictionary menerjemahkan globalization sebagai '*a situation in which available goods and services, or social and cultural influences, gradually become similar in all parts of the world*'. Cambridge Dictionary mengisyaratkan bahwa ada proses pemerataan atau standarisasi yang sifatnya global atau berlaku di seluruh negara di dunia. Pemerataan yang dimaksud meliputi standar dalam bahan baku, barang, jasa, bahkan dalam pengaruh sosial dan budaya.

Beberapa contoh pengaruhnya dalam dimensi sosial budaya seperti menduniannya gaya hidup subkultur semisal hippies di tahun 1960-an dan 1970-an, menjamurnya sosial media pertemanan dari Friendster (sejak 2003) kemudian Facebook (sejak 2004) pada era tahun 2000-an, hingga exposing social life dan vlogging via Youtube (sejak 2005), Instagram (sejak 2010) hingga Tik Tok (sejak 2016) di era booming-nya social media (tahun 2010-an hingga 2020-an).

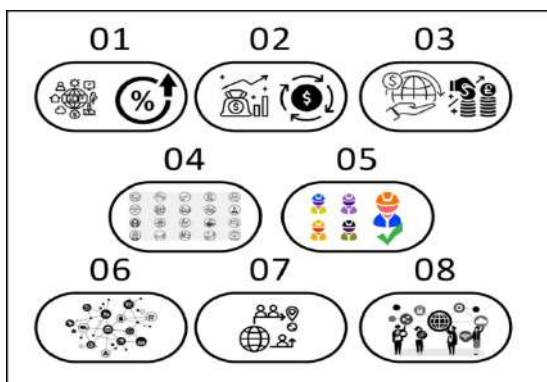
Bahkan penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan pandemi global dan berubahnya tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia merupakan bagian dari globalisasi. Legacy yang ditinggalkan COVID-19 menciptakan gaya hidup social distancing, dan pelaksanaan protokol kesehatan yang serba steril seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, mengukur suhu badan, dan kebiasaan mengenakan outfit yang serba tertutup—seperti masker dan face shield sebagai penanda zaman, untuk mencegah penularan COVID-19 sejak awal tahun 2020.

Longman Dictionary of Contemporary English, mendefinisikan global dalam konsep "concerning the whole earth". Maksud dari definisi tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan dunia secara menyeluruh, bersifat internasional, atau meliputi seluruh alam jagat raya. Sesuatu hal yang dimaksud di sini dapat berupa masalah, kejadian, kegiatan atau bahkan sikap. Globalisasi juga membentuk tatanan 'borderless society', masyarakat dunia yang saling berinteraksi tanpa sekat; saling terkoneksi tanpa batas-batas wilayah negara atau territory; berkomunikasi tanpa mengkhawatirkan adanya perbedaan bahasa lisan (Kashima et al., 2011).

George C. Lodge menyampaikan ada dua premis besar mengenai konsep globalisasi yaitu globalisasi sebagai fakta, dan globalisasi sebagai proses. Hal ini Lodge sampaikan pada tulisannya yang berjudul 'Managing Globalization in the Age of Interdependence' (Wiwoho, 2016). Faktanya adalah bahwa

orang-orang dan bangsa-bangsa di dunia lebih saling bergantung (interdependent) dari sebelumnya dan menjadi lebih saling bergantung lagi ke depannya.

Ukuran saling ketergantungan adalah arus global dari hal-hal seperti perdagangan, investasi, modal dan degradasi terkait ekosistem dengan semua kehidupan bergantung kepadanya. Proses globalisasi yang dimaksud adalah mengenai teknologi dan manusia yang masih akan terus berkembang, berproses dengan segala dinamikanya. Teknologi yang diciptakan, digunakan dan dikembangkan oleh manusia adalah faktor pendukung yang mendorong lahir dan berkembangnya globalisasi.



Gambar 7.1: Aspek Kunci Dari Globalisasi

Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 7.1 di atas, globalisasi berkontribusi terhadap beberapa aspek kunci berikut:

1. Rasio perdagangan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) meningkat di sebagian besar negara.
2. Meningkatnya perluasan aliran modal keuangan antar negara.
3. Berkembangnya investasi asing langsung dan Merger & Akuisisi lintas batas (Cross border Merger & Acquisitions).
4. Meningkatnya jumlah merek global—termasuk dari negara berkembang.
5. Spesialisasi yang lebih dalam dari tenaga kerja—di mana komponennya berasal dari banyak negara.

6. Rantai pasokan global & rute perdagangan dan investasi baru misalnya perdagangan selatan-selatan
7. Meningkatnya tingkat migrasi tenaga kerja internasional dan migrasi di dalam negara.
8. Meningkatkan konektivitas orang dan bisnis melalui jaringan seluler dan Wifi (Ritzer, 2007; Kovács, 2018)

Hal-hal yang berkontribusi terhadap globalisasi sesuai yang diungkap (Lee and Vivarelli, 2006; Wilpert, 2009) adalah:

Kontainerisasi (Containerisation)

Biaya pengiriman laut telah turun, karena tumbuhnya tren penggunaan peti kemas, kontainerisasi, pengiriman massal, dan efisiensi lainnya. Biaya unit pengiriman produk yang lebih rendah di sekitar ekonomi global membantu membawa harga di negara produsen lebih dekat dengan harga di pasar ekspor, dan membuat pasar lebih kompetitif secara global.

Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi yang cepat dan berkelanjutan telah mengurangi biaya transmisi dan komunikasi informasi – kadang-kadang dikenal sebagai “matinya jarak” – faktor kunci di balik perdagangan produk pengetahuan menggunakan teknologi web.

Skala Ekonomi

Banyak ekonom percaya bahwa telah terjadi peningkatan skala efisien minimum (Minimum Efficient Scale/MES) yang terkait dengan beberapa industri. Jika MES meningkat, pasar domestik dapat dianggap terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan penjualan industri ini. Banyak negara berkembang memiliki perusahaan transnasional mereka sendiri.

Perbedaan Sistem Perpajakan

Keinginan bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari unit biaya tenaga kerja yang lebih rendah dan faktor produksi lain yang menguntungkan di luar negeri telah mendorong negara untuk menyesuaikan sistem pajak mereka untuk menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment /FDI). Banyak negara telah terlibat dalam persaingan pajak antara satu sama lain dalam upaya untuk memenangkan proyek investasi asing yang menguntungkan.

Kurangnya Proteksionisme

Bentuk-bentuk lama perlindungan non-tarif seperti perizinan impor dan kontrol devisa secara bertahap telah dibongkar. Perbatasan telah dibuka dan tingkat tarif impor rata-rata telah turun. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan hambatan non-tarif seperti kuota impor karena negara-negara telah berjuang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi riil dan sebagai respons terhadap defisit perdagangan dan transaksi berjalan yang terus-menerus.

Strategi Pertumbuhan Perusahaan Transnasional dan Multinasional

Dalam mengejar pendapatan dan pertumbuhan laba, semakin banyak bisnis dan merek global telah berinvestasi secara signifikan dalam ekspansi internasional. Hal ini terutama berlaku untuk bisnis yang memiliki merek yang telah membuktikan bahwa mereka memiliki potensi untuk sukses secara global, terutama di ekonomi yang tumbuh lebih cepat yang didorong oleh meningkatnya jumlah konsumen kelas menengah (Hirst, Thompson and Bromley, 2015).

7.2 Dimensi

Ada 4 dimensi umum dari globalisasi yang disampaikan oleh Wiwoho (2006) yaitu dimensi ekonomi, kebudayaan & keagamaan, teknologi, dan demografi. Dimensi ekonomi yang dimaksud mengacu pada makin menyatunya unit-unit ekonomi di dunia ke dalam satu unit ekonomi dunia. Mengenai dimensi kebudayaan dan keagamaan, hal ini terkait gagasan-gagasan baru yang datang dari seluruh dunia terutama masyarakat negara maju yang berangsur-angsur mengubah pola gagasan budaya dan agama asli suatu bangsa.

Diskursus yang terbuka dalam dimensi teknologi membahas hal-hal mengenai dinamika teknologi yang dalam perkembangannya menciptakan suatu kondisi di mana dunia diciutkan sehingga menjadi dunia tanpa batas. Tiada lagi batas-batas teritorial geografis negara di dunia, tiada lagi batasan dalam berkomunikasi dan dalam mengakses informasi. Dimensi demografi yang dimaksud merujuk kepada mobilitas dan penghijrahan manusia yang berlaku sehingga mengubah pola demografi suatu negara.

Wilson Therik (2019) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi proses globalisasi, yaitu: globalisasi ekonomi, globalisasi politik, dan globalisasi budaya. Dari segi dimensi globalisasi budaya, muncul beberapa jenis mazhab, yang dalam hal ini Therik ungkap sebagai mazhab dimensi dan kaitannya dengan ruang implikasinya, seperti: *etnospace*, *techno-space*, *finance-space*, *media-space*, *idea-space*, dan *sacri-space*. Therik menyampaikan terjadinya universalisasi sistem nilai global dalam dimensi kebudayaan telah menyebabkan kaburnya sistem nilai (values system) kehidupan manusia.

Kejadian ini diilustrasikan terjadi secara khusus pada negara-negara berkembang seperti Indonesia yang sistem nilainya mengabur, walaupun sudah menghadapi ambang era global selanjutnya. Apakah pembangunan versi “pribumisme” mampu mempertahankan hegemoni pembangunan eropasentrisme, Amerika sentrisme atau modernisasi dalam era globalisasi? demikian Therik mencoba memberikan ruang pikir dan bahan renungan bagi kita semua mengenai kegelisahan implikasi globalisasi pada dimensi kebudayaan (Therik, 2019).

Menurut Friedman (2002), globalisasi mempunyai tiga dimensi. Pertama, dimensi ide atau ideologi. Salah satu ideologi yang kerap mendominasi globalisasi adalah kapitalisme. Kapitalisme yang dimaksud Friedman termasuk seperangkat nilai yang menyertainya, seperti falsafah individualisme, demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kedua, dimensi ekonomi. Dalam dimensi ekonomi ini Friedman menyampaikan isu yang sangat relevan dengan globalisasi yaitu berlakunya pasar bebas.

Pasar bebas yang dimaksud oleh Friedman adalah adanya keleluasaan mengalirnya arus barang dan jasa antar negara. Ketiga, dimensi teknologi. Dimensi teknologi yang diungkap oleh Friedman secara khusus mengungkap mengenai teknologi informasi yang berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi yang dimaksud Friedman akan benar-benar mengubah peradaban dunia dalam aspek pengiriman dan penerimaan informasi, juga cara manusia berkomunikasi. Friedman menyebutnya sebagai dunia yang tanpa sekat (Estuningtyas, 2018).

Elizabeth L. Malone menyampaikan pemikirannya mengenai tiga dimensi umum dalam globalisasi yaitu economic globalization, political globalization dan cultural globalization (lihat Tabel 7.1). Malone menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan perubahan iklim dan globalisasi bersama sebagai topik penelitian dapat menjelaskan struktur dan proses keduanya. Teori globalisasi dan perubahan iklim dapat dikategorikan sebagai ekonomi, politik,

dan budaya pada satu dimensi, dan pada dimensi lain menekankan konflik antara tingkat global dan nasional/lokal, dominasi global, atau hibrida dan pastiches yang diciptakan oleh pencampuran yang global dan lokal (lihat Tabel 7.2).

Perubahan iklim, sebagai masalah yang menciptakan dan diciptakan oleh kesadaran global akan dunia adalah terikat, baik dalam analisis maupun proposal kebijakannya dengan masalah sama yang dihadapi para ahli teori globalisasi. Perkembangan teori dan analisis dalam globalisasi dan perubahan iklim mencerminkan sifat yang muncul dari kedua bidang pemikiran ilmiah sosial. Aktivitas dan “aliran” berubah terlalu cepat untuk dikategorikan dan dipetakan secara memuaskan.

Selain itu, tidak ada keuntungan yang jelas untuk satu bentuk tindakan, karena semua fenomena memiliki banyak segi, dengan karakteristik positif, netral, dan negatif yang digabungkan. Namun, ledakan ide dan proposal mencerminkan energi dan kemauan untuk mencari arah masa depan yang akan membawa peningkatan kesejahteraan bagi manusia dan lingkungan (Malone, 2002).

Tabel 7.1: Dimensi Globalisasi dan Ilustrasi Contohnya (Malone, 2002)

	Economic globalization	Political globalization	Cultural globalization
Global versus national or local	Nationalization of multinational industry	Resistance to WTO, Jihad	Separatism of native groups
Global domination in content/form	Flexible specialization, capitalist crisis	Transnational social movements, standard state forms	Commodification of local cultures, McDonalidization
Hybrids and pastiches	Western goods sold at bazaars	”Global village,” ”global”-scapes”	Blended musical forms

Dalam literatur terpisah, ahli teori globalisasi menyebut perubahan iklim sebagai bagian dari lingkungan global yang kabur dan seperti tertutup oleh tabir, berada di dalam kotak hitam, analisis perubahan iklim menyalahkan globalisasi untuk masalah lingkungan dan berusaha untuk memobilisasi

dukungan untuk penyebab lingkungan melalui seruan untuk kewarganegaraan dan tanggung jawab global.

Tabel 7.2: Dimensi Dari Perubahan Iklim dan Ilustrasi Contohnya (Malone, 2002)

	Economic aspects of climate change	Political aspects of climate change	Cultural aspects of climate change
Global versus national or local	GATT, ITO, NAFTA, etc. Versus national environmental standards	Modern bureaucracy clashes with national traditions, e.g., Chipko movement	Concern for global climate versus issues of responsibility for the problem and movement equity between nations
Global domination in content/form	Capitalist world system mires social and scientists some nations in poverty & vulnerability to climate change	Transnational social movements, standard date forms, "ecological modernization"	Western science and scientists define the problem & solutions
Hybrids and pastiches	Emissions trading pastiches systems, ecological economics, sustainability	Green parties seek to reduce emissions.	"Local knowledge" added to scientific knowledge

Stiglitz mengungkapkan adanya penjajahan berlebih dari globalisasi (globalization is oversold). Globalisasi dijajakan dengan harga di bawah nilai aslinya. Beberapa politisi dan ekonom mengemukakan pendapatnya dengan keliru mengenai perjanjian perdagangan atas dasar penciptaan lapangan kerja. Keuntungan terhadap *Gross Domestic Product* (GDP)—juga disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ditaksir terlalu tinggi, dan

biayanya, termasuk efek distribusi yang merugikan, tidak terlalu diperhitungkan sebagai hal yang penting.

Ada konsekuensi politik penting dari overselling ini, termasuk meruntuhkan kepercayaan pada elit yang menganjurkan globalisasi. Kegagalan globalisasi dan reaksi sesat terhadapnya memberikan kita banyak pelajaran penting: tentang pentingnya sains dan pembelajaran dalam masyarakat, pentingnya penerimaan bersama atas fakta, konsekuensi berbahaya dari kesalahan informasi yang disengaja kepada publik, dan kebodohan mengabaikan konsekuensi distribusi kekuatan ekonomi hanya karena mereka dapat menyebabkan pertumbuhan.

Proteksionisme baru yang didukung oleh pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat hanya akan memperburuk keadaan mereka yang sudah dirugikan oleh globalisasi. Yang dibutuhkan adalah sistem perlindungan sosial yang komprehensif, setelah mengatalogkan kegagalan globalisasi dan menjelaskan bagaimana hal itu menyebabkan lumpur politik di Amerika saat ini. Stiglitz menguraikan serangkaian kebijakan yang dapat mengembalikan ekonomi dan politik Amerika ke jalur yang lebih baik (Stiglitz, 2017).

Yang Ulrich Beck maksud dengan globalisme adalah pandangan bahwa pasar dunia menghilangkan atau menggantikan tindakan politik—yaitu, ideologi pemerintahan oleh pasar dunia, ideologi neoliberalisme. Hal ini berlangsung secara monokus dan ekonomis, mereduksi multidimensi globalisasi menjadi satu dimensi ekonomi yang dengan sendirinya dipahami secara linier. Jika ia menyebutkan semua dimensi lain dari globalisasi - ekologi, budaya, politik, masyarakat sipil - ia melakukannya hanya dengan menempatkan mereka di bawah kendali sistem pasar dunia.

Tentu saja, tidak dapat disangkal pentingnya sentralisasi ekonomi, juga sebagai pilihan dan persepsi para pelaku korporasi. Tetapi inti ideologis globalisme adalah bahwa ada perbedaan mendasar antara politik dan ekonomi. Tugas utama politik, yang mendefinisikan kondisi hukum, sosial dan ekologi dasar di mana kegiatan ekonomi pertama kali menjadi mungkin dan sah secara sosial, menghilang dari pandangan atau tertekan.

Globalisme menyiratkan bahwa struktur yang kompleks seperti Jerman—negeranya, masyarakatnya, budayanya, kebijakan luar negerinya—dapat dijalankan seperti menjalankan suatu perusahaan. Tetapi dalam menjalankan perusahaannya benar-benar melibatkan imperialisme ekonomi, di mana

perusahaan menuntut kondisi dasar di mana mereka dapat mengoptimalkan tujuan mereka (Beck, 2018).

7.3 Sejarah

Pemahaman yang berkembang di masyarakat awam dan pemerhati globalisasi selama ini mengenai globalisasi adalah konstruksi paradigma bahwa globalisasi yang terus berproses akan menyeragamkan seluruh dunia. Tiada lagi bunga-bunga yang beragam, tampil dengan indah di taman, yang ada hanya kesatuan warna yang menjemukan. Paranoia yang berkembang adalah adanya hegemoni kekuatan budaya besar yang senantiasa menelan dengan lahap kebudayaan-kebudayaan lokal (indigenous) sehingga yang muncul di permukaan seluruh dunia adalah identitas global. Isu mengenai identitas (politik identitas) ini adalah hal yang sangat hangat dibahas dalam kaitannya dengan proses globalisasi.

Diskursus antropologis mengenai kebudayaan dapat memberikan sumbangsih ilmiah dan pemikiran yang khas dengan mengungkapkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap diskursus tersebut, disertai menyampaikan gambaran keterlibatan kepentingan-kepentingan tersebut dalam memberikan pengaruh dan mewarnai isi dari setiap diskursus. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari konsep bahwa diskursus antropologis mengenai kebudayaan juga tidak bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu (politik, karir akademis, dan sebagainya).

Upaya untuk memahami gejala sosial budaya yang kita kenal sebagai ‘globalisasi’ perlu didukung dengan bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai kebudayaan dalam dimensi praksis dan wacana. Dengan demikian, kita bisa meresapi wujud dan konsep kebudayaan seperti yang diajukan oleh Umar Kayam sebagai: “sebuah proses, sosoknya bersifat sementara, cair, dan tanpa batas-batas yang jelas (Kompas, 2 Agustus 1995).” Dalam arti ini, perbedaan antara kebudayaan “modern” dan “tradisional,” “asing” dan “pribumi,” “Barat” dan “Timur,” “asli” dan “campuran” hanyalah merupakan perbedaan-perbedaan yang semu dan sementara (Alam, 2014).

Sudah banyak hasil penelitian dalam ranah antropologis yang mengungkapkan contoh-contoh hasil konstruksi sosial terhadap suatu bentuk kebudayaan asal (asli/native/indigenous)—dalam konteks sosial tertentu, yang mengacu pada

pemikiran, keterlibatan, dan kebudayaan pendatang (asing). Salah satu contohnya adalah wujud tari Kecak. Tari Kecak yang diyakini merupakan hasil cipta-karsa dan karya murni masyarakat Bali kemudian dikaji kembali oleh Vickers (1989) dan Yamashita (1992).

Didapatkan temuan bahwa ada pelibatan pengaruh mazhab seni dan keterlibatan langsung Walter Spies yang mencoba berkreasi dengan mengimprovisasi tari SangHyang dengan mengekspos salah satu kanda dari epos itihasa Ramayana pada tahun 1930-an. *Harian Kompas*, 15 Agustus 1997 juga mengungkap hasil penelitian Laurie J. Sears mengenai konsep filsafat wayang kulit Jawa yang apresiasinya dibangun dan berkembang setelah bersentuhan dan dibahas dengan gerakan teosofi Barat pada tahun 1910-1920 (Alam, 2014).

Tamanai (1990) mengungkapkan temuan uniknya mengenai konsep kewanitaan Jepang “Ryosai Kenbo”. Konsep khas yang menjadi pedoman ideal wanita Jepang mengenai tata krama dan konsep pengabdian yang membentuk karakter wanita Jepang yang setia, penurut, dan sebagainya ternyata dikonstruksi dan disosialisasikan oleh pemerintahan Meiji (dalam ideologi Restorasi Meiji). Konstruksi Meiji terhadap konsep “Ryosai Kenbo” ini diketahui menggabungkan nilai-nilai dan filsafat Konfusianisme dengan nilai-nilai rumah tangga Eropa Barat yang populer pada abad ke-19 dengan motivasi untuk memajukan industrialisasi di Jepang (Alam, 2014).

Beberapa temuan unik sebagai contoh yang telah diungkapkan tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya proses globalisasi tidaklah merupakan emerging issue, atau proses yang prematur, atau baru dimulai akhir-akhir ini yang ditandai dengan pesatnya akselerasi teknologi informasi dan komunikasi. Sahlins (1994) mengungkap pada dasarnya setiap manusia di dunia merupakan bagian dari masyarakat global.

Dunia saat ini dengan segala kemajuan teknologi, perangkat informasi dan komunikasi inovatif dan dinamika yang meliputinya memiliki keistimewaan bukan pada kadar ataupun intensitas proses globalisasi, namun terletak pada kejelasan, keterbukaan dan transparansi, memproyeksikan dan mengabarkan pengaruh berbagai macam kebudayaan yang berkembang di dunia. Proses globalisasi ternyata sudah ada sejak manusia mulai mengembara dan bertemu dengan manusia lainnya di belahan dunia yang berbeda.

Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, mulai dari pasca zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, masuknya Islam, hingga era imperialisme dan

kolonialisme—selalu menjadi masyarakat global, kosmopolitan di mana wadahnya menjadi suatu *melting pot*, persemaian yang subur dari pengaruh kebudayaan mancanegara dari India, Tiongkok, Arab maupun Eropa.

Dari penelusuran sejarah yang banyak dilakukan pada penelitian pendahulu ditemukan bahwa tonggak awal lahirnya globalisasi adalah revolusi elektronik dan disintegrasi negara-negara komunis (Uni Soviet). Friedman (2005) menguraikan konsep dunia tanpa batas (*flat world*) dengan ciri-ciri ranah globalnya adalah sebagai berikut:

1. Bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur (Reunification) yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin pada 1989. Peristiwa runtuhnya tembok Berlin ini juga menandai berakhirnya perang dingin, yang juga sebagai awal perubahan dan integrasi perekonomian yang pulih secara perlahan. Perkembangan teknologi mulai beranjak menuju ke arah teknologi informasi yang bersifat massal.

Salah satu capaian penting "revolusi teknologi" ini adalah pencapaian Sistem Operasi Windows yang dibuat oleh Microsoft sebagai standar minimum komputer untuk pengguna individu (Personal Computer). Pencapaian Microsoft ini kemudian juga diikuti oleh IBM.

2. Peristiwa kelahiran browser Netscape pada tahun 1995—yang awalnya dijual seharga US\$28—menandai permulaan website dan teknologi internet sebagai akar komunikasi yang mulai banyak digunakan hingga saat ini.
3. Lahir dan berkembangnya perangkat dan aplikasi/software komputer yang memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia dengan mesin dan juga komputer (*artificial intelligence*). Friedman menyampaikan tesisnya bahwa ketiga faktor tersebut sebagai fondasi konsep kolaborasi global. Bahasa SMTP (*simple transfer protocol*) dan HTML (*hypertext markup language*) telah menciptakan kemudahan bagi orang yang ingin mentransmisikan dokumen ke semua komputer di dunia.

Penemuan ini memicu gerakan kolaborasi virtual di mana satu orang dapat bekerja sama dengan yang lainnya tanpa harus berada di suatu tempat yang sama, dapat dilakukan di tempat yang berbeda.

4. Perusahaan kian marak melakukan sub kontrak atau outsourcing sebagai strategi dalam menekan biaya operasional. Outsourcing juga dianggap sebagai strategi yang paling mudah dan efektif dalam mendistribusikan barang. Konsep subkontrak ini juga dapat memilah antara jasa dan manufaktur.
5. Selain strategi outsourcing, ciri-ciri lain flat world yang dilakukan perusahaan pada era globalisasi adalah melakukan relokasi internal perusahaan atau offshoring. Realisasi strategi ini didukung dengan bergabungnya Tiongkok atau Republik Rakyat China (RRC) sebagai anggota WTO. Dampaknya adalah negara-negara lain seperti Malaysia, Mexico dan Brazil harus berkompetisi dalam bidang offshore ini dengan Tiongkok.
6. Maraknya pengunggahan aset digital, pengembangan aplikasi bebas pakai atau karya yang bersifat amal (charity) pada suatu komunitas dalam menjalankan suatu project, contohnya dalam konsep open source. Friedman mengungkapkan bahwa konsep open source ini merupakan fenomena kekuatan yang paling mengkhawatirkan pemain besar dalam industri komputer dan juga entertainment.
7. Lahir dan berkembangnya supply-chaining pada pasokan ritel modern. Friedman menyontohkan Wal-Mart sebagai salah satu usaha yang menggunakan model supply-chaining ini dalam penjualan, distribusi, dan pengirimannya.
8. Munculnya Insourcing. Friedman menggambarkan insourcing sebagai penambahan beban kerja suatu karyawan pada suatu perusahaan, namun pekerjaan yang dilakukan ditugaskan oleh perusahaan lain.
9. In-forming yang dilakukan oleh Google dan mesin pencari situs (search engine). Friedman menyampaikan bahwa tidak pernah dalam sejarah peradaban manusia seseorang memiliki kemampuan untuk mengakses informasi yang sangat banyak tentang banyak hal dalam waktu yang relatif singkat.
10. Lahirnya the Steroid atau wireless, VOIP, dan sharing file dalam dunia internet. Wawasan orang mengenai penyimpanan

(storage/deposit box) diperluas dengan kehadiran penyimpanan file dan pembagian (sharing) file dengan bantuan teknologi internet. Selanjutnya muncul teknologi perangkat bergerak (mobile devices) yang nirkabel—bisa dioperasikan tanpa membutuhkan kabel listrik (Friedman, 2005).

Selain sepuluh ciri-ciri *the flat world* yang digambarkan, Friedman juga mengatakan adanya triple konvergensi yang terjadi sampai dengan tahun 2000. Adanya suatu multifungsi yang dikelompokkan ke dalam suatu alat (complementary) seperti e-mail, mesin fax, hingga mesin fotokopi. Setelah kemunculan flatteners (seorang atau sekelompok orang yang sesuai dalam kategori penganut mazhab flat world versi Friedman), bisnis model yang baru yang berbasis inovasi seperti itu yang akan meraih sukses.

Apabila flatteners berjalan sendirian, maka tidak akan memiliki pengaruh yang tinggi, tanpa digunakan oleh orang lain. Setelah runtuhnya tembok Berlin, negara-negara yang mengikuti model ekonomi seperti Uni Soviet termasuk India, China, Rusia, dan negara-negara di Eropa, Amerika Latin, dan Asia Tengah mulai membuka ekonominya pada dunia. Pemain-pemain baru ini bergabung dengan pasar global, konvergensi ini dinamakan konvergensi ketiga yang merupakan salah satu bentuk dari bagian penting perekonomian pada awal abad ke-21.

Manusia pertama kali dikenal sebagai makhluk dengan kategori pemburu-pengumpul. Bagi manusia pemburu-pengumpul, produksi dan konsumsi berlangsung dalam ruang yang sama. Mereka memindahkan konsumsi mereka ke produksi (produksi bagi mereka berarti sumber makanan alami) karena, bagi orang yang hidup dengan teknologi zaman batu, itu lebih masuk akal. Memindahkan konsumsi ke produksi lebih mudah daripada memindahkan produksi ke konsumsi. Seiring berkembangnya teknologi, penggabungan spasial produksi dan konsumsi ini menjadi santai (Baldwin, 2018).

Dan karenanya, poin penting kedua adalah: 'Kejutan' eksogen selalu menjadi pendorong utama perubahan radikal dalam sifat globalisasi. Dalam fase modern globalisasi, penghalang buatan manusia mulai memainkan peran besar, tetapi untuk sebagian besar sejarah globalisasi, teknologi atau iklim adalah kendala yang mengikat. Secara spesifik, produksi dan konsumsi digabungkan karena tingginya biaya pemindahan barang, ide, dan orang. Biaya untuk memindahkan ketiganya akhirnya turun, tetapi tidak cepat, dan tidak sekaligus.

Baldwin membagi globalisasi menjadi 4 fase. Fase pertama disebut sebagai era Memanusiakan dunia (300.000 SM–10.000 SM). Pada masa atau fase ini terjadi perubahan iklim di dunia yang menyebabkan orang-orang keluar dari Afrika, dan orang-orang ini mengikuti kecenderungan makan, pola makan, selera, dan jenis makanan mereka, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Konsumsi dan produksi digabungkan, tetapi tidak pada suatu tempat yang tetap.

Revolusi pertanian (Neolitik) mengubah Fase 1 menjadi Fase 2. Pada Fase 2 ini disebut sebagai era Melokalisasi ekonomi global (10.000 SM–1820 M). Untuk pertama kalinya, pertanian membawa makanan kepada orang-orang yang ingin memakannya. Jika manusia menghendaki, produksi datang ke konsumsi, bukan sebaliknya.

Pada fase ini merupakan fase munculnya tujuh peradaban kuno yang sekarang dikenal sebagai Mesopotamia (Irak), Persia (Iran), Konstantinopel (Turki), Mesir, Cina, Mohenjodaro dan Harappa (India/Pakistan), dan Kekaisaran Romawi (Yunani/Italia). Untuk pertama kalinya produksi dan konsumsi dibundel di lokasi tertentu, sehingga bisa disebut 'bundling pertama'.

Revolusi uap menggeser Fase 2 ke Fase 3. Baldwin menyebut Fase 3 ini sebagai Globalisasi ekonomi lokal (1820-1990). Revolusi uap dan Revolusi Industri yang terjadi menyebabkan barang dapat dikirim secara efisien jarak jauh melalui darat dan laut. Dengan teknologi penemuan mesin uap dari James Watt ini segala alat transportasi mampu melepaskan kemampuan transportasi spektakuler yang membuatnya ekonomis untuk mengonsumsi barang-barang yang dibuat di tempat-tempat yang jauh.

Ini adalah 'pemisahan pertama' dari produksi dan konsumsi. Hal ini disebabkan oleh penurunan tajam dalam biaya pemindahan barang. Tetapi, bahkan ketika produksi tersebar secara global, itu terkonsentrasi secara lokal di tingkat pabrik dan distrik industri. Misalnya, sebagian besar Inggris mengalami deindustrialisasi selama Revolusi Industri. Cottage industries menghilang, dan semua industrialisasi terjadi di segelintir daerah yang dibatasi secara ketat.

Kombinasi pasar besar dan hiper-konsentrasi produksi akan menciptakan apa yang disebut Kenneth Pomeranz sebagai The Great Divergence dalam bukunya tahun 2001. Dengan kata lain, inilah saat (dan mengapa) negara-negara kaya saat ini menjadi kaya, sedangkan bagian dunia lainnya tidak.

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menggeser Fase 3 ke Fase 4. Baldwin menyebut Fase 4 ini sebagai Globalisasi pabrik (1990–sekarang). Pada tahap keempat, Revolusi TIK secara radikal menurunkan biaya pemindahan ide serta barang jarak jauh. Oleh karena itu, ia menurunkan biaya koordinasi kegiatan kompleks di kejauhan, yang mengubah – dan terus berubah – sifat globalisasi. Secara khusus, untuk pertama kalinya, menjadi layak secara organisasi untuk memisahkan tahapan produksi manufaktur dalam jarak jauh. Bombardier dapat membuat ekor jet bisnis di Meksiko mengetahui bahwa mereka cocok dengan badan pesawat yang dibuat di Quebec. Pabrik dapat dipisahkan secara geografis; Baldwin menyebutnya 'Pemisahan Kedua' dalam makalahnya tahun 2006, "Globalisasi: Pemisahan Besar", yang memperkenalkan perspektif yang lebih luas tentang globalisasi yang membentuk tulang punggung intelektual bukunya di tahun 2016.




Setelah pemisahan produksi ini dapat dilakukan, perbedaan besar dalam upah yang muncul selama Fase 3 membuat pemisahan itu menguntungkan. Perusahaan negara kaya mengalihkan tahapan padat karya ke negara-negara dengan upah rendah di dekatnya. Seperti yang Baldwin katakan dalam bukunya tahun 2016, ini adalah bagian penting dari 'Konvergensi Hebat' yang terjadi sekarang. Inilah yang oleh sebagian orang lain disebut munculnya negara-negara berkembang, atau 'bangkitnya sisanya'. Ini telah membawa bagian dari PDB global yang dikaitkan dengan G7 hari ini kembali ke tempatnya pada tahun 1900.

Pendekatan yang dilakukan Baldwin secara alami mengarah pada 4 fase globalisasi. Pada Fase 1, konsumsi dan produksi terjadi bersamaan karena gaya hidup “pemburu-pengumpul” berarti konsumsi berpindah ke “produksi” (yaitu sumber makanan). Pada Fase 2, konsumsi dan produksi tetap bersama tetapi hal itu terjadi karena orang-orang “membawa” makanan untuk diri mereka sendiri dengan mengembangkan pertanian.

Fase 3 adalah ketika globalisasi modern dimulai pada abad ke-19. Kapal uap dan rel kereta api (dan perdamaian dunia disebut Pax Britannica) membuatnya hemat untuk mengonsumsi barang-barang yang dibuat jauh. Dengan barang-barang dibuat di satu negara dan dikonsumsi di negara lain, perdagangan meledak. Fase 4 – yang kita jalani hari ini – dimulai ketika produksi itu sendiri dipecah dan dialihkan ke berbagai negara. Ini dikenal sebagai offshoring dan secara radikal mengubah perdagangan dan manufaktur dunia.

Fase-fase globalisasi beserta indikasi, pengaruh dan penandanya bisa kita pelajari pada rangkuman yang ditampilkan pada tabel 7.3 berikut:

Tabel 7.3: Fase Globalisasi (Pieterse, 2012)

Globalization Era	Age of Discovery (15 th -18 th)	Globalization 1.0 (19 th century-1914)	Globalization 2.0 (1945-1989)
Leading Exports (komoditi unggulan untuk diekspor)	Raw Material/Basic Goods	Textiles/Industrial Goods	Factories
Leading Nation (Negara-negara terdepan sebagai pengekspor)	 (Spanyol, Portugal, Britania Raya, Belanda)	 Britania Raya	 Amerika Serikat
Exports as % World GDP	<5%	6-14%	5-15%
Enabling Era	Scientific Revolution (15 th -17 th century)	1 st Industrial Revolution (1780s- mid 17 th century)	2 nd Industrial Revolution (1870s-1910s)
Enabling Innovation	Sailing ship, Compas	Steam engine, steamship	Aeroplane, satelite
Characterizing GDP Trend	EUROPE ↗	Great Britain ↗↗	World ↗

Bab 8

Globalisasi: Modal Sosial dan Modal Budaya

8.1 Pendahuluan

Globalisasi menyebabkan perubahan sosial budaya. Setiap masyarakat manusia selama hidupnya, pasti mengalami perubahan. Masyarakat cenderung selalu berubah, perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya (Soekanto, 1990).

Menurut pendapat Evan (2004) mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan baik yang materiil maupun yang immateriil, dengan terutama menekankan pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan yang materiil terhadap unsur-unsur immateriil. sedangkan Davis (1960) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut.

Secara singkat Soemardjan dan Soemardi (1964) mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di

dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya jika tidak direspon secara adaptif dapat menimbulkan krisis karakter. Saat ini, ada kecenderungan yang sangat kuat bahwa dalam menghadapi tantangan global masyarakat cenderung mengalami krisis yang mengarah pada kehancuran.

Sebagaimana dijelaskan oleh Licona (2014) bahwa kehidupan yang mengarah pada kehancuran ditandai oleh:

1. meningkatnya kekerasan di kalangan remaja;
2. penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk;
3. pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan;
4. meningkatnya perilaku merusak diri (penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas);
5. semakin kaburnya pedoman moral dan buruk;
6. menurunnya etos kerja;
7. semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru;
8. rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga masyarakat;
9. membudayanya ketidakjujuran, dan;
10. adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Kehancuran masyarakat tersebut mulai menjadi fenomena di Indonesia, dan juga beberapa negara di dunia. Sebagai dampak dari kehancuran sosial tersebut memicu terjadinya krisis karakter yang bersifat multidimensional.

8.2 Modal Sosial dan Modal Budaya

Modal Sosial

Menurut Putnam (1994), definisi modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. James Coleman mendefinisikan sosial kapital yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Diamond et al., 2014).

Istilah modal yang digunakan oleh Murdock (2010) bahwa sosial kapital yang memuat elemen penting seperti jaringan yang terbangun dari interaksi-relasi-jaringan. Kepemilikan modal kolektif dari modal sosial inilah yang akan mendapatkan kepemilikan modal bersama. Tanpa disadari, relasi yang terbangun menciptakan rasa memiliki antar individu atau kelompok dan hal ini akan menjadi ikatan yang berlangsung lama, beriringan dengan itu pula, segala modal dan kepemilikan di sana menjadi milik bersama (Murdock, 2010).

Capital Social (2014) mendefinisikan modal sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai.

Modal Budaya

Modal budaya terdiri dari aset sosial seseorang (pendidikan, kecerdasan, gaya bicara dan pakaian, dll.) yang mempromosikan mobilitas sosial dalam stratifikasi masyarakat. Modal budaya berfungsi sebagai hubungan sosial dalam praktik ekonomi (sistem pertukaran), yang terdiri dari semua material dan barang simbolis, tanpa distingsi, apakah masyarakat menganggapnya langka dan bernilai. Sebagai hubungan sosial dalam suatu sistem pertukaran, modal budaya merupakan akumulasi pengetahuan budaya yang memberikan status sosial dan kekuasaan (Sumiman Udu, 2017).

Modal budaya menakrifkan bagaimana manusia melibatkan diri antara satu sama lain dan sumber-sumber ekonomi. Terkait budaya organisasi yang baik atau buruk sebagai modal budaya dicipta apabila nilai, tradisi, kepercayaan dan bahasa menjadi mata uang untuk memanfaatkan modal lain. Modal budaya mempunyai tiga sub-jenis yaitu “embodied”, “objectified” and “institutionalized” (Sumiman Udu, 2017).

Modal budaya “Objectified” terdiri daripada benda-benda fizikal yang dimiliki, seperti alat saintifik atau karya-karya seni. Modal budaya ini dapat dijadikan sebagai sumber dalam hal mendapatkan keuntungan ataupun kebermanfaatannya atas sesuatu hal. Seperti pada proses transaksi membeli ataupun menjual tentunya berdasarkan kesanggupan untuk membayar atau menyelesaikannya, dan bagi maksud "simbolik". Contohnya, seseorang itu dikatakan boleh memiliki modal budaya “objectified” dengan memiliki lukisan manakala

seseorang itu dapat menggunakan lukisan hanya jika seseorang itu mempunyai asas yang betul tentang konsep modal budaya sebelumnya.

8.2.1 Jenis-jenis Modal Sosial dan Modal Budaya

Jenis-jenis modal sosial Menurut Woolcock (2001), terdapat tiga jenis modal sosial yaitu:

1. Social bounding (perekat sosial), adalah tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan, sosial bounding umumnya dalam bentuk nilai kultur, persepsi dan tradisi atau adat-istiadat
2. Social bridging (jembatan sosial), merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Social bridging bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya sehingga mereka memutuskan untuk membangun kekuatan dari kelemahan
3. Social linking (hubungan/jaringan sosial), merupakan hubungan sosial yang di karakteristik kan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat.

Ada tiga jenis modal budaya (Sutarya, 2020):

1. Modal budaya terkandung
Terdiri dari pengetahuan yang diperoleh dengan sadar dan secara pasif diwariskan, dengan cara sosialisasi lewat budaya dan tradisi. Berbeda halnya dengan properti, modal budaya jenis ini tidak dapat ditransmisikan, tetapi diperoleh dari waktu ke waktu, karena bergantung pada habitus (karakter dan cara berpikir) seseorang, yang pada gilirannya, menjadi lebih mudah menerima pengaruh budaya serupa.
Modal budaya linguistik adalah salah satu contoh modal budaya terkandung di mana penguasaan bahasa seseorang atas makna ketika berkomunikasi dan gambaran diri yang diperoleh dari budaya nasional.

2. Objektivikasi modal budaya

Terdiri dari barang properti seseorang (misalnya sebuah karya seni, instrumen ilmiah, dll.) yang dapat ditransmisikan sebagai keuntungan ekonomi (jual-beli) yang secara simbolis menyampaikan kepemilikan modal budaya tertentu, karena memiliki barang-barang tersebut. Namun, dalam kepemilikan sebuah karya seni (objektivikasi modal budaya), seorang pengguna atau pemilik karya seni, memahami makna dan landasan historis dari modal budaya sebelumnya dengan tepat.

Oleh sebab itu, modal budaya jenis ini tidak dapat ditransmisikan lewat jual-beli karya seni, kecuali jika kebetulan sang penjual barang-barang tersebut menjelaskan signifikansi karya seni tersebut kepada pembeli.

3. Modal budaya terlembagakan

Terdiri dari pengakuan lembaga formal atas modal budaya seseorang, biasanya berbentuk kualifikasi akademis atau profesional. Peran sosial terbesar dari modal budaya terlembagakan dalam pasar tenaga kerja. Hal ini merupakan ekspresi 'modal budaya' seseorang yang digunakan untuk mengukur modal budaya kualitatif dan kuantitatif dirinya (yang kemudian dibandingkan dengan ukuran 'modal budaya' orang lain).

Pengakuan suatu lembaga formal memfasilitasi pertukaran 'modal budaya' dengan 'modal ekonomi', dengan menyajikan solusi praktis di mana 'penjual' dapat menggambarkan modal budayanya kepada 'pembeli'.

8.2.2 Unsur-Unsur Modal Sosial dan Modal Budaya

Terdapat tiga unsur, komponen sumber daya dan elemen penting dalam sebuah modal sosial dan modal budaya yaitu kepercayaan (trust), nilai dan norma (norms) dan jaringan (networks) (Anyualatha Haridison, 2021).

Kepercayaan (trust)

Menurut Giddens, kepercayaan adalah keyakinan akan reliabilitas seseorang atau sistem, terkait dengan berbagai hasil dan peristiwa. Di mana keyakinan itu

mengekspresikan suatu iman terhadap cinta kasih orang lain atau ketepatan prinsip abstrak (pengetahuan teknis) (Damsar and Indrayani 2018).

Sedangkan menurut Anyualatha Haridison (2021), kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerja sama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama.

Nilai dan norma

Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan, suatu tindakan dianggap sah apabila harmonis dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan (Setiadi and Kolip, 2011). Sedangkan norma adalah aturan-aturan dalam kehidupan sosial secara kolektif atau bersama yang mengandung berbagai sanksi secara moral maupun sanksi fisik, bagi orang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran atas nilai-nilai sosial, norma ditujukan untuk menekan anggota masyarakat agar segala perbuatan yang dilakukannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama (Setiadi and Kolip, 2011).

Nilai dan norma adalah hal dasar yang terdapat pada proses interaksi sosial. Nilai dan norma mengacu pada bagaimana seharusnya individu bertindak dalam masyarakat. Norma merupakan bagian dari modal sosial yang terbentuknya tidak diciptakan oleh birokrat atau pemerintah.

Jaringan sosial

Jaringan adalah ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial) yang diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan oleh norma yang mengikat kedua belah pihak. Jaringan adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif yang berhubungan atau dikatakan sebagai suatu simpul dan ikatan (Damsar 2016).

Jaringan terbentuk karena berasal dari daerah yang sama, kesamaan kepercayaan, politik atau agama, hubungan genealogis dan lain-lain. Pembentukan jaringan masyarakat untuk mendapatkan modal sosial perlu diorganisasikan dalam suatu institusi dengan perlakuan khusus (Hariyani, 2016).

Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh, jaringan hubungan sosial biasanya akan diwarnai oleh suatu tipologis khas sejalan dengan karakteristik dan orientasi kelompok. Kelompok sosial biasanya terbentuk secara tradisional atas dasar kesamaan garis turun-temurun

(repeated sosial experiences) dan kesamaan kepercayaan pada dimensi kebutuhan, cenderung memiliki kohesif tinggi, tetapi rentang jaringan maupun trust yang terbangun sangat sempit (Hariyani, 2016).

8.2.3 Peran Modal Sosial dan Modal Budaya

Modal sosial mempunyai peran penting dalam membangun karakter bangsa, karena karakter bangsa ditentukan oleh eksistensi negara dalam menjaga identitas budaya. Keyakinan masyarakat bahwa identitas budaya mempunyai peran penting sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya dalam menjaga modal sosialnya. Hal ini senada dengan analisis yang dikembangkan oleh (Fathy, 2019).

Menurut Anyualatha Haridison (2021) atas hasil studinya tentang pemuda dan pendidikan (youth and schooling) mendefinisikan konsep modal sosial sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, baik dalam bentuk personal atau korporasi dalam suatu struktur sosial. Modal sosial menurutnya inheren dalam struktur relasi antar individu. Struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi, dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya (Fathy, 2019).

Relasi sosial dalam struktur masyarakat berperan dalam membangun identitas budaya bangsa. Dalam konteks inilah, bahwa membangun identitas budaya bangsa adalah untuk mempertahankan harga diri sebuah bangsa yang memiliki kekhasan dan keunikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu menekankan pada aspek yang berbeda bahwa modal hubungan sosial yang diperlukan akan memberikan dukungan-dukungan bermanfaat, modal harga diri dan kehormatan sering kali diperlukan jika orang ingin menarik para klien ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial, dan yang bisa menjadi alat tukar, misalnya karier politik.

Modal sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan yang bertahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang banyak terinstitusionalisasikan (Abdullah, 2013). Modal sosial dibutuhkan dalam membentuk identitas budaya bangsa. Dalam realisasinya, identitas budaya bangsa mulai tergeser dengan budaya global yang menggambarkan nilai-nilai yang bersifat universal. Karena globalisasi ditandai dengan proses

meningkatnya saling ketergantungan ekonomi, kultural, lingkungan, sosial dan lingkungan lintas negara yang bebas, serta munculnya kecenderungan bentuk dan proses homogenisasi, hibridisasi dan diferensiasi kultur (nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku masyarakat global (Zamroni, 2011). Sebagai dampak globalisasi maka identitas budaya yang mencerminkan refleksi diri atau self-image yang tiap diturunkan dari keluarga kita, gender, budaya, etnik, dan proses sosialisasi individual” semakin tidak kuat, bahkan ada kecenderungan melebur dalam budaya global. Hal ini akan cenderung berdampak pada melemahnya karakter bangsa. Artinya, krisis karakter bangsa cenderung disebabkan oleh melemah dan hilangnya identitas budaya bangsa (Zamroni, 2011)

8.2.4 Fungsi Modal Sosial dan Modal Budaya

Menurut Coleman (1988) Modal sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat;
2. memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial;
3. membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan;
4. membangun partisipasi masyarakat;
5. sebagai pilar demokrasi;
6. menjadi alat tawar menawar pemerintah.

Disintegrasi sosial terjadi karena potensi konflik sosial yang tidak dikelola secara efektif dan optimal, sehingga *termanifest* dengan kekerasan. Sebagai alat untuk mengatasi konflik yang ada di dalam masyarakat dapat dilihat dari adanya hubungan antara individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat yang bisa menghasilkan *trust*, norma pertukaran serta civic *engagement* yang berfungsi sebagai perekat sosial yang mampu mencegah adanya kekerasan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam kehidupan yang positif diperlukan adanya perubahan di dalam masyarakat. Dari modal sosial yang eksklusif dalam suatu kelompok menjadi modal sosial yang inklusif yang merupakan esensi penting dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

8.2.5 Tipe-tipe Modal Sosial dan Budaya

Menurut Woolcock (2001) menyebutkan tiga tipe modal sosial yaitu:

1. Sosial bounding (perekat sosial) nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat-istiadat. Pengertian sosial bonding adalah, tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial) dalam suatu sistem kemasyarakatan. Misalnya, kebanyakan anggota keluarga mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga lain. Hubungan kekerabatan ini bisa menyebabkan adanya rasa empati /kebersamaan.

Bisa juga mewujudkan rasa simpati, rasa berkewajiban, rasa percaya, resiprositas, pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang mereka percaya. Rule of law/aturan main merupakan aturan atau kesepakatan bersama dalam masyarakat, bentuk aturan ini bisa formal dengan sanksi yang jelas seperti aturan Undang-Undang.

Namun ada juga sanksi non-formal yang akan diberikan masyarakat kepada anggota masyarakatnya berupa pengucilan, rasa tidak hormat bahkan dianggap tidak ada dalam suatu lingkungan komunitasnya. Ini menimbulkan ketakutan dari setiap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini berakibat akan adanya sosial order/ keteraturan dalam masyarakat.

2. Sosial bridging (jembatan sosial), bisa berupa institusi maupun mekanisme. Sosial bridging merupakan suatu ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Ia bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga mereka memutuskan untuk membangun kekuatan dari kelemahan.

Sosial bridging bisa juga dilihat dengan adanya keterlibatan umum sebagai warga negara (civic engagement), asosiasi, dan jaringan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat agar masyarakat mampu menggali dan memaksimalkan kekuatan yang mereka miliki baik SDM (sumber daya manusia) dan SDA (sumber daya alam) dapat dicapai.

Kapasitas modal sosial termanifestasikan dalam ketiga bentuk modal sosial tersebut (nilai, institusi, dan mekanisme) yang dapat memfasilitasi dan menjadi arena dalam hubungan antar warga, antar kelompok yang berasal dari latar belakang berbeda, baik dari sudut etnis, agama, maupun tingkatan sosial ekonomi. Ketidakmampuan untuk membangun nilai, institusi, dan mekanisme bersifat lintas kelompok akan membuat masyarakat yang bersangkutan tidak mampu mengembangkan modal sosial untuk membangun integrasi sosial.

3. Sosial linking (hubungan/jaringan sosial). Merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya: Hubungan antara elite politik dengan masyarakat umum. Dalam hal ini elite politik yang dipandang khalayak sebagai public figure/tokoh, dan mempunyai status sosial dari pada masyarakat kebanyakan.

Namun mereka sama-sama mempunyai kepentingan untuk mengadakan hubungan. Pada dasarnya ketiga tipe modal sosial ini dapat bekerja tergantung dari keadaannya. Ia dapat bekerja dalam kelemahan maupun kelebihan dalam suatu masyarakat. Ia dapat digunakan dan dijadikan pendorong sekaligus penghambat dalam ikatan sosial tergantung bagaimana individu dan masyarakat memaknainya.

Modal Sosial harus dipelajari bersama dengan modal budaya (cultural capital), oleh karena keduanya saling berkaitan. Wadah kebudayaan adalah masyarakat, sering dipelajari dengan satu istilah yaitu sosial budaya. Dimensi kebudayaan dapat dilihat dari berbagai segi, oleh karena ia diciptakan dan disebarkan oleh manusia. Orang tidak pernah melihat gaya berat, begitu pula orang tidak pernah melihat kebudayaan dan yang tampak adalah perilaku (behaviour) saling interaksi dengan sesamanya menurut aturan tertentu yang menjadi tradisi budaya (culture tradition), sesuai warisan budaya lokal yang mereka terima dari pendahulunya. Tradisi budaya ini dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi lingkungannya.

Kebudayaan itulah, manusia melakukan dan menjalani kehidupan ini dengan menafsirkan pelbagai pengalaman hidup yang dialaminya. Warga masyarakat melakukan segala macam kerja pada lapangan hidupnya, konsep dan resep kelompoknya merupakan kearifan budaya dan dari padanya digunakan mencipta dan berkreasi. Wujud kebudayaan harus dipahami sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan dan kepercayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Fungsi dan sistem pengetahuan ini, memberi pedoman bagi masyarakat dalam hal bersikap dan berperilaku atas kontaknya dengan lingkungan alam dan sosial dimana mereka berada.

Betapa pun modal sosial, dikendali oleh sistem pengetahuan, modal budaya yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kekuatan abstrak yang mampu memaksa dan mengarahkan penduduknya untuk berperilaku atas kontaknya dengan lingkungan alam dan sosial di mana mereka berada. Betapa pun modal sosial ini, dikendali oleh sistem pengetahuan, modal budaya yang dimiliki oleh masyarakat merupakan kekuatan abstrak yang mampu memaksa dan mengarahkan penduduknya untuk berperilaku sesuai sistem pengetahuan tersebut.

Budaya progresif akan mengembangkan cara berpikir ilmiah dan melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, sedangkan puncak dari budaya ekspresif bermuara pada kepercayaan mitologis dan mistik. Pendukung budaya progresif pada umumnya dinamis dan siap digantikan oleh generasi penerus dengan penemuan-penemuan baru, sedangkan pendukung budaya ekspresif biasanya statis atau tradisional, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang sudah final (Tumanggor, 2015).

Bab 9

Globalisasi: Identitas dan Budaya

9.1 Pendahuluan

Globalisasi menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan belakangan ini. Salah satu penyebab karena globalisasi telah memberikan dampak serta perubahan dalam berbagai aspek seperti budaya, geografi, ekologi, ekonomi, teknologi, politik, dan keuangan. Apa yang dimaksud globalisasi, identitas, dan budaya? Bagaimana dampak globalisasi terhadap identitas dan budaya serta perubahannya? Bagaimana proses perubahan tersebut terjadi? Jawaban atas pertanyaan tersebut disajikan dalam tulisan di bawah ini.

Globalisasi adalah kata yang umum digunakan dalam wacana publik dan sering didefinisikan secara longgar di dalam masyarakat. Istilah globalisasi pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 1940-an. Saat ini, istilah globalisasi menjadi hal yang biasa dan digunakan untuk membahas peredaran barang, pertukaran ide yang cepat, dan pergerakan orang.

Konsep tentang globalisasi mengacu pada keterhubungan antar wilayah di dunia yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, ekonomi, teknologi, politik, dan keuangan. Meskipun konsep globalisasi merupakan sesuatu yang

terbilang baru, namun prosesnya sudah dimulai sejak abad pertama Masehi melalui interaksi perdagangan bangsa Cina dan India. Aktivitas para pedagang Arab, penjelajahan oleh bangsa Eropa, serta berbagai interaksi yang mempertemukan antara satu bangsa dengan bangsa lain merupakan contoh berikutnya dari proses globalisasi tersebut.

Secara khusus, globalisasi dikonsepsikan dengan cara beragam oleh para ahli. Beberapa definisi tersebut kemudian dapat dikelompokkan sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Pada bidang ekonomi, globalisasi diartikan sebagai perkembangan sistem perdagangan dengan melibatkan aktor transnasional seperti korporasi dan lembaga swadaya masyarakat. Pada bidang politik, globalisasi merujuk pada pertumbuhan organisasi transnasional seperti PBB, WHO, dan berbagai lembaga politik yang beroperasi secara internasional.

Di bidang teknologi, globalisasi mengacu pada fenomena di mana jutaan orang saling terhubung berkat kekuatan dunia digital melalui platform digital seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, dan aplikasi lain. Globalisasi dalam aspek keuangan dikaitkan dengan kebangkitan sistem keuangan global dengan pertukaran keuangan internasional dan pertukaran moneter. Contohnya adalah pasar saham yang terhubung secara finansial karena ketika satu pasar saham mengalami penurunan, maka akan memengaruhi pasar lain secara negatif serta ekonomi secara keseluruhan. Globalisasi secara ekologis menjelaskan gagasan untuk mempertimbangkan planet bumi sebagai satu kesatuan global. Pada aspek budaya, globalisasi mengacu pada proses interpretasi budaya yang memungkinkan suatu bangsa dapat mengadopsi budaya bangsa lain, dan kehilangan budaya mereka karena keterhubungan.

Anthony Giddens dalam bukunya *The Consequences of Modernity* mengartikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas yang jauh sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya dan sebaliknya (Giddens, 1990). Globalisasi mengacu pada semua proses di mana orang-orang di seluruh dunia dimasukkan ke dalam satu masyarakat dunia yang kemudian disebut masyarakat global (Albrow & King, 1990).

Jan Aart Scholte mengatakan globalisasi sebagai proses internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, serta hubungan transplanetari dan suprateritorialiti (Scholte, 2005). Internasionalisasi berarti peningkatan hubungan aktivitas secara internasional. Liberalisasi mengacu pada memudarnya hubungan antar bangsa. Universalisasi berarti semakin masifnya

penyebaran aspek immaterial dan material ke seluruh dunia. Westernisasi mengacu pada proses menuju keseragaman yang didominasi oleh dunia barat. Sedangkan hubungan transplanetari dan suprateritorialiti yang dimaksud Scholte yakni hubungan antar bangsa tersebut bukan hanya jalinan keterhubungan, namun mempunya ontologinya sendiri.

Globalisasi menurut Janet Abu-Lughod yakni proses berkelanjutan menjadi lebih besar dan bagian besar tersebut menjadi semakin terkait satu sama lain melalui pertukaran materi sumber daya, komoditas, dan mata uang serta melalui perluasan jangkauan geografis di mana populasi berpindah (Abu-Lughod, 1999). Abu-Lughod menambahkan bahwa proses ini melibatkan lebih banyak integrasi tidak hanya secara ekonomi dan politik, tetapi juga lebih banyak kontak pada tingkat simbolis dan budaya. Dengan demikian, globalisasi dapat mencakup peningkatan jangkauan dan kedalaman kesadaran, karena semakin banyak orang di banyak wilayah di dunia yang saling mengenal dan dapat dipengaruhi, setidaknya secara potensial, oleh gagasan, nilai, dan praktek-praktek yang berasal jauh melampaui lokalitas di mana mereka tinggal.

Pada tulisan ini, definisi globalisasi dari berbagai bidang dan tokoh yang disampaikan dalam dunia akademik tentunya tidak dapat disampaikan seluruhnya. Pada intinya ada yang melihat globalisasi sebagai perubahan yang membuat orang semakin terhubung dan saling bergantung. Ada yang melihatnya sebagai reorganisasi waktu dan ruang yang membuat pergerakan orang, benda, dan ide di sebagian besar dunia menjadi semakin cepat dan mudah. Ada pula yang melihatnya sebagai interaksi dan integrasi yang dipromosikan oleh perdagangan internasional, investasi, dan teknologi informasi.

Globalisasi adalah proses alami yang tidak bisa dihindari karena tidak ada negara di dunia yang dapat menghindari atau mengabaikannya dan mengesampingkan globalisasi hanya akan membuat suatu negara semakin terpinggirkan.

9.2 Identitas dan Budaya

Konsep identitas mengacu pada deskripsi seseorang secara kultural yang di dalamnya kita mengidentifikasi dengan melibatkan aspek emosional, menyangkut tentang persamaan dan perbedaan baik secara personal maupun sosial. Identitas dimaknai sebagai konstruksi kultural karena sumber wacana yang membentuk identitas pada umumnya bersifat kultural.

Landasan identitas adalah tentang bagaimana diri mengalami, menempatkan, berkomunikasi, serta menampilkan dirinya dalam hubungannya dengan anggota ingroup dan outgroup dalam hierarki sosial yang ada.

Pada pandangan modern, identitas didefinisikan statis seperti pendapat Stuart Hall identitas didefinisikan sebagai konstitusi yang didasarkan pada pengakuan atas turunan-turunan yang sudah dikenal dan dimiliki bersama namun tidak terbatas pada atribut-atribut etnis, bahasa, agama, sejarah, teritorial, budaya dan politik (Hall, 1996). Contohnya antara lain karya klasik Malinowski yang berjudul *Argonaut of the Western Pacific* dan karya Evans-Pritchard berjudul *The Nuer* menunjukkan bagaimana identitas dikaji dalam pemikiran yang cenderung *fixed*. Para peneliti pada masa itu melihat batas-batas identitas dengan jelas baik secara geografis maupun teritorial.

Pada pandangan pascamodern, identitas dianggap sebagai sesuatu yang fluid. Jika pandangan tradisional melihat bagaimana membangun identitas dan menjaganya tetap kokoh dan stabil, maka pada pandangan pos modern menghindari fiksasi dan menjaga pilihan tetap terbuka terhadap identitas baru. Alasannya yakni karena proses globalisasi telah membuat batas-batas antar identitas menjadi semakin kabur (*blurred*). Saat ini ketentuan apakah seseorang termasuk satu kelompok dengan kita tidak lagi ditentukan oleh batas teritorial maupun geografis lagi, namun oleh batas yang relatif lebih longgar dan abstrak.

Identitas dapat menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seseorang. Individu dapat melakukan apa saja bahkan meski harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menentukan identitasnya. Identitaslah yang menentukan seseorang bagian atau bukan bagian dari kolektif tertentu.

Identitas berhubungan dengan budaya. Budaya menjadi landasan dalam menentukan identitas. Salah satu definisi yang terbilang klasik dari Edward B. Tylor mengartikan budaya sebagai keseluruhan aktivitas manusia yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat

istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Pada tahun 1950-an Alfred L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn mengumpulkan lebih dari 179 definisi tentang budaya dari berbagai bidang ilmu termasuk antropologi, psikologi, filsafat, dan sosiologi. Setelah mengumpulkan definisi tersebut mereka mengatakan bahwa budaya terdiri dari pola, eksplisit dan implisit, dari dan untuk perilaku yang diperoleh dan ditransmisikan oleh simbol, yang merupakan pencapaian khas kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam artefak. Namun, definisi yang dikumpulkan tersebut mencakup terlalu banyak hal sehingga membuatnya kurang tajam untuk menelaah pengalaman manusia yang sangat kompleks dan rumit (Keesing, 1997).

Konsep budaya yang dalam tulisan ini mengambil pendapat Geert H. Hofstede yang mendefinisikan budaya sebagai pemrograman kolektif dari pikiran yang membedakan anggota satu kelompok atau masyarakat atau kategori atau bangsa dari yang lain (Hofstede G. H., 1980). Pikiran, menurut Hofstede mengacu pada pemikiran, perasaan dan tindakan, dengan konsekuensi untuk keyakinan, sikap dan perilaku. Dalam hal ini, nilai dan sistem nilai merupakan elemen inti dari budaya. Sementara konsep budaya dapat diterapkan pada setiap kolektivitas manusia, sering digunakan dalam kasus masyarakat yang mengacu pada bangsa, entitas etnis atau kelompok regional di dalam atau di seluruh negara (Hofstede G., 2001). Dengan demikian, budaya berkaitan dengan lingkungan yang berbeda dari suatu komunitas di mana anggotanya berbagi makna dan nilai.

Konsep budaya memiliki dua definisi utama. Di satu sisi, budaya adalah seperangkat nilai, norma, dan perilaku terpadu yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, budaya merupakan elemen identifikasi dalam kelompok individu tertentu dan elemen pembeda ketika dihadapkan dengan kelompok lain. Di sisi lain, budaya mengacu pada kreasi artistik dan simbolik, warisan dan produk budaya. Dalam kaitannya dengan globalisasi, kedua aspek ini memiliki implikasi penting sehubungan dengan bagaimana individu mengekspresikan identitas budaya mereka, dalam kaitannya dengan masa depan tradisi budaya, dan dengan industri budaya. Oleh karena itu, pada bab ini, konsep budaya mengacu pada dua aspek yang disebutkan di atas.

9.2.1 Identitas dan Budaya Pada Arus Globalisasi

Selama jutaan tahun, kelompok manusia membentangi di wilayah yang sangat luas tanpa alat komunikasi selain mengandalkan bagian tubuh fisik mereka seperti mata, suara, tangan dan kaki mereka. Dengan munculnya kota-kota metropolitan urban sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu dan dimulainya kegiatan komersial, pertukaran budaya telah terjadi antara individu yang hidup di antara berbagai masyarakat.

Namun, di masa lalu, sarana komunikasi dan transportasi terbatas dan karakteristik budaya tidak beredar secepat dan semudah di zaman modern. Dengan revolusi industri, masyarakat mulai memiliki akses ke mesin yang memungkinkan mereka menciptakan produk budaya dan mengekspornya melintasi perbatasan.

Arjun Appadurai, seorang Antropolog berkebangsaan India-Amerika mengatakan proses globalisasi berlangsung melalui lima dimensi yang melintasi batas-batas yang ada, yakni; *ethnoscapes*, *mediascapes*, *technoscapes*, *financescapes*, dan *ideoscapes* (Appadurai, 1996).

1. *Ethnoscapes* yaitu dimensi manusia yang melakukan mobile (pergerakan) seperti turis, pekerja, pengungsi. Turis misalnya bergerak melintasi batas negara dan mengunjungi sebuah tempat wisata. Di tempat tersebut terjadi perjumpaan turis dengan warga lokal yang kemudian memungkinkan pertukaran budaya.
2. *Mediascapes* yaitu dimensi media yang menyebarkan informasi seperti koran, televisi, majalah, dan studio pembuat film. Melalui televisi misalnya, informasi atau kejadian yang berlangsung di Eropa menyebar dan dapat diketahui di Indonesia. Tentu saja, media tersebut bukan hanya menyebarkan berita namun turut serta budaya. Sebaliknya, informasi tentang Indonesia juga dapat diketahui di Eropa.
3. *Technoscapes* yakni teknologi baik teknologi tinggi maupun sederhana yang bergerak dengan kecepatan tinggi melintasi batas-batas yang dulu ada. Berbagai teknologi yang digunakan misalnya mobil merupakan hasil teknologi yang pada mulanya berasal dari negara industri seperti Amerika, Jepang, dan Eropa. Teknologi

tersebut kemudian menyebar hingga kemudian dipakai di berbagai negara di seluruh dunia.

4. Financescapes yakni dimensi yang berhubungan dengan keuangan antara lain pasar saham, dan perdagangan internasional. Melalui pasar saham, dana investor dari satu negara dapat melintas batas dan digunakan untuk investasi di negara lain.
5. Ideoscapes menurut Appaduari yakni serangkaian imaji yang berhubungan langsung dengan ideologi negara dan kontra-ideologi dari gerakan-gerakan yang secara eksplisit ingin merebut kekuasaan negara atau sebagian kekuasaan itu. Contohnya antara lain radikalisme yang disebar ke seluruh dunia.

Dalam kaitannya dengan persebaran (difusi) budaya serta percampuran kebudayaan (akulturasi), pendapat George Ritzer tentang *Globalization of Nothing* layak untuk didiskusikan. Menurut Ritzer sesuatu yang *nothing* lebih mudah untuk menyebar dan diterima oleh masyarakat dengan pemilik budaya berbeda jika dibandingkan dengan sesuatu yang *something* (Ritzer & Goodman, 2008). “Nothing” menurut Ritzer yakni bentuk-bentuk kosong yang dikandung dan dikendalikan secara terpusat dan relatif tanpa isi yang khas. Sebaliknya, *something* didefinisikan sebagai (sebagian besar) bentuk penuh yang dipahami dan dikendalikan secara asli dan relatif kaya akan konten yang khas.

Misalnya, seseorang mengunjungi wilayah yang memiliki kebudayaan berbeda akan lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat jika dia tidak membawa serta budayanya yang khas pada tempat baru tersebut. Sebaliknya, dia akan semakin sulit untuk diterima jika membawa serta budayanya yang khas. Seseorang Eropa yang terbiasa dengan pakaian terbuka sebagai bagian dari kebudayaannya akan ditolak masuk Aceh jika dia membawa serta budaya berpakaianya tersebut. Sebaliknya, ia relatif akan lebih mudah diterima jika budayanya tersebut tidak turut “dibawa” atau *nothing*.

Pendapat Ritzer tersebut tentu bukan sesuatu yang statis. Dalam dunia pasca modern, wacana menjadi salah yang membantu proses meleburnya sesuatu yang *something* ke dalam budaya yang berbeda.

Proses globalisasi yang menghubungkan kebudayaan telah memberikan dampak perubahan budaya. Dampak tersebut dikenal dengan Skenario 3H yakni homogenisasi, heterogenitas, dan hibridisasi.

9.2.2 Homogenisasi

Dalam pandangan homogenisasi, proses globalisasi akan membentuk sebuah budaya global yang menganut persamaan nilai, norma dan produk budaya. Budaya global tersebut kemudian menimbulkan standarisasi budaya. Batas-batas antar budaya menjadi sangat lemah jika dibandingkan proses arus global yang lebih kuat. Dalam pandangan yang ekstrem, homogenisasi, mendorong kemungkinan budaya lokal dibentuk oleh budaya lain yang lebih kuat atau budaya global (Ritzer G., 2010). Perspektif ini kemudian memunculkan konsep seperti Westernisasi, McDonaldisasi, Amerikanisasi, dan Budaya Global. Dengan demikian, globalisasi yang merupakan replikasi dari tradisi budaya Amerika atau Barat (Berger, 2002), dianggap sebagai kekuatan destruktif, yang dapat menjadi bencana budaya (Jaja, 2010) dan serangan terhadap budaya lokal yang tidak mampu menahan atau melawan (Berger, 2002). Hal ini disebabkan karena globalisasi turut andil dalam meniadakan identitas dan menghancurkan tradisi dan praktik budaya lokal, menipiskan, bahkan menghilangkan keunikan budaya nasional, dan membentuk budaya dunia yang homogen.

Jaja menekankan bahwa dunia saat ini sedang mengalami Amerikanisasi, bukan globalisasi dengan yang sebelumnya mengacu pada penyebaran global dominasi dan budaya Amerika yang berpengaruh melalui pertumbuhan drastis komunikasi massa dan penetrasi perusahaan Amerika di negara lain. Faktanya, tampaknya ada hegemoni Amerika yang tercermin dari dominasi internet karena 85% halaman web berasal dari Amerika Serikat dan perusahaan Amerika menguasai 75% pasar paket perangkat lunak dunia (Jaja, 2010).

Para pendukung perspektif ini meyakini pada suatu saat akan terjadi keragaman budaya di seluruh dunia. Dalam perspektif pembangunan khususnya teori modernisasi mengasumsikan, masyarakat dunia ketiga harus mengikuti proses modernisasi yang ada di Eropa dan Amerika untuk menjadi negara maju. Modernisasi tersebut bukan menjadikan negara terbelakang menjadi makmur, namun sebaliknya hanya menjadi konsumen bagi produk-produk modernisasi negara maju. Sebagai sebuah wacana, modernisasi ternyata mendorong pada homogenisasi.

9.2.3 Heterogenitas

Pada pandangan ini, globalisasi dianggap akan menghasilkan keadaan heterogen yang mengacu pada struktur jaringan di mana simpul cenderung terhubung satu sama lain dalam kaitannya dengan dimensi budaya tertentu (Matei, 2006). Sosiolog asal Hongkong, Cheri Shun-Ching Chan membagi heterogenitas ini kedalam dua jenis yakni heterogenitas di tingkat lokal dan heterogenitas di tingkat global atau translokal (Chan, 2011). Heterogenisasi di tingkat lokal mengacu pada situasi di mana praktik lingkup kehidupan di lingkungan atau lokal tertentu menjadi lebih beragam selama periode waktu tertentu. Heterogenisasi di tingkat trans-lokal atau global mengacu pada situasi di mana praktik kehidupan di setidaknya dua lokal menjadi lebih berbeda selama periode waktu tertentu.

Menurut perspektif heterogenitas, budaya tidak terpengaruh oleh arus global dan globalisasi secara umum, namun inti budaya yang sebenarnya tetap utuh dan tidak terpengaruh, dan hanya permukaan dan pinggiran budaya saja yang terkena dampak langsung (Ritzer G., 2010). Globalisasi hanya menghapus budaya lokal, dan mengubah sebagian dari sifat mereka pada sisi yang lain ternyata menguatkan (Robertson, 2001).

Pada intinya, perspektif heterogenisasi meyakini bahwa masyarakat di dunia tidak seluruhnya menerima perubahan akibat globalisasi, karena sebagian dari mereka masih memegang teguh budaya lokalnya. Globalisasi tidak serta merta menjamah seluruh aspek sehingga budaya tidak akan menjadi homogen dan tetap bersifat heterogen, karena budaya global dan lokal dan dapat berjalan beriringan. Heterogenitas budaya kemungkinan besar akan tetap kuat meskipun ada globalisasi. Yang mungkin akan berubah hanyalah kriteria yang digunakan oleh kelompok budaya yang berbeda untuk menentukan identitas dan perbedaan mereka dengan budaya lain.

9.2.4 Hibridisasi

Menurut pandangan hibridisasi, arus eksternal dan internal berinteraksi untuk menciptakan hibridisasi budaya yang unik yang mencakup komponen keduanya (Ritzer G., 2010). Hambatan untuk arus eksternal budaya memang ada; namun, meskipun mereka cukup kuat untuk melindungi budaya lokal dari kewalahan oleh pertukaran eksternal, mereka tidak cukup kuat untuk sepenuhnya menahan arus eksternal.

Produk akhir dari globalisasi budaya adalah integrasi dari budaya global dan lokal (Ann Cvetkovich, 1997) yang menghasilkan sebuah budaya hibrida baru yang tidak memiliki kecenderungan terhadap budaya global maupun budaya lokal (Ritzer G., 2010). Sementara itu menurut Robertson, globalisasi adalah campuran kompleks atau campuran homogenisasi dan heterogenisasi sebagai lawan dari proses homogenisasi yang luas (Robertson, 2001).

Pada catatan lain, selaras dengan pandangan hibridisasi, Arjun Appadurai berpendapat bahwa globalisasi merupakan proses diferensiasi dan interkoneksi. Oleh karena itu, dunia tidak boleh dicap sebagai jaringan monolitik yang menyebar ke seluruh dunia, melainkan sebagai kumpulan lanskap sosio-teknobudaya yang sebagian tumpang tindih (Appadurai, 1990).

Beberapa contoh hibridisasi misalnya kehadiran identitas orang Asia-Amerika, Mexico-Amerika, Indo-Cina. Untuk lingkup lokal, hibridisasi misalnya seperti identitas Pujakesuma (Putra Jawa Kelahiran Sumatera), Orang Minang-Batak, dan lain sebagainya.

Globalisasi telah menyebabkan perubahan konsep kebudayaan yang pada awalnya memiliki batas-batas yang jelas menjadi sesuatu yang kabur dan sangat kompleks. Hal ini menyebabkan kebudayaan dan identitas sebuah kelompok masyarakat, yang pada awalnya sangat jelas, kini menjadi susah untuk diidentifikasi. Misalnya, pada saat ini kita sangat susah menentukan mana yang murni menjadi khas milik suatu kelompok masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebudayaan yang kita kenal saat ini telah melalui proses akulturasi dengan berbagai budaya lain yang pernah berinteraksi. Sebagai contoh sederhana misalnya bentuk pakaian yang kita pakai sehari-hari merupakan hasil difusi kebudayaan yang mungkin sudah sangat susah dicari pemilik aslinya.

Oleh sebab itu, untuk melihat kebudayaan dalam konteks globalisasi dapat menggunakan konsep “budaya yang termediasi” (Mazzarella, 2004). Menurut konsep ini, identitas dan kebudayaan dapat diidentifikasi dengan cara *mirroring* atau memantulkannya ke media. Menurut Mazzarella, informasi budaya di media akan membuat kelompok masyarakat mengambil jarak dengan identitasnya. Namun selanjutnya, seiring dengan semakin intimnya relasi kelompok masyarakat tersebut dengan media, mereka mengakui keberadaan identitas akan identitas awal yang dimiliki dan perbedaannya dengan identitas yang diusung oleh kelompok lain.

Bab 10

Etika Pembangunan

10.1 Pendahuluan

Perkembangan peradaban sebuah negara, tergantung pada masyarakat yang berada di dalamnya. Jutaan manusia yang saling berinteraksi, dengan memiliki kehidupan di bawah standar seperti misalnya kemiskinan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, cara pengentasan kemiskinan, kemajuan program pembangunan. Hal tersebut merupakan harapan untuk mendapatkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik hal-hal yang bersifat jasmani maupun rohani, ketersediaan rumah yang layak, kebutuhan hidup sehari-hari, infrastruktur serta akses pelayanan kesehatan, serta program perkembangan pembangunan dengan ditunjukkannya upaya pengukuran yang meliputi pendapatan nasional, serta produksi yang mengalami peningkatan. Semakin maju sebuah negara, akan ditunjukkan upaya pengukuran yaitu dengan memperlihatkan keadaan sosial, budaya, kelembagaan serta kemajuan dari perkembangan psikologi yang berhubungan dengan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara.

Oleh karenanya pembangunan diharapkan adanya unsur kualitas hidup serta perkembangan masyarakat dengan mempromosikan semua manusia dengan segala kesempatannya untuk menunjukkan jati dirinya, maka diperlukannya etika pembangunan, yang syarat dengan nilai normatif demi kesejahteraan masyarakat luas.(Denis Goulet, 1996).

Dalam upaya melaksanakan program-program pembangunan, hendaknya berfokus kepada kepentingan dari kebutuhan masyarakat untuk memiliki kualitas kehidupan yang lebih maju serta berkembang. Upaya ini perlu dipikirkan dengan sangat serius dan cermat oleh pemerintah pusat bila merencanakan program pembangunan secara nasional. Dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dijauhkan dari ketimpangan antara wilayah yang satu dengan lainnya. Dalam pembangunan tersebut perlu juga dipastikan pertumbuhan ekonomi juga didukung, serta mengantisipasi adanya kesenjangan sosial, dan dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang makin meningkat. Dengan demikian pembangunan memang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat tersebut.

Masyarakat yang hidup di bawah kemiskinan mereka yang memiliki mendominasi jumlah sebagai penduduk di negeri ini, merekalah yang terkadang menikmati hasil pembangunan yang minim. Masyarakat ini hanya sebagai objek untuk mendapatkan bantuan sosial yang diperoleh dari para dermawan yang tergerak hatinya menolong rakyat miskin. Namun sesungguhnya tidak menikmati hasil pembangunan secara nyata. Oleh karena itu orientasi pembangunan harus fokus diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat, yaitu dengan melatih mereka menciptakan usaha-usaha yang akan mengarahkan dan menggali potensi mereka yang tersembunyi selama ini.

Hal ini diperlukan kepekaan dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan yang beretika. Kepekaan pemerintah dalam menggali potensi yang tersembunyi di masyarakat, hal itu sangat penting. Karena pemerintah akan mengorientasikan dengan masalah dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, yaitu dengan memberdayakan mereka. Di mana masyarakat diberi kesempatan untuk memperluas ide dan gagasannya, berdasarkan setiap persoalan dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang selalu dihadapinya melewati aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya.

10.2 Kajian Literatur

Pembangunan berdasarkan etik

Pembangunan yang berlandaskan Etik, yaitu bahwa pelaksanaan program pembangunan berkembang semakin pesat, yang telah dimulai dari dorongan moral untuk menghapus kemiskinan, dengan upaya peningkatan pendapatan, yang mencakup perbaikan kesehatan, penjagaan keamanan dan perdamaian, mengatasi pertentangan dan kekerasan antar-golongan serta pemerataan pembagian "biaya pembangunan", guna mencegah hal yang tidak seimbang dan tidak adil antar-golongan, yang ada di antara seluruh warga masyarakat (Sajogyo, 2004), semisal tidak ada lagi perbedaan pola pembangunan yang bersifat Jawa Sentris.

Arti pembangunan

Pembangunan banyak dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan warga negara. Kata meningkatkan atau memajukan ini sering diarahkan pada kemajuan pada pertumbuhan ekonomi (economic growth) atau material. Sehingga penilaian kemajuan suatu negara akan dilihat sejauh mana negara tersebut mengalami kemajuan bidang ekonomi (Budiman, 1995).

Etika pembangunan sering kali berkaitan dengan masalah sistem nilai dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Di mana di dalamnya terdapat upaya untuk mengevaluasi, menganalisis, lintasan (trajectory) yang ada di dalam masyarakat dengan mengacu kepada kondisi penderitaan (suffering) masyarakat, berupa ketidakadilan, eksklusivitas masyarakat dalam skala global. Di sinilah etika pembangunan sebagai alat untuk pengujian nilai-nilai etis terhadap teori, perencanaan, serta praktik pembangunan yang bertujuan untuk mendiagnosis adanya konflik nilai, menganalisis kebijakan serta pelaksanaan pembangunan itu sendiri. (Goulet, 1997 dalam St. Clair, 2011).

Secara sederhana, kajian etika pembangunan berusaha untuk memasukkan nilai-nilai etis (kebaikan) sebagai pertimbangan dalam melakukan pembangunan, sebagai usaha sadar dan terencana untuk mencapai kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

10.2.1 Tujuan Etika Pembangunan

Etika Pembangunan bertujuan untuk menghindari pembangunan yang tidak etis yaitu hanya berfokus pada salah satu aspek kehidupan dan

mengakomodasi kepentingan salah satu pihak/stakeholder) sehingga dapat meminimalisir dampak negatif proses dan hasil pembangunan, serta meminimalisir pembangunan yang tidak merata.

Oleh karenanya dalam konsep etika pembangunan, menurut Budiman (1995) ada teori yang dikemukakannya yaitu Teori Modernisasi. Dijelaskan di sana bahwa faktor nilai budaya manusia itu sebagai indikator pokok persoalan dalam pembangunan. Dan teori ini telah mengkaji masalah pembangunan yang terjadi di Indonesia. Teori tersebut banyak diikuti oleh negara-negara berkembang. Dan teori tersebut banyak diilhami oleh konsep-konsep evolusi di mana perubahan sosial masyarakat pada dasarnya merupakan pergerakan yang searah atau linier, berupa masyarakat yang primitif/terbelakang atau tradisional ke arah yang lebih maju dan modern.

Konsep dasar Teori Modernisasi adalah persoalan kemiskinan, pengangguran dan masalah lainnya seperti keterbelakangan suatu negara yang disebabkan oleh faktor-faktor internal negara tersebut. Faktor tersebut meliputi tingkat pendidikan yang rendah, budaya yang tidak menghargai waktu, dan karakter yang buruk dalam bermasyarakat. Sehingga teori ini menganggap bahwa suatu negara tidak maju atau menjadi modern karena faktor penghambat dari dalam negara tersebut.

Dengan melihat faktor penghambat pembangunan tersebut, Teori Modernisasi melihat bahwa faktor penghambat ini harus dibenahi terlebih dahulu, baik dengan peningkatan pendidikan, menghapus budaya yang dianggap tidak mensupport pembangunan, serta pembenahan struktur sosial yang mendukung pembangunan (Daris Yulianto, 2014).

10.3 Moral dan Etika Pembangunan

Moral dan Etika dalam Pembangunan mencakup tidak menghalalkan segala cara dalam mencapai idealisme pembangunan yang diharapkan, sebab hal tersebut akan merusak dasar dan tujuan pembangunan. Oleh karenanya dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya revolusi mental dengan kesetiaan kepada negara, bangsa, pemerintah, dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai arahan pemimpin yang diberi otoritas. Selain itu diperlukan sikap dan mental yang dipenuhi kejujuran terhadap diri sendiri, institusi, rekanan kerja, dan masyarakat banyak dengan tetap menjaga

integritas dalam semua bidang yang dikerjakannya (Sondang P. Siagian, 1978).

Pada awal tahun 2000-an masyarakat di beberapa daerah di Indonesia menyambut antusias adanya isu otonomi daerah. Mereka berharap dengan adanya otonomi daerah, nasib mereka akan menjadi lebih baik karena pemerintah lebih fokus membangun daerahnya. Namun, rupanya cita-cita reformasi yang hendak menciptakan suasana demokratis masih terus berproses menuju idealismenya. Beberapa tempat di Indonesia masih identik dengan kemiskinan dan rakyat tidak memiliki kesejahteraan di tanahnya sendiri.

Oleh karenanya dalam menciptakan pemerataan pembangunan, maka pemerintah lewat para anggota legislatif yang mewakili aspirasi konstituennya, perlu kepekaan untuk mendengar suara masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan selama ini. Seperti halnya pernyataan (Jim Ife 2002), bahwa pelaksanaan pembangunan itu harus berbasis masyarakat, dengan melaksanakan program-program yang terarah dan terukur, karena ke semuanya hanyalah demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pembangunan partisipatif menjadi cocok dan tepat sasaran bagi masyarakat dari berbagai golongan dalam merasakan dampak pembangunan itu (Helena Anggraeni (Reni) Tjondro Sugianto, 2018).

10.3.1 Etika Pembangunan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Kondisi masyarakat dalam tingkat sejahtera itulah idealisme dalam kondisi sebuah negara, itu sebabnya negara yang peduli rakyatnya akan mengupayakan sedemikian rupa yaitu tujuan kesejahteraan rakyat harus tercapai, dengan waktu yang telah dipikirkan secara matang. Berkaitan dengan definisi yang terdapat di dalam KBBI maka arti sejahtera itu sendiri adalah ketenteraman, keselamatan kesentosaan, serta sukacita. Yang maksudnya adalah, kondisi masyarakat dalam keadaan makmur, memiliki kondisi kesehatan yang bagus, serta kehidupan yang tenteram.

Sebuah buku berjudul *Indonesia Macroeconomic Outlook (2009)* yang diterbitkan Universitas Indonesia, menyatakan bahwa kondisi masyarakat sejahtera adalah kondisi masyarakat yang merasakan kebutuhan yang dipenuhi oleh negara, baik soal jasmani dan rohani, bahkan pendidikan, pensiun, tunjangan hari tua, kesehatan. Adanya perlakuan masyarakat yang adil tanpa melihat jenis kelamin.

Penghargaan posisi wanita yang sama dengan pria (emansipasi berjalan), di sinilah kondisi makmur berjalan secara utuh. Kehidupan yang dipenuhi sejahtera ini akan tampak dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan, yang akibatnya kecil kemungkinannya muncul penyakit bahaya dan menular, kesadaran masyarakat akan lingkungan yang asri serta tampak kehijauan. Bahkan dijumpai dalam kompleks perumahan, kesadaran masyarakat hidup sehat itu terlihat dengan penyediaan tempat sampah, menanam tanaman hias, sehingga dapat terlihat kontribusi masyarakat dalam ikut serta melaksanakan proses pembangunan yang sebenarnya bertujuan mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memahami Masyarakat

Dalam persoalan Etika Pembangunan. Penting untuk pemerintah memahami kondisi masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat tersebut mempunyai pergumulan sendiri dalam kehidupannya, dan persoalan itu sangat rumit. Untuk memahami masyarakat tersebut maka, Soerjono Soekanto (1990) berpendapat bahwa ciri-ciri mereka sebagai berikut:

1. Kecenderungan manusia itu hidup berkomunitas, karena memang manusia diciptakan tidak sendiri, namun perlu orang lain untuk mendukung, menegur maupun menguatkan dalam kehidupan sehari-hari
2. Berinteraksi dengan manusia yang lain dalam waktu yang tidak sebentar. Akibat manusia itu bergaul dan berinteraksi yang cukup lama, maka memunculkan manusia-manusia atau masyarakat yang baru, dan memunculkan ide dan gagasannya dalam hidup, berupa nilai, etika, aturan-aturan yang membuat hidup jadi tertib serta lahir pola kepemimpinan, guna keteraturan di hidup masyarakat itu sendiri. Pola interaksi manusia ini sangat berbeda dengan pola interaksi binatang yang tidak akan mungkin menghasilkan ide dan gagasannya guna membuat kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Manusia diberi akal dan pikiran oleh Tuhan yang digunakan untuk bekal aktivitas kehidupannya.
3. Karena manusia diciptakan untuk berinteraksi, yang selalu diharapkan dalam hidupnya adalah keharmonisan. Kegiatan hidup yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar melahirkan sebuah

institusi, dan ada ikatan batin di antara mereka. Oleh karenanya akan muncul sebuah sikap dari masyarakat tersebut yaitu sikap simpati, empati, belas kasihan, mengampuni. Prinsipnya ada rasa saling (memberi, menerima, mendukung, mencintai dan dicintai) di antara masyarakat tersebut. Ini adalah perwujudan sebagai diumpamakan satu tubuh kalau dipersepsikan seperti halnya yang memiliki kelengkapan alat tubuh.

4. Masyarakat yang hidup bersama-sama melahirkan budaya, karena di antara mereka itu ada ikatan batin satu dengan yang lainnya.

Maka didasarkan pada hal-hal keempat di atas, maka ada 4 hal yang memungkinkan muncul masyarakat, antara lain:

1. Bahwa setiap adanya manusia yang berkumpul maka terikat perasaan dan batinnya.
2. Adanya kecenderungan, bila masyarakat tinggal di suatu wilayah dengan kondisi geografis yang sama, memiliki ciri dan kelompok yang menyatu.
3. Kehidupan yang bersatu baik sosial dalam waktu dengan sangat lama kemudian.
4. Menyepakati norma serta peraturan dalam mengatur aktivitas hidup mereka.

10.3.2 Upaya Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pembangunan

Etika pembangunan selalu berorientasi kepada kemakmuran masyarakat itu sendiri. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, dalam upaya rakyat menjadi makmur antara lain adalah: tetap menjaga nilai-nilai kesatuan dan kesehatan masyarakat yang didasarkan nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Antara lain membangun potensi yang ada di masyarakat berupa, gotong royong, musyawarah, kreatif serta mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak sebagai pertanggungjawaban kita kepada sang pencipta.

Bahkan tetap memiliki nilai-nilai hidup kehidupan sosial yang nyaman, teratur dan sehat. Membangun kondisi masyarakat yang sehat, memahami kesehatan

itu sendiri dengan konsumsi makanan 4 sehat dan 5 sempurna, dengan demikian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan akan tercapai (Serafica Gischa, 2021).

Dalam kaitan Etika Pembangunan, hendaknya berorientasi kepada usaha pemberdayaan masyarakat berdasarkan kekuatan yang dimiliki, yaitu menggali potensi yang tersembunyi, maka diperlukan kepekaan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam program-programnya melaksanakan pembangunan, demi tercapainya etika pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan etika pembangunan yang efektif, seharusnya mengarah kepada pola pembangunan akhlak mulia yang meliputi: Kejujuran, tidak curang, berintegritas, memegang prinsip, komitmen, mengejar keunggulan, dapat diandalkan serta dapat dipertanggungjawabkan (accountability), tulisan ini merupakan gagasan kritis melihat pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang di Indonesia yang telah terjadi selama ini, yang semoga dapat menjadi rambu etika, refleksi dan koreksi dalam pembangunan Indonesia demi kesejahteraan masyarakat selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2013) 'Potensi dan Kekuatan Modal Sosial dalam Suatu Komunitas', *SOCIUS : Jurnal Sosiologi*.
- Abu-Lughod, J. L. (1999). New York, Chicago, Los Angeles: America's Global Cities. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Aditjondro, G. J (2003). Korban-Korban Pembangunan ; Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Alam, B. (2014) 'Globalisasi dan perubahan budaya: perspektif teori kebudayaan', *Antropologi Indonesia*.
- Albrow, M., & King, E. (1990). *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage.
- Alwi, Hasan, (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Penerbit Balai Pustaka.
- Amru, D. S. and Sihaloho, E. D. (2020) 'Pengaruh Pengeluaran Per Kapita Dan Belanja Kesehatan Terhadap Angka Kesakitan Di Kabupaten/Kota Se-Pulau Jawa.', *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 14(1), pp. 14–25. doi: 10.32812/jibeka.v14i1.135.
- Amruddin (2021). *Deprivasi Sosial-Ekonomi dan Strategi Nafkah Petani pada Desa Perbatasan Kota (Studi Kasus di Desa Kanjilo Kabupaten Gowa)*. Disertasi Pascasarjana UNM. Makassar.
- Anderson B (1983) *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso, London

- Ann Cvetkovich, D. K. (1997). *Articulating The Global And The Local: Globalization And Cultural Studies*. New York, London: Routledge.
- Anyualatha Haridison (2021) 'MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN', *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*. doi: 10.37304/jispar.v2i2.363.
- Appfel-Marglin, F. and S. Marglin (eds) (1996) *Decolonizing knowledge: from development to dialogue*. Oxford: Clarendon.
- Appaduari, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Appadurai, A. (1990). *Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. Theory, Culture, and Society*, 295-310. doi:<https://doi.org/10.1177/026327690007002017>
- Askar Jaya, 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Dalam http://File.Upi.Edu/Direktori/Fip/Jur._Pend._Luar_Sekolah/195207251978031-Ace_Suryadi/Askar_Jaya.Pdf
- Badan Pusat Statistik (2014) 'Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)', *Badan Pusat Statistik*, pp. 1–172.
- Baldwin, R. (2018) *A long view of globalisation in short: Part 1 of 5*. Available at: <https://voxeu.org/content/long-view-globalisation-short-part-1-5> (Accessed: 29 May 2021).
- Bappenas et al. (2012) 'Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender'. Available at: <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/6a361-buku-1-stranas-pprg.pdf>.
- Barker, Chis dan Jane, Emma. A. (2021) *Kajian Budaya, Teori dan Praktik (edisi Kelima)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bauman, Z. (1992) *Intimations of postmodernity*. London: Routledge.
- Beck, U. (2018) *What is globalization?* John Wiley & Sons.
- Berger, P. and T. Luckmann (1967) *The social construction of reality*. London: Allen Lane.

- Berger, P. L. (2002). *The Cultural Dynamics of Globalization*. In S. P. Peter L. Berger, *Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World*. London: Oxford University Press.
- Booth, D. (1994b) 'How far beyond the impasse?', in Booth (ed.), pp. 298–311.
- Brasz, H.A. (1985). *Beberapa Catatan Mengenai Sosiologi Korupsi*, Jakarta : LP3ES.
- Budiman, Arief, (1995). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta : Pustaka Utama Gramedia.
- Budiman, Arief. (1995). "Teori Pembangunan Dunia Ketiga". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budimanta, A. (2005), *Memberlanjutkan Pembangunan di Perkotaan melalui Pembangunan Berkelanjutan dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 2*. (tanggal 17 November 2015), M. Zaini, Agus Tri Darmawanto, 2015. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*, JIEP-Vol. 15, No 2 November 2015 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
- Campbell J (1988) *The power of myths*. Doubleday, Garden City
- Capital, Social' (2014) in *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research*. doi: 10.1007/978-94-007-0753-5_100366.
- Chalkley A (1968) *A manual of development journalism*. Press Foundation of Asia, Manila
- Chan, C. S.-C. (2011). *Divorcing localization from the divergence paradigm: Localization of Chinese life insurance practice and its implications*. *International Sociology*.
- Childers E, Vajrathon M (1968) *Development support communication for project support*. Paper. UNDP, Bangkok
- Clarke, G. (1998) 'Non-governmental organizations and politics in the developing world',
- Coleman, J. S. (1988) 'Social Capital in the Creation of Human Capital Social Capital in the Creation of Human Capital' *AJS Volume 94 Supplement S95-S120 S95*, Source: *American Journal of Sociology*.

- Corbridge, S. (ed.) (1995) *Development studies: a reader*. London: Edward Arnold.
- Dahl, G. (2008) 'Words as moral badges: a flow of buzzwords in development aid', in B. Hettne (ed.), pp. 172–99.
- Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional, Dalam Jurnal *Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 1 April 2020 hlm. 39-50
- Dampak Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi JK, Dalam <http://geomore.org/2019/12/c-dampak-sosial-budaya-ekonomi-dan-lingkungan-pembangunan-infrastruktur-pemerintahan-jokowi-jk/>
- Damsar and . I. (2016) 'KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA MINANGKABAU ATAS PASAR', *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. doi: 10.25077/jantro.v18i1.52.
- Damsar, D. and Indrayani, I. (2018) 'Local wisdom based disaster education in Minangkabau society', in *MATEC Web of Conferences*. doi: 10.1051/mateconf/201822904017.
- Davis, K. (1960) 'Population and Welfare in Industrial Societies', *Health Education & Behavior*. doi: 10.1177/109019816000100901.
- Diamond, L. et al. (2014) 'Reconsidering the transition paradigm', *Journal of Democracy*. doi: 10.1353/jod.2014.0018.
- Emil Salim, 2010. *Pembangunan Berkelanjutan*, Dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan--tujuan-dan-indikator?page=all>
- Estuningtyas, R. D. (2018) 'Dampak Globalisasi Pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir Dan Ideologi Serta Tantangan Dakwahnya', *Institut Agama Islam Negeri Kendari*, No 2.
- Evan, W. M. (2004) 'Voting technology, political institutions, legal institutions and civil society: A study of the hypothesis of cultural lag in reverse', *History and Technology*. doi: 10.1080/0734151042000240809.
- Falikhah N., 2013. *Permasalahan Kependudukan Di Provinsi Kalimantan Selatan*. *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 12 No. 24, Hal 77-92
- FAO (1984) *Expert consultation on communication for development*. FAO, Rome

- Fathy, R. (2019) 'Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. doi: 10.22146/jps.v6i1.47463.
- Fauzi. A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*,
- Ferina Ardhi Cahyani (2020) 'Sustainable Development', *Indonesian State Law Review*, 2(2), pp. 168–179.
- Flint W (2007) *Sustainability manifesto. Exploring sustainability: getting inside the concept*. http://www.eeeee.net/sd_manifesto.htm. Accessed 21 July 2015
- Frank, A.G. (1971) *Sociology of development and underdevelopment of sociology*. London: Pluto.
- Frank, Andre G. 1966. "The Development of Underdevelopment." In *Development Studies: A Reader*, by Stuart Corbridge. ed. 1995. p. 27-37. London: Arnold.
- Frank, Andre G. 1981. *Reflections on the World Economic Crisis*.
- Fraser C, Restrepo-Estrada S (1998) *Communicating for development. Human change for survival*. I.B. Tauris, London
- Fraser C, Villet J (1994) *Communication – a key to human development*. FAO, Rome
- Friedman, T. L. (2005) *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Friedmann, J. (1992) *Empowerment: the politics of alternative development*. Oxford: Blackwell.
- Giddens, A. (1984) *The constitution of society: outline of the theory of structuration*. Cambridge: Polity
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. CA: Stanford University Press.
- Goulet, Denis. (1996). *A New Discipline; Development Ethic*
- Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Dalam Askar Jaya, 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Dalam [Http://File.Upi.Edu/Direktori/Fip/Jur._Pend._Luar_Sekolah/195207251978031-Ace_Suryadi/Askar_Jaya.Pdf](http://File.Upi.Edu/Direktori/Fip/Jur._Pend._Luar_Sekolah/195207251978031-Ace_Suryadi/Askar_Jaya.Pdf)

- Grisca, Seravfica. (2021). "Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat>. Diunduh 9 Mei 2022
- Hall, S. (1996). Who Needs 'Identity'? In S. Hall, & P. D. Gay, Questions of Cultural Identity. London: Sage Publication.
- Hapsari, M.T. dan Jalunggono. G, (2021). Analisis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, Vol.4, No , Hal.77-90
- Hariyani, I. (2016) 'PERAN JARINGAN SOSIAL PADA KAMPANYE LINGKUNGAN DI MEDIA SOSIAL: KASUS KAMPANYE MELAWAN ASAP', INFORMASI. doi: 10.21831/informasi.v46i1.9652.
- He, G. and Wu, X. (2017) 'Marketization, occupational segregation, and gender earnings inequality in urban China', *Social Science Research*, 65(2017), pp. 96–111. doi: 10.1016/j.ssresearch.2016.12.001.
- Helena Anggraeni (Reni) Tjondro Sugianto (2018). Etika Pembangunan Ekonomi terhadap Kaum Miskin. *Jurnal Ilmiah Mabis Universitas Widya Dharma Pontianak* Vol 9, No 2 (2018). ISSN : 2088-4605. H. 7-8
- Hermi, D. (2015) 'Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan', *Muadalah*, 2(1), pp. 1–14. doi: 10.18592/jsga.v2i1.459.
- Hetifah, Sj Sumarto, (2003). Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, Dalam Tutyirawaty. *Pembangunan Masyarakat*, Dalam <https://tutyirawaty.wordpress.com/pembangunan-masyarakat/>
- Hettne, B., dan Soderbaum, F., (2008). "The future of regionalism", in *Regionalisation and global governance: The taming of globalisation*. Abingdon, UK: Routledge
- Hirst, P., Thompson, G. and Bromley, S. (2015) *Globalization in question*. John Wiley & Sons.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations*. California: Sage.

- Hofstede, G. H. (1980). *Culture Consequences: International Differences in Work-Related Values*. California: Sage Publications.
- Ife, Jim. (2002). *Community Development : Community Based Activities in an Age of Globalization*, Australia : Cath Godfrey Publisher.
- Ilham, D. (2020). *Persoalan-Persoalan Pendidikan Dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 9(2), 179-188.
- Internatiuonal NGO Forum On Indonesian Development, 2015. *Dokumen Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Dokumen Terjemahan Dari Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*
- Jaja, J. M. (2010). *Globalization or Americanization: Implication for Sub-Saharan Africa*. In K. G. Deng, *Globalization - Today, Tomorrow* (pp. 113-124). Croatia: Rijeka.
- Jamaluddin, A. N (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Penerbit CV. Pustaka Setia. Bandung.
- Jamaludin, A. N. (2016) *Sosiologi Pembangunan*.
- Jamias J (ed) (1975) *Readings in development communication*. University of the Philippines, Los Baños
- Joesoef , Daud, (2018). *Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya, Buah-buah Daoed Joesoef untuk Membumikan Pembangunan Nasional*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Kahpi, A. (2018). *Pengupahan : Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di Indonesia*. *Jurnal Jurisprudentie*. Vol. 5 No. 2, Hal: 67-85
- Kashima, Y. et al. (2011) 'Globalization and folk theory of social change: How globalization relates to societal perceptions about the past and future', *Journal of Social Issues*. Blackwell Publishing Inc Malden, USA, 67(4), pp. 696–715.
- Keesing, R. M. (1997). *Teori-teori Tentang Budaya*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 1-32.
- Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Depok, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 10, No. 2, Desember 2011 : 168-175

- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2015). Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kovács, T. (2018) 'Tourism, administration, and spatial development'. Mátrai, Hungary: Gyöngyös Campus.
- Kroeber A, Kluckhohn C (1952) Culture. A critical review of concepts and definitions. Vintage Books, New York
- Kuntowijoyo, (2006). Budaya dan Masyarakat, edisi paripurna, Jogjakarta : Tiara Wacana.
- Kurniullah, A. Z. (2020) 'Visual Industry, Visual Culture and New Phase of Modern Human Civilization in Indonesian Studies', Asian Research Journal of Arts & Social Sciences, 10(3), pp. 11–23. doi: 10.9734/arjass/2020/v10i330147.
- Kurniullah, A. Z. et al. (2020) 'Positive Outcomes of Human Resources Engagement and Impact on Motivation', Productivity Management, 25, pp. 638–667.
- Lee, E. and Vivarelli, M. (2006) 'The social impact of globalization in the developing countries', Int'l Lab. Rev. HeinOnline, 145, p. 167.
- Leys, C. (1996) The rise and fall of development theory. London and Nairobi: James Currey and EAEP.
- Licona, T. (2014) 'PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER (Telaah terhadap Gagasan Thomas Lickona dalam Educating for Character)', Al-Ulum: Jurnal Studi Islam.
- Lubis, Mochtar et.al, (1985). Bunga Rampai Korupsi, Jakarta : LP3ES.
- Lubis, Mochtar et.al, (2016). Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban), Jakarta : Yayasan Pustaka Obor.
- M. Zaini, Agus Tri Darmawanto, 2015. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, JIEP-Vol. 15, No 2 November 2015 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
- Mair L (1984) Anthropology and development. Macmillan, London

- Malone, E. L. (2002) 'Hot topics: Globalization and climate change', *Social thought & research*. JSTOR, pp. 143–173.
- Mandas et al. (2020). Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di Bkkbn Prov. Sulawesi Utara) *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 62, Hal: 92-98
- Manyozo L (2006) Manifesto for development communication: Nora Quebral and the Los Banos school of development communication. *Asian J Commun* 16(1):79–99
- Martin, K. (1991) 'Modern development theory', in idem (ed.), *Strategies of economic development*. London: Macmillan, pp. 27–74.
- Martinussen J., (1997), *Society, State & Market, A Guide To Competing Theories Development*, London & New York : Zed Books Ltd
- Matei, S. A. (2006). Globalization and heterogenization: Cultural and civilizational clustering in telecommunicative space (1989–1999). *Telematics and Informatics*, 316-331.
- McClelland, David C, (1977). *Dorongan Hati Menuju Modernisasi*, dalam Weiner, Myron, ed. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Meadowet al., (1972). *The Limit to Growth*, Dalam Askar Jaya, 2004. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*, Dalam [Http://File.Upi.Edu/Direktori/Fip/Jur._Pend._Luar_Sekolah/195207251978031-Ace_Suryadi/Askar_Jaya.Pdf](http://file.upi.edu/direktori/fip/jur._pend._luar_sekolah/195207251978031-ace_suryadi/askar_jaya.pdf)
- Moeljarto Tjokrowinoto. (1987). *Politik Pembanguan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah Dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, Dalam Tutyirawaty. *Pembangunan-Masyarakat*, Dalam <https://tutyirawaty.wordpress.com/pembangunan-masyarakat/>
- Mowlana H (1986) *Development. A field in search of itself*. American University, Washington, DC
- Muhammad Suparmoko, (2020). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*
- Murdock, G. (2010) 'Pierre Bourdieu, Distinction: a social critique of the judgement of taste', *International Journal of Cultural Policy*. doi: 10.1080/10286630902952413.
- Murniningtyas, A. and Endah, S. A. (2018) *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Available at:

<http://sdgcenter.unpad.ac.id/sdgs-books/tujuan-pembangunan-berkelanjutan-di-indonesia-konsep-target-dan-strategi-impelemntasi/>.

- Mussida, C. and Patimo, R. (2020) 'Women's Family Care Responsibilities, Employment and Health: A Tale of Two Countries', *Journal of Family and Economic Issues*, (Goldin 2006). doi: 10.1007/s10834-020-09742-4.
- Nederveen Pieterse, J. and B. Parekh (eds) (1995) *The decolonization of imagination*. London: Zed. *Political Studies*, 46: 36–52.
- Panuluh, S. and Fitri, M. R. (2016) 'Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia', Briefing Paper 02, infid(Sustainable Development Goals (SDGs)), pp. 1–25. Available at: http://www.sdg2030indonesia.org/an-component/media/upload-book/Briefing_paper_No_1_SDGS_-2016-Meila_Sekar.pdf.
- Pieterse, J. N. (1996) 'The development of development theory: Towards critical globalism', *Review of International Political Economy*. doi: 10.1080/09692299608434373.
- Pieterse, J. N. (2009) *Development theory: Deconstructions/reconstructions*, *Development Theory: Deconstructions/Reconstructions*. doi: 10.4135/9781446279083
- Pieterse, J. N. (2012) 'Periodizing globalization: Histories of globalization', *New Global Studies*. De Gruyter, 6(2).
- Pieterse, J.N (2010). *Development Theory Deconstructions/ Reconstructions*. Second Edition. SAGE Publications Ltd. London
- Prasetyawati, N. (2018) 'Perspektif Gender Dalam Pembangunan Nasional Indonesia', *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), p. 53. doi: 10.12962/j23546026.y2018i5.4421.
- Prasetyawati, N. (2019) 'Prosiding SEMATEKSOS 3"Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0" PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA', pp. 54–60. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/304721223.pdf>.
- Pratama, B. (2011) 'Globalization VS Internationalization for Entrepreneurs', *Binus Business Review*, 2(1), pp. 293–301.
- Pratiwi, P.H (2008). Kebijakan Nasional terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal DIMENSIA*, Volume 2 No.1 Hal.101-112.

- Preston, P.W. (1996) *Development theory: an introduction*. Oxford: Blackwell.
- Priyono, Herry, (2018). *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Puspitasari, N. (2013) 'Peran gender, Kontribusi Ekonomi, dan Kesejahteraan Petani Hortikultura'.
- Puspitawati, H. (2013) 'Konsep, Teori dan Analisa Gender', *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia.*, 4(Zeitlin 1995), pp. 1–16. doi: 10.1017/S0033583501003705.
- Putnam, R. D. (1994) 'Social Capital and Public Affairs', *Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences*. doi: 10.2307/3824796.
- Quebral NC (1971) *Development communication in the agricultural context*. In: *Search of break- throughs in agricultural development*. University of the Philippines, Los Baños, December 9–10
- Quebral NC (1988) *Development communication*. University of the Philippines, Los Baños
- Ritzer, G. (2007) *The globalization of nothing 2*. Sage.
- Ritzer, G. (2010). *Globalization: A Basic Text*. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
- Ritzer, G., & Goodman, J. D. (2008). *Teori Sosiologi Modern (edisi Terjemahan)*. Jakarta: Kencana.
- Robertson, R. (2001). *Globalization Theory 2000+: Major Problematics*. In G. R. Smart, *Handbook of Social Theory*. London: Sage Publication.
- Rogers EM (1976) *Communication and development: critical perspectives*. Sage, Beverly Hills
- Rogers, Evertt M, (1985). "Perspektif Baru Dalam Komunikasi dan Pembangunan: Suatu Tinjauan, dalam Komunikasi dan Pembangunan Perspektif Kritis, Jakarta : LP3ES.
- Rosana, M. (2018) 'Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), pp. 148–163.
- Rosenau, P. (1992) *Postmodernism and the social sciences*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Rostow, Walter W. 1960. *The Stages of Economic Growth: A Non-communist Manifesto*
- Runa, I. (2012) 'Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata', *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 2(1), pp. 149–162.
- Sadono, Sukirno. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sahidu, Arifudin. 1998. *Partisipasi Masyarakat Tani Pengguna Lahan Sawah dalam Pembangunan Pertanian di Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat*. Disertasi. Pascasarjana, IPB
- Said Zainal Abidin, 2016. *Hakekat Pembangunan Dan Perubahan Masyarakat, Dalam*
<https://pascasarjana.esaunggul.ac.id/index.php/2016/08/29/hakekat-pembangunan-dan-perubahan-masyarakat/>
- Sajogyo, 2004. *Etika Pembangunan, Siapa yang Punya? Kasus: Ide Koperasi*. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial UNISIA*. UNISIA No. 54/XXVII/IV/2004. ISSN. 0215-1421. Hal. 345 St. Clair, Asuncion Lera (2007): *A Methodologically Pragmatist Approach to Development Ethics*, *Global Ethics*, 3(2), 141-162
- Salim, Agus (2002). *Perubahan Sosial : Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Penerbit Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Samovar LA, Porter RE (1995) *Communication between cultures*. Wadsworth, Belmont
- Santoso. (2003), *Pengembangan UKM Berbasis Ekowisata*, <http://Www.Pn-m.Co.id>. (tanggal 17 November 2015), Dalam M. Zaini, Agus Tri Darmawanto, 2015. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*, *JIEP-Vol. 15, No 2 November 2015* ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
- Saputra, W., (2017). *Kebijakan Prespektif Dalam Pembangunan Nasional Yang Berwawasan Kependudukan*. *Demography Journal Of Sriwijaya (Dejos)*, [S.L.], V. 1, N. 1, P. 27-31,
- Sari, A. Y. (2020) 'Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang', *Journal of International Relations*, 6(2), pp. 358–367.

- Scholte, J. A. (2005). *Globalization : A Critical Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Schutz, A. (1972) *The phenomenology of the social world*. London: Heinemann (orig. edn 1932).
- Schuurman, F. (ed.) (1993) *Beyond the impasse: new directions in development theory*. London: Zed.
- Sen, Amartya, 1993. *Development as freedom*. New York: Oxford University Press. 2001
- Servaes J (1999) *Communication for development: one world, multiple cultures*. Hampton, Cresskill
- Servaes J (2011) *Social change*. Oxford Bibliographies Online (OBO), Oxford University Press, New York, 58 pp. <http://www.oxfordbibliographiesonline.com/display/id/obo-9780199756841-0063>
- Servaes J (ed) (2007) *Communication for development. Making a difference – a WCCD background study*. In: *World congress on communication for development: lessons, challenges and the way forward*. World Bank, Washington, DC, pp 209–292
- Servaes J (ed) (2008) *Communication for development and social change*. Sage, London
- Servaes J (ed) (2013) *Sustainability, participation and culture in communication. Theory and praxis*. Intellect-University of Chicago Press, Bristol/Chicago
- Servaes, J (ed.) (2017) *The Sustainable Development Goals in an Asian context*. Singapore: Springer, 174pp. ISBN 978-981-10-2814 <http://www.springer.com/in/book/9789811028144>
- Setiadi, E. M. and Kolip, U. (2011) 'Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya', Kencana, Jakarta.
- Soegianto, A. (2010). *Ilmu Lingkungan : Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Soekanto, S. (1990) 'Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi IV', in Jakarta, Penerbit Rajawali.

- Soekanto, S. (2001) *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (1990), *Sosiologi Keluarga*; Jakarta : CV Rajawali.
- Soelaiman, M. (1998). *Dinamika Masyarakat Transisi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soemardjan, S. and Soemardi, S. (1964) 'SETANGKAI bunga sosiologi', in *SETANGKAI bunga sosiologi*.
- Soemardjan, Selo dan Soleman, Soemardi (ed) (1974) *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Dalam Syarif Moeis, 2009. *Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan Teori Modernisasi Dan Teori Dependensi*, Makalah Disajikan dalam diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung
- Soemarwoto, O. (1997) *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Soerjani, M., Ahmad, R., Munir, R. (1987). *Lingkungan : Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*. UI Press. Jakarta.
- Soleh, A. (2017). *Masalah Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 6 No. 2, Hal:83-92
- Sondang P. Siagian. (1978). *Peranan Staf dalam Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Mangesti Rahayu, e all (2019) 'GENDER STEREOTYPES IN INDONESIAN PUBLIC COMPANIES ' PERFORMANCE', *JAMS*, (30), pp. 1–7.
- Stiglitz, J. E. (2017) 'The overselling of globalization', *Business Economics*. Springer, 52(3), pp. 129–137.
- Subandi, (2014), *Ekonomi Pembangunan*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugandi, dkk. (2007). *Prinsip dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, Dalam M. Zaini, Agus Tri Darmawanto, 2015. *Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*, *JIEP*-Vol. 15, No 2 November 2015 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851

- Suhendi et al, (2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Valuasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 1
- Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB, Dalam Askar Jaya, 2004. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development), Dalam http://File.Upi.Edu/Direktori/Fip/Jur._Pend._Luar_Sekolah/195207251978031-Ace_Suryadi/Askar_Jaya.Pdf
- Sumiman Udu (2017) 'MODAL BUDAYA DAN MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN BADAN OTORITA PARIWISATA WAKATOB', Makalah disampaikan dalam Konferensi Internasional Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah Indonesia yang. doi: https://www.academia.edu/34695808/MODAL_BUDAYA_DAN_MODAL_SOSIAL_DALAM_PENGEMBANGAN_BADAN_OTORITA_PARIWISATA_WAKATOBI.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2009). Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Suradi (2012) 'Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial', *Jurnal Informasi*, 17(03), pp. 114–128.
- Suradi, (2007). Membangun Dan Memberdayakan Masyarakat Pendekatan Pekerjaan Sosial Generalis. *Jurnal Sosio informa*. Puslitbangkesos. Sinta 2. Vol. 12, No. 02, tahun 2007. ISSN : 2442-8094, E-ISSN : 2502-7913. Hal. 1-2
- Suryana, S., (2020). Permasalahan Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Pembangunan Pendidikan. *Jurnal Edukasi*, Vol. 14, No.1
- Susiana, S. (2015) 'PENERAPAN KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (STUDI DI PROVINSI PAPUA and Budgeting Concept in Local Development Sali Susiana', *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), pp. 1–12.
- Sutamihardja, (2004) Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan

- Sutarya, I. G. (2020) 'Modal Budaya Guru Yoga Lokal Menghadapi Persaingan Global dalam Pariwisata Yoga di Bali', *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*. doi: 10.24843/jkb.2020.v10.i01.p06.
- Syarif Moeis, (2009). *Pembangunan Masyarakat Indonesia Menurut Pendekatan Teori Modernisasi Dan Teori Dependensi*, Makalah Disajikan dalam diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung
- Tasrif Landoala, (2013). *Dampak dari Pembangunan*, Dalam <http://jembatan4.blogspot.com/2013/12/dampak-dari-pembangunan.html>
- Therborn G (1980) *The ideology of power and the power of ideology*. Verso, London
- Theresia Marditama dkk (2020) *Women Empowerment*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Therik, W. M. A. (2019) 'Teknologi Informasi, Media Sosial dan Hoaks', *PAX HUMANA*, 5(1), pp. 3–6.
- Thomas S (1982) *Some problems of the paradigm in communication theory*. In: Whitney DC, Wartella E (eds) *Mass Communication Review Yearbook 3*. Sage, London
- Thomas, R., (2017). *Deskripsi Kebijakan Dan Permasalahan Kependudukan Di Indonesia*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 5, No 2, Hal:17-24
- Thompson M, Ellis R, Wildavsky A (1990) *Cultural theory*. Westview Press, Boulder
- Todaro, Michael and Stephen Smith. 2012. "What Do We Mean by Development?" in *Economic Development*. (11h edition). P. 14-25. England: Pearson Education Limited.
- Tumanggor, R. dkk (2015) *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. 4th edn. Edited by Suwito. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Tuty Herawati, (2011). *Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan*
- Umboh, Fredriek Anderson. (2004). *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pinili Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa*. Tesis. Pascasarjana, IPB, Dalam Tutyirawaty. *Pembangunan-Masyarakat*, Dalam <https://tutyirawaty.wordpress.com/pembangunan-masyarakat/>

- UN Women (2018) Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development, Discussion Paper. Available at: <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-fact-sheet-sub-saharan-africa-en.pdf?la=en&vs=3558>.
- Usman, S. (1998). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Pustaka Pelajar. Jakarta
- Venables, E. and Stadler, J. (2012) “‘The study has taught me to be supportive of her’: Empowering women and involving men in microbicide research’, *Culture, Health and Sexuality*, 14(2), pp. 181–194. doi: 10.1080/13691058.2011.630757.
- Wallerstein, Immanuel. 1974. *The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York/London: Academic Press.
- Webster, Andrew. 1984. *Theories of Underdevelopment.*” In *Introduction to the Sociology of Development*. p. 81-93. London: Macmillan Publishers.
- White R (1988) *Media, politics and democracy in the developing world*. Center for the Study of Communication and Culture, London, April
- Wiasti, N. M. (2017) ‘Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)’, *Journal of Anthropology*, 1(1), pp. 29–42.
- Wicaksono dan Kharisma, B., (2020). *Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Di Jawa Barat: Studi Kasus Kabupaten Purwakarta*. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayan, Vol. 9, No.1, Hal:1-22
- Wijayanto dan Zachrie, Ridwan, (2009). *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanto, H. dan Ode, S., (2019). *Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan Pengangguran Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.10, No.1, Hal:1-8
- Wilpert, B. (2009) ‘Impact of globalization on human work’, *Safety science*. Elsevier, 47(6), pp. 727–732.

- Wiwoho, J. (2016) *Dimensi Globalisasi, Suatu Proses Sosial Budaya, Ekonomi, Politik dan Hukum dalam Dunia Tanpa Batas*. Surakarta. Available at: <https://slideplayer.info/slide/12249865/>.
- Woolcock, M. (2001) 'The place of social capital in understanding social and economic outcomes', *Canadian Journal of Policy Research*.
- World Bank (2006) *Global monitoring report 2006*. World Bank, Washington, DC
- World Commission on Environment and Development (1987) *Our common future*. Published as annex to general assembly document A/42/427, development and international co-operation: environment. UN, New York
- Yulianto, Daris, (2014). *Integrasi Moral dan Etika Pembangunan : Suatu Pendekatan Alternatif dalam Teori Pembangunan (Integrative Morals and Ethics Development: The Alternative Approach in Development Theory)*. Paradigma. *Jurnal Ilmu Administrasi*. STIA "AAN" Yogyakarta, Volume III Nomor 2 Desember 2014. pISSN 2301-5497, eISSN 2549-8460. H. 151-154
- Yuwono, D. M. (2013) 'Pengaruhutamakan gender dalam pembangunan pertanian : kasus pada pelaksanaan program', *Sepa*, 10(1), pp. 140–147.
- Zamroni (2011) 'Bahasa dan sastra Indonesia sebagai wahana pendidikan karakter', in *Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik*.
- Zhang, Z. and Wu, X. (2017) 'Occupational segregation and earnings inequality: Rural migrants and local workers in urban China', *Social Science Research*, 61, pp. 57–74. doi: 10.1016/j.ssresearch.2016.06.020.

Biodata Penulis



Ardhariksa Zukhruf Kurniullah, M.MED.KOM

Penulis yang akrab dipanggil Ardhan merupakan akademisi sekaligus praktisi di bidang teknologi komunikasi dan entrepreneurship. Penulis menyelesaikan studi Magister Media Studies dan Komunikasi di Universitas Airlangga dan saat ini merupakan kandidat dual degree Doktor pada bidang Business, Teknologi dan Komunikasi sekaligus

memiliki sertifikasi kompetensi di bidang di bidang valuasi bisnis, operations dan bisnis startup di Internasional Academy of Finance and Management Australia & European Collage for Liberal Studies.

Saat ini penulis menjadi Dosen Tetap Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta. Selain itu juga merupakan CEO PT. Azzukhruf Intermedia Siberkom (gurumerdeka.id) sekaligus Executive Chairman AZ Company Group. Kecintaannya pada bidang komunikasi, khususnya digital advertising dan marketing komunikasi, kewirausahaan & bisnis, serta teknologi evangelist ini telah mengukir prestasi baik nasional maupun internasional, diantaranya yaitu menjadi finalis World Digital Marketing Association, Brazil 2011, Global Startup Awards 2017 dan juga visiting scholar di kampus Universidad Autonoma De Madrid. Penulis juga aktif menjadi konsultan bisnis dan teknologi, pembicara maupun narasumber ahli baik tingkat nasional maupun internasional. Email: ardhariksa.zukhruf@gmail.com



Annisa Ilmi Faried

Menamatkan S2 ke Megister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, sedang mengikuti studi lanjutan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Sedang proses pembuatan disertasi. Bekerja menjadi staf pengajar pada Fakultas Sosial Sains Program Studi Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan dari tahun 2012 sampai sekarang. Menjadi staf ahli bidang kependudukan dan kebudayaan di Lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dengan mengikuti beberapa judul penelitian. Aktif memasukkan jurnal nasional maupun internasional. Sudah mengeluarkan berbagai buku dengan judul Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia, Perekonomian Indonesia : Antara Konsep dan Realita Keberlanjutan Pembangunan, Ekonomi Pembangunan : Teori-Teori Dasar Ekonomi. Saya juga menulis beberapa buku kolaborasi dengan beberapa dosen di berbagai universitas yaitu Kewirausahaan UMKM, Teaching From Home Dari Belajar Merdeka Menuju Merdeka Belajar, Pandemi covid 19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia, Belajar Dari Covid-19 Perspektif Ekonomi & Kesehatan, Kita Menulis : Merdeka Menulis, Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan, Ekonomi SDA, Sosiologi Ekonomi. Semua buku sudah memiliki ISBN, E-ISBN dan HKI. Semoga para pembaca bisa menambah khazanah dari buku ini.



Dr. Hisarma Saragih, M. Hum.,

Dosen Prodi Pendidikan Sejarah, dan Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun Pematang Siantar. Lahir di Merek Situnggaling 9 Januari 1964. Tamat dari SD Negeri 2 Pematang Raya (1975), ; SMP Negeri 1 Pematang Raya (1979); SMA Negeri Seribudolok (1982). Memperoleh Sarjana (Drs) Jurusan Sejarah FS USU Medan (1988).

Magister Humaniora (M.Hum) Jurusan Sejarah dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000). Doktor Studi Pembangunan dari FISIPOL USU Medan dengan predikat Cumlaude thn 2018. Jabatan yang pernah dipangkunya: Pembantu Dekan III FKIP USI (1996-1998); Sekretaris LPPM USI 2001-2002; Dekan FKIP USI 2002-2005; Pembantu Rektor II USI 2005-2009; Pembantu Rektor I USI 2009-2012; Rektor Universitas Simalungun 2012-2014 Direktur Badan Penjaminan Mutu Univ. Simalungun 2015-2019.

Aktif sebagai nara sumber tingkat lokal, regional dan nasional. Karya ilmiah yang diterbitkan : Buku Zending di Tanah Batak, Studi tentang Konversi dikalangan Masyarakat Simalungun 1903-1942 Ombak: Yogyakarta, 2019.; Buku: Patungging Adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun,(Ed.) ISBN: 978-623-6761-75-5. Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2020.; Filsafat Pendidikan ISBN: 978-623-342-011-2 Penerbit Yayasan Kita Menulis: Medan 2021. Jurnal: Aktualisasi Kearifan Lokal Raja Sang Nauluh Damanik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. VI, No. 1, Tahun 2019. ; Dinamika Identitas Etnis Simalungun Dan Pembangunan di Kota Pematang Siantar, dalam ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan Vol. V, No. 2, Tahun 2018. ; Sejarah Simalungun (buku..ditulis dkk, terbit 2012 USU Press.); Habonaron do Bona : Filosofi kehidupan Orang Simalungun Abad 21, Chapter. terbit 2017 Simetri Institute Medan. Actualization of Local Wisdom in Simalungun Ethnic Daily Life : Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 136, Copyright © 2018, the Authors. Published by Atlantis Press. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>). The struggle of Batak Simalungun for their identity in Church organization in Simalungun, Medan, Indonesia, Journal of Human Behavior in the Social Environment, <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1590888>.;Socio-cultural change influences the changes of Simalungun religion, (2020) Asian Ethnicity, DOI:10.1080/14631369.2020.1792269.<https://doi.org/10.1080/14631369.2020.1792269>).

**Dr. Ir. Nugrahini Susantinah Wisnujati M.Si**

Penulis lahir di Bau Bau Buton Sulawesi Tenggara 3 April 1962. Bekerja sebagai Dosen di (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII yang dipekerjakan (DPK) di Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pada Program Studi Magister Agribisnis. Selain sebagai dosen juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Agribisnis (S2). Jabatan Akademik Lektor Kepala. Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda/IV-C.

Pendidikan Terakhir Doktor (S3) Ilmu Pertanian dari Universitas Brawijaya Malang. Aktif sebagai Fasilitator Daerah dan Tim Teknis Pengarus Utamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur, Tenaga Ahli Gender Kota Surabaya, memfasilitasi terwujudnya PERDA PUG Kota Surabaya no. 4 tahun 2019. Memfasilitasi Penyusunan Grand Design Pengarus Utamaan Gender. Menjadi Reviewer di berbagai Jurnal, dengan ID Scopus: 57211542323. Selama menjadi Dosen mendapat penghargaan sebagai Dosen berprestasi Juara II tahun 2019 dan Juara I pada Tahun 2020 Bidang Science dan Technology di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Mendapat Piagam Penghargaan Presiden Republik Indonesia Berupa Satyalacana Karya Satya XX tahun pada tahun 2014. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: wisnujatinugrahini@uwks.ac.id || FB: Nugrahini Wisnujati || IG: Nugrahini Wisnujati

**Dr. Amruddin, M.Pd., M.Si**

Lahir di Makassar pada 22 Juli 1969. Dosen Yayasan pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. Mendapat amanah sebagai Ketua Program Studi Agribisnis 2014-2018. Aktif pada Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAI) dan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) wilayah Sulawesi Selatan. Menempuh jenjang Pascasarjana (S2) pendidikan Sosiologi di Universitas Negeri Makassar (2001) dan Program Agribisnis Universitas Islam Makassar (2012) serta

menyelesaikan strata tiga (S3) ilmu Sosiologi di UNM April 2021. Menjadi editor buku Pendidikan di Era Otonomi Daerah (2005), Pendekatan Psikologi

Pendidikan Anak (2006), Sekelumit Hikmah Bom Makassar : Sebuah Kisah Nyata Dari Balik Sel (2008) serta Dakwah dan Politik : Refleksi Atas Pemikiran Mohammad Natsir (2008). Akhir tahun 2020 menulis buku kolaborasi yakni, Pengantar Ilmu Pertanian dan Dasar-Dasar Agribisnis yang dicetak Penerbit Yayasan Kita Menulis.



Syafrizal, Drs. H. M.Si., Ph.D,

Lahir di Rumbio, Kampar Riau, Tanggal 31 Desember 1966. Menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Riau (1993), Pada Program Studi PPKn, dengan Gelar (DRS), Melanjutkan S2 di Universitas Negeri Medan (2004), Pada Program Studi Antropologi Sosial, dengan Gelar (M.Si), dan Kemudian Mendapat Tugas Belajar Untuk Program Doktorat (S3) di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia Pada Tahun 2016, Pada Program

Studi Antropologi Sosiologi, dengan Gelar (Ph.D). Bekerja Sebagai Dosen Dpk LL2DIKTI Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sejak Tahun 1997. Status Sudah Menikah (Beristri) dengan Ny. Erna Amin Syukri, dengan 5 (lima) Orang Anak (Giandiva Fahlika Erizal (S2 Kenotariatan) USU, Febby Annisa Zaufany (S1 Teknik Kecantikan) Unimed, Ahmad Glenn Alzahrawi dan Alkahfy Rambah (Aliyah Tahfizil Qur-an Pompes Dalwah Jawa Timur, Atthya Healthy Larissa SD Nurul Ilmi Medan. Alamat Rumah; Jalan Veteran Purnawirawan Blok. E, No. 20 Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang Sumatera Utara. Riwayat Pekerjaan, Pernah Menjadi Wakil Dekan I Bidang Akademik Di FISIP UMSU Selama Dua (2) Periode. Sekarang dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala/ IV-B Sejak Tahun 2008. Pernah Mengikuti Pelatihan atau Kursus Bertarap Nasional seperti Kursus Calon Dosen (SUSCADOS) Kewiraan (Kewarganegaraan), Pada Tahun 1998, Sampai Saat ini Masih Membawa Mata Kuliah Kewarganegaraan. Bidang Kepakaran Adalah Antropologi Sosiologi; Khususnya Kajian-Kajian Sosial Budaya, Etnisitas, Konflik, Perubahan Sosial, Ideologi, Globalisasi, Kearifan Lokal, Politik Lokal, Otonomi Daerah, Perilaku Sosial, Strootif dan Primordialisme, Demokrasi, Hak Azazi manusia, dan Kajian Wanita, serta Isu dan Fenomena Sosial lainnya yang Berkembang di Dalam Masyarakat.

**I Made Marthana Yusa, M.Ds**

Menyelesaikan pendidikan Strata Satu dan Dua pada Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. Penulis menekuni bidang ilmu Desain, Cultural Studies dan Seni Digital, baik dalam dimensi praktis maupun teoritis. Penulis sudah mencoba menulis dan menerbitkan beberapa buku, baik dalam bidang ilmiah, maupun fiksi. Beberapa buku ilmiah yang pernah diterbitkan di antaranya : Diskursus Alienasi dalam Penciptaan Seni dan Desain (2018), *Illustrating Zodiac* (2017), *Sinergi Sains, Teknologi Dan Seni : Dalam Proses Berkarya Kreatif Di Dunia Teknologi Informasi* (2016).

**Dr. Hasnidar, S.ST., M.Kes**

Lahir di Bone pada 3 Oktober 1976, sejak tahun 2010 hingga sekarang tercatat sebagai Dosen Lembaga Layanan Dikti Wilayah IX Sulawesi dengan DPK pada Institut Sains dan Kesehatan Bone. Menempuh pendidikan dasar di SDN No. 79 Cenrana, Bone (1989), SMPN Cenrana, Bone (1992), SMAN 2 Watampone (1995) kemudian melanjutkan studi di AKPER Depkes Banta-Bantaeng, Ujungpandang (1998), D.IV Keperawatan Bayi dan Anak pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar (2002), Magister Kesehatan UIT Makassar (2010), dan terakhir mendapatkan gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Negeri Makassar tahun 2016. Menjabat Direktur pada AKBID Bina Sehat Nusantara, Bone 2018-2020, selanjutnya pada bulan Januari tahun 2021 diangkat sebagai Rektor pada Institut Sains dan Kesehatan Bone.

**Daud, S.Pd., M.Si**

Merupakan dosen tetap di Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Pria kelahiran Panyabungan III, 28 Mei 1986 ini menamatkan S1 Pendidikan Geografi (2012), dan S2 Antropologi Sosial (2018) di universitas yang sama. Ia juga pernah berkarir sebagai pengelola layanan ICT dan Bidang Kehumasan selama hampir sembilan tahun.

Sejak menekuni profesi dosen pada 2019, Daud telah menerbitkan buku kolaborasi Pandemi Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia (Yayasan Kita

Menulis, 2020), Potret Siantar Tempo Dulu: Pemanfaatan Bangunan Pusaka Budaya Sebagai Destinasi Wisata Budaya di Sumatera Utara (Simetri Institute, 2020) dan menulis pada berbagai prosiding dan jurnal.

Di luar kesibukan mengajar sebagai dosen, Daud juga menjadi editor pada Jurnal Buddayah (Jurnal Pendidikan Antropologi), dan Jurnal Antropologi Sumatera. Ia juga mengelola website www.daud-media.com.



Jossapat Hendra Prijanto, dosen pada FIP Universitas Pelita Harapan pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Lulus S1 : UNESA 1997 Pada Jurusan Pendidikan Sejarah. Lulus S2 : UNESA 2013 Pada Jurusan Pendidikan IPS. Penulis aktif memberikan materi pada seminar-seminar Internasional dan Nasional terkait Bahasan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sejarah, Kewarganegaraan dan Pancasila, serta menulis pada jurnal-jurnal nasional dan internasional.

PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN SOSIAL

Tuntutan globalisasi dan regionalisasi merupakan faktor penting dalam mengejar arus modernisasi pembangunan dalam perkembangan suatu negara. Tinjauan umum berdasarkan tujuan utama pembangunan suatu negara adalah proses pengarus-utamaan modernisasi atau mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Modernitas suatu negara juga tidak lagi mengacu pada masalah ekologi westerinisasi terhadap budaya lokal dan keragaman budaya, namun konsekuensi dari perubahan teknologi dan bahkan kekuatan pasar e-commerce serta institusi internasional saat ini telah mengambil alih peran modernisasi suatu negara sebagai agen pembangunan konvensional.

Adapun dalam Buku ini dibahas beberapa materi antara lain :

Bab 1 Konsep dan Teori Pembangunan

Bab 2 Permasalahan Pembangunan Kependudukan, Kependidikan, dan Ketenagakerjaan

Bab 3 Permasalahan Budaya Penghambat Pembangunan

Bab 4 Dampak Pembangunan Terhadap Peran Gender

Bab 5 Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan

Bab 6 Dampak Pembangunan Terhadap Sosial Budaya

Bab 7 Globalisasi: Konsep, Dimensi, dan Sejarah

Bab 8 Globalisasi: Modal Sosial dan Modal Budaya

Bab 9 Globalisasi: Identitas dan Budaya

Bab 10 Etika Pembangunan



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

